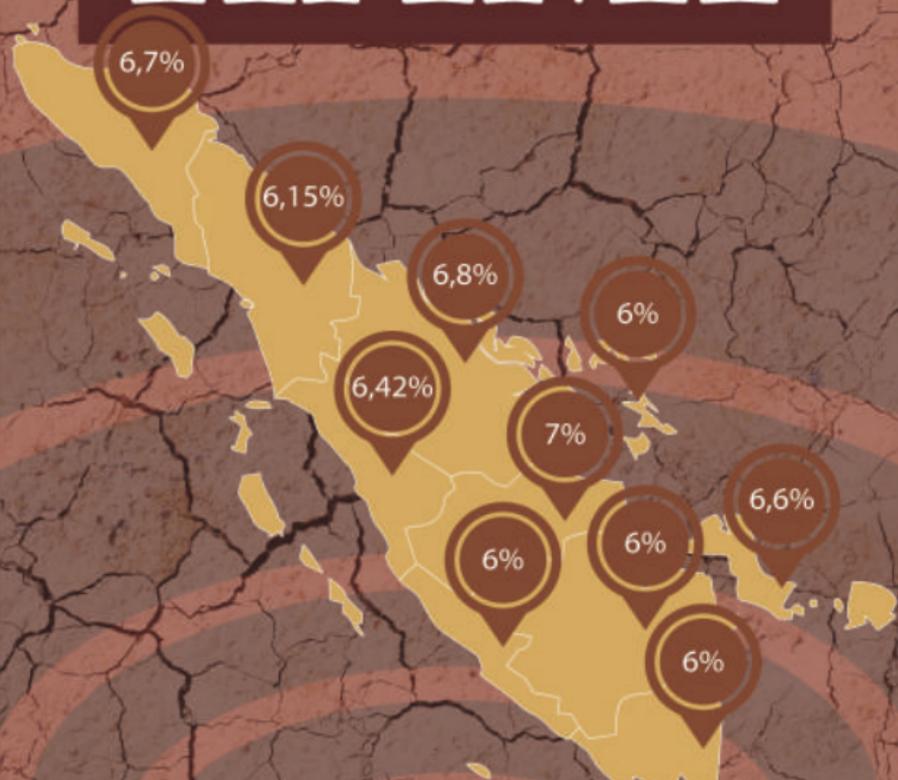


# robohnja SUMATERA KAMI



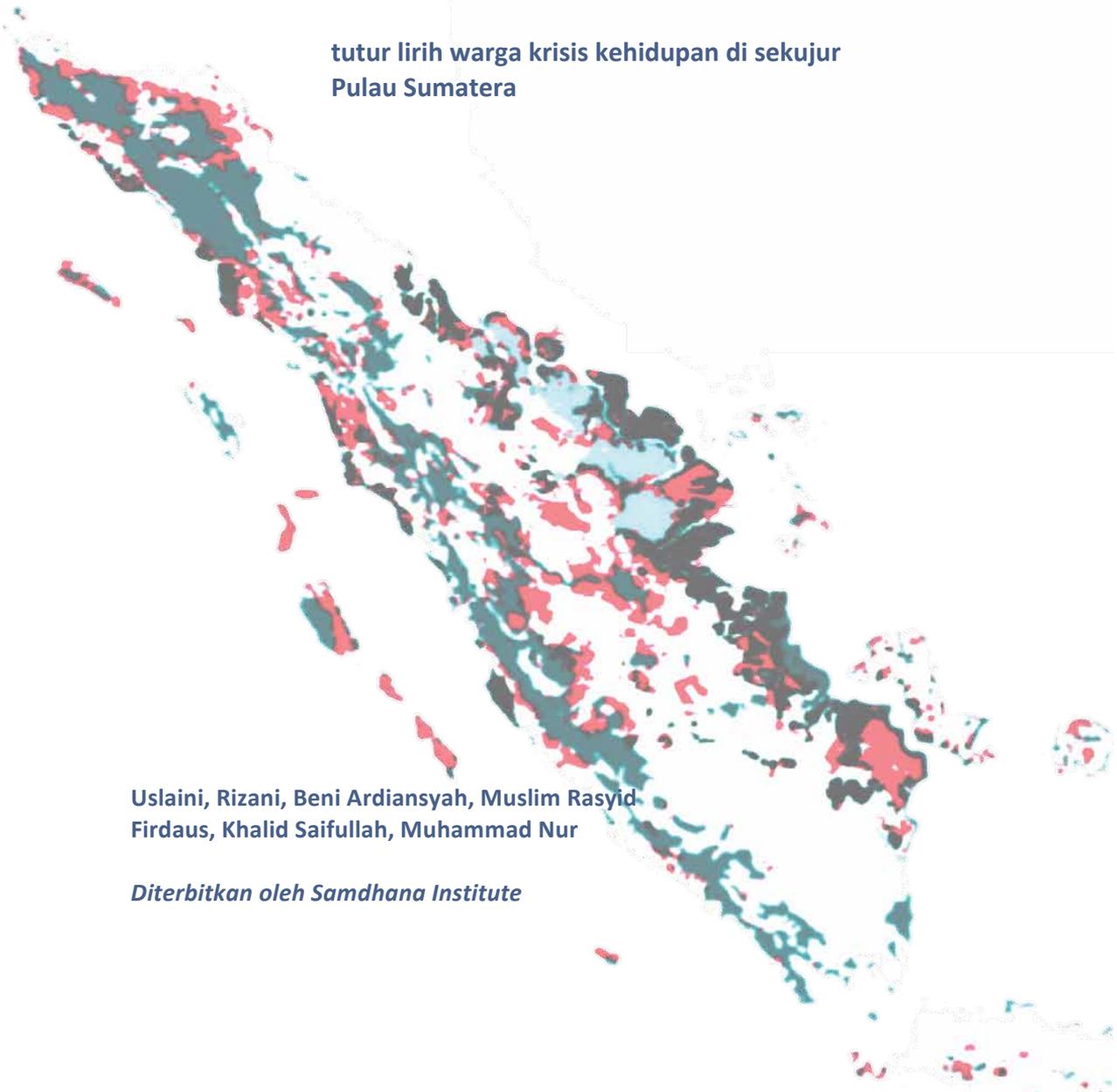
Uslaini, Rizani, Beni Ardiansyah, Muslim Rasyid, Firdaus, Khalid Saifullah, Muhammad Nur  
Diterbitkan oleh Samdhana Institute

# Robohnja Sumatera Kami

tutur lirin warga krisis kehidupan di sekujur  
Pulau Sumatera

Uslaini, Rizani, Beni Ardiansyah, Muslim Rasyid,  
Firdaus, Khalid Saifullah, Muhammad Nur

*Diterbitkan oleh Samdhana Institute*





# ROBOHNJA

## SUMATERA KAMI



KRISIS  
PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



KRISIS  
PANGAN DAN AIR



KRISIS  
TAMBANG DAN PERKEBUNAN



KRISIS  
TANAH DAN PERAMPASAN LAHAN



KRISIS  
ENERGI DAN PELAYANAN DASAR



KRISIS  
IDENTITAS DAN SOSIAL-BUDAYA



*Sebuah bunga rampai dari catatan pengalaman dan refleksi sepanjang 2010-2015 kerja-kerja kampanye organisasi masyarakat sipil lingkungan hidup di Sumatera yang tergabung dalam Simpul Kampanye Mitra Sumatera dari Program Kewaspadaan Masyarakat terhadap REDD+ oleh Samdhana Institute.*

*Sebuah sorot dan telaah atas krisis serta kebangkrutan sendi-sendi kehidupan di sekujur pulau.*

*Sebuah permohonan maaf dari para penulis kepada warga korban kebangkrutan dan krisis ruang hidup yang terus mendera meskipun intensitas kerja-kerja pembelaan telah ditingkatkan.*

*Sebuah tutur liris tentang kerumitan rerantai sistem penyelenggaraan wilayah yang alih-alih menjamin keselamatan dan produktivitas serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga, tetapi malah menjadi faktor penyebab dan pendorong berlanjutnya kemerosotan kualitas ruang hidup dan kehidupan.*

*Sebuah tawaran dialog tentang bagaimana warga dapat mempertahankan hidup, menyasati krisis dan kebangkrutan kehidupan.*

# Robohnja Sumatera Kami

tutur lirin warga krisis kehidupan di sekujur Pulau Sumatera

## Para Penulis

Uslaini – WALHI Sumbar  
Rizani – MITRA BENTALA, Lampung  
Beni Ardiansyah – WALHI Bengkulu  
Muslim Rasyid – JIKALAHARI, Riau  
Firdaus – PBHI Wilayah Sumbar  
Khalid Saifullah - WALHI Sumbar  
Muhamad Nur – WALHI Aceh

## Para Periset

Ahmad Taufik – Seknas FITRA  
Nora Hidayati – Q-BAR, Padang  
Isyanto – YKWS, Lampung  
Hadi Jatmiko – WALHI Sumsel  
Riko Kurniawan – WALHI Riau  
Kusnadi Oldani – WALHI Sumut  
Firdaus – PBHI Wilayah Sumbar  
Mora Dingin Nasution – Q-BAR, Padang  
Mufti Fathul Barri – FWI, Bogor  
Ade Ikhsan – JKPP, Bogor

**No ISBN :** 978-979-17013-2-7

## Perancang Grafis, Visualisasi, Tata Letak

Laksono Adi Widodo, Jogja

## Para Penyunting

Arief Wicaksono  
Christian Purba  
Khalid Saifullah  
Ambrosius Ruwindrijarto

## Pendukung Pembiayaan dan Pendamping Teknikal

Samdhana Institute melalui Program Kewaspadaan Masyarakat terhadap REDD+ (2010-2015)



No FSC-C021798 dan No FSC SECR-0040

Dicetak diatas kertas yang memenuhi standard kehutanan berkelanjutan

# Daftar Isi

---

Daftar Isi .....	vii
PENGANTAR .....	ix
SAMBUTAN dari Samdhana Institute .....	xiii
Memahami Krisis dan Kebangkrutan Kehidupan di Sumatera—Sebuah PENDAHULUAN— .....	1
Arak-Arakan Derita Rakyat Dari Dahulu Sampai Kini .....	1
Krisis di Sekujur Pulau Sumatera .....	8
Potret Horor Empat Krisis .....	12
Persebaran Cemaran Asap: .....	12
Warga Biasa Rawan Menjadi Korban Pembangunan dan Perampasan Lahan: .....	15
Sumatera Rawan Bencana: .....	18
Efek Domino yang Merubuhkan Sumatera: .....	21
AkhirulKalam. . . ..	24
RIAU: generasi yang hilang oleh pembakaran hutan dan lahan .....	27
BENGKULU: tanah yang telah hilang dan tanah yang harus dipertahankan .....	35
SUMATERA BARAT: hilangnya tanah nagari nagari .....	43
ACEH: tanah untuk harimau, tambang, dan perkebunan; tanah bukan untuk manusia .....	51
ACEH: enak-enak aja kau rampas dan tunjuk-tunjuk kawasan hutan, memangnya kami dianggap apa? .....	63
BENGKULU: adakah harapan kehidupan dari perkebunan kelapa sawit tertua? .....	71

LAMPUNG:konflik dan kriminalitas demi pertumbuhan ekonomi.....	81
RIAU:investasi rakus ruang ancaman keselamatan warga.....	91
SUMATERA BARAT:aib kita penanda krisisluar biasa .....	99
SUMATERA SELATAN:anwar sadat sahabat rakyat .....	111
SUMATERA UTARA:tombak haminjon .....	119
SUMATERA BARAT:damn the dam.....	127
LAMPUNG:listrik untuk siapa? .....	137
BENGGKULU:joko anak pesisir.....	147
SUMATERA BARAT:hutan adalah kunci keselamatan mentawai .....	159
LAMPUNG:pertarungan untuk ruang kelola hutan .....	169
SUMATERA BARAT:hukum dan aparat sebab musabab tragedi iwan.....	179
CATATAN Akhir.....	191

# PENGANTAR

---

**Ibu, mBah, Nak, Bapak, Bang, Uda**

Salam hormat,

Terus terang, perasaan kami campur aduk saat menuliskan ini, menghantarkan surat-surat dari teman-teman kami kepada Ibu, mBah, Nak, Bapak, Bang, Uda.

Senang dan lega.

Senang karena akhirnya semua surat itu selesai ditulis, dikumpulkan di buku ini, dicetak, dan dikirimkan kepada Ibu, mBah, Nak, Bapak, Bang, Uda.

Lega karena setelah lima tahun kami, yang adalah beberapa organisasi non-pemerintah beserta aktivis-aktivisnya, berkegiatan bersama dalam lingkup *REDD Preparedness* (Kesiapan menuju Pengurangan Emisi dari Degradasi dan Hilangnya Hutan) akhirnya dapat jua menyapa Ibu, mBah, Nak, Bapak, Bang, Uda secara langsung, pribadi, dan tertulis.

Sedih dan khawatir.

Sedih karena nyata dalam surat-surat ini bahwa keadaan warga, kampung, dan alam lingkungan tetap saja buruk atau bahkan memburuk dalam lima tahun ini. Krisis.

Khawatir bahwa surat-surat kami dan buku ini tidak memenuhi harapan dalam upaya dan gerak bersama Ibu, mBah, Nak, Bapak, Bang, Uda menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik.

Dan....semangat.

Sungguh, semangat. Saat kami membayangkan para penulis surat, teman-teman yang telah cukup lama kami kenal, semangat mereka menular ke kami. Saat membayangkan Ibu, mBah, Nak, Bapak, Bang, Uda beserta seluruh warga dan pergulatan hidupnya, dalam perjuangan dan jatuh-bangunnya, dengan semangatnya, kami pun keturunan semangat. Terima kasih.

Ibu, mBah, Nak, Bapak, Bang, Uda,

Kenapa buku ini berisi kumpulan surat? Karena kami memang ingin melapor kepada Ibu, mBah, Nak, Bapak, Bang, Uda. Karena kami memang ingin berkomunikasi langsung dengan Ibu, mBah, Nak, Bapak, Bang, Uda. Karena buku ini memang untuk Ibu, mBah, Nak, Bapak, Bang, Uda beserta warga. Bukan untuk pihak lain. Bukan untuk pemerintah. Bukan untuk perusahaan-perusahaan. Bukan untuk aktivis-aktivis, peneliti-peneliti, politisi atau kalangan akademisi. Bukan pula untuk organisasi-organisasi nirlaba dan lembaga-lembaga dananya.

Melalui surat-surat ini kami ingin menyampaikan langsung kepada Ibu, mBah, Nak, Bapak, Bang, Uda rangkuman belajar kami selama lima tahun ini, dari pertemuan dan rapat-rapat, workshop dan seminar, pengkajian dan penyelidikan, analisis, dan lain-lain kegiatan lazimnya LSM. Kemudian tahun-tahun terakhir ini sampailah kami pada apa yang orang sebut 'pemodelan krisis'. Di situ kami sebisanya mendaftar dan menganalisis berbagai variabel dan parameter yang berkaitan dengan suatu krisis.

Krisis apa? Krisisnya adalah yang Ibu, mBah, Nak, Bapak, Bang, Uda alami dan hadapi sendiri secara langsung sehari-hari. Krisis martabat, krisis kepunahan komunitas, krisis air, krisis energi, krisis lahan, krisis pencemaran asap, krisis hukum dan kebijakan, dan lain-lain.

Variabel dan parameter di masing-masing krisis itu ada yang sama tapi banyak yang berbeda-beda tergantung jenis krisisnya, wilayah geografisnya, dan lain-lain faktor sosial-politik-ekonomi-sosial-budaya-lingkungan hidup (wah... seperti kembali ke istilah ipoleksosbud di jaman dulu ya...). Misalnya, yang berkaitan dengan krisis martabat di antaranya adalah alokasi raskin beras miskin, tingkat kemiskinan, penguasaan tanah, lahan pertanian pangan, produksi beras setempat, industri pengeruk sumber daya alam, dan seterusnya...dan seterusnya.

Kemudian kami cari datanya: angka-angka resmi dan informasi kredibel atas variabel-variabel itu. Kemudian kami berusaha menganalisis interaksi di antara berbagai variabel itu, yaitu hubungan sebab-akibat satu sama lainnya. Misalnya, apakah saat variabel lahan pertanian pangan berkurang, variabel tingkat kemiskinan meningkat?

Kemudian kami saling bertanya, kepada diri sendiri dan kepada siapa saja, siasat apa kiranya untuk menyelamatkan kehidupan kita semua?

Berikutnya kami juga mencoba menuangkan semua hal itu ke dalam gambar-gambar infografis dan ilustrasi. Siapa tahu bisa membantu memperjelas...

Ibu, mBah, Nak, Bapak, Bang, Uda,

Kami sekadar memotret krisis Sumatera ini. Ibu, mBah, Nak, Bapak, Bang, Uda lah korban, pelaku, pejuang, dan warga krisis kehidupan itu.

Kami dan organisasi-organisasi kami, dengan seluruh niat baik dan berbagai dukungan dari dalam dan luar negeri, selama ini telah berupaya, bukan hanya 5 tahun belakangan ini saja tetapi telah jauh lebih lama sebelumnya, melalui berbagai program dan kegiatan,

kampanye dan pendampingan, dan lain-lain dan lain-lain. Surat-surat di buku ini adalah potret-potret itu, robohnya surau bersama yang adalah Sumatera. Jelaslah bahwa surat-surat ini sebetulnya permohonan maaf kami, sekaligus terima kasih dan penghargaan atas pembelajaran selama ini.

Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan buku ini.

Semoga bermanfaat.

Juli 2015

**Para Penyunting**

\_\_\_\_\_ *ttd*

# SAMBUTAN

## dari Samdhana Institute

---

Salam hormat,

Dari lubuk hati yang paling dalam, Samdhana Institute berterima kasih kepada mitra-mitra di berbagai pelosok Sumatera atas pengungkapan yang sangat jujur dalam surat-surat ini.

Terima kasih ini adalah terima kasih yang istimewa, karena Sumatera adalah satu pilar penting dalam bangunan surau Indonesia. Ini bukan hanya tentang zona-zona ekologis, hutan-hutan, dan keanekaragaman hayatinya, tapi juga karena sumbangannya terhadap upaya terus menerus membangun keindonesiaan itu sendiri, yaitu bahasanya, ide-ide dan cita-cita masa depannya, identitasnya, elan dan etos kerjanya.

Di Sumatera, selama paling tidak lima tahun terakhir, Samdhana mendukung komunitas-komunitas lokal dan organisasi non-pemerintah yang menjadi garda terakhir dalam penyelamatan kawasan-kawasan hutan dan lingkungan. Melalui jaringan mitra Samdhana dalam Simpul Kampanye Sumatera, kami berupaya membantu penyelamatan hutan dan lingkungan serta menghubungkan para pelaku di tingkat lokal ini dengan upaya-upaya perubahan kebijakan di tingkat lokal dan nasional.

Di sepanjang masa inilah kami menemukan kenyataan betapa komunitas-komunitas lokal dan organisasi non-pemerintah terperangkap dalam lapisan-lapisan realitas sistemik, yaitu politik-ekonomi perizinan, bencana alam-bencana alam, pembakaran hutan dan lahan yang tak terkendalikan, lenyapnya keanekaragaman hayati yang adalah sumber pangan dan obat-obatan dari hutan, duka lara akibat ketidakpastian dan penggusuran-penggusuran, kemiskinan.

Rupanya tidak berubah sejak zaman kolonial dahulu sampai sekarang, yaitu dalam hal pengerukan dan eksploitasi alam. Pengerukan dan eksploitasi itu ternyata tidak kemudian berhenti dengan proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Periode setelah kemerdekaan itu adalah periode nasionalisasi pengerukan dan eksploitasi alam. Kemudian, saat era Orde Baru rakyat Indonesia berada dalam buaian janji-janji pembangunan manusia seutuhnya. Janji-janji yang tak pernah terbukti. Kini rezim pemerintahan baru Jokowi terus-terusan dihantui dan memperoleh tantangan besar gara-gara berbagai obral upah politik dan konsesi-konsesi oleh presiden-presiden Indonesia terdahulu berkaitan dengan hutan dan sumber daya alam.

Nampak jelas juga bahwa tak lama lagi, atau bahkan sudah terjadi, rintihan dan tangisan ini bukan hanya terdengar dari sebagian warga, yaitu mereka yang tinggal di dalam dan sekitar kekayaan alam dan yang sejak zaman kolonial sampai sekarang dimiskinkan melalui industri pengerukan dan eksploitasi alam. Ini utamanya adalah Masyarakat Adat. Tak lama lagi atau bahkan sudah mulai, tanpa tindakan segera dan berarti, kita semua akan terdampak oleh lebih banyak lagi pembakaran hutan dan lahan dan lebih banyak lagi asap, kita semua akan kesulitan mendapatkan air bersih, kita semua akan terancam oleh makanan-makanan teracun tambang, penyakit-penyakit yang datang bersama kerusakan daya pulih alam, oleh lebih banyak lagi bencana alam.

Bagaimana caranya menyentuh hati saudara-saudara kita sesama warga negara Indonesia, tak peduli apakah yang ada di pemerintahan, yang di kalangan swasta, partai politik, apapun agama dan sukunya?

Bagaimana caranya menemukan kesadaran bahwa tidak ada dari kita yang hidup sendiri, bahwa kita saling membutuhkan sebagai satu komunitas untuk memperbaharui hutan-hutan kita, alam lingkungan kita?

Bagaimana caranya dan apa tindakan segera dan berarti untuk membalikkan krisis ini?

Kami terus-terusan didera pertanyaan-pertanyaan itu, apalagi membaca surat-surat mitra Samdhana di Sumatera ini. Surat-surat yang bukan sekedar ungkapan dari hati, tapi sesungguhnya juga adalah narasi kepahitan yang nyata.

Tapi ternyata di balik mendung yang gelap ini kami membaca tanda-tanda keuletan dan harapan. Penanaman kembali hutan-hutan, pemetaan dan negosiasi tenurial, para perempuan yang menggerakkan pengolahan hasil hutan bukan kayu, perlawanan terhadap laju konversi hutan, jaringan pemantauan hutan, desakan akuntabilitas dan anti korupsi, dan lain-lain rupa aksi warga sipil, terus bermunculan. Pemerintah daerah-pemerintah daerah mulai harus mau mendengarkan. Model-model interaksi antara masyarakat lokal dengan hutan dan sumber daya alam terus hidup dan berkembang.

Dalam doa agar telinga-telinga tidak tuli mendengar surat-surat ini.

Bogor, saat kemerdekaan Indonesia berusia 70 tahun, 17 Agustus 2015

**Nonette Royo**

Direktur Eksekutif Samdhana Institute

\_\_\_\_\_ *ttd*



# Memahami Krisis dan Kebangkrutan Kehidupan di Sumatera

---

## –Sebuah PENDAHULUAN–

---

### *Arak-Arakan Derita Rakyat Dari Dahulu Sampai Kini*

Indikator ekonomi makro menyesatkan pihak yang bertanggung jawab menjamin keselamatan dan daya-pulih warga di Indonesia. Angka pertumbuhan ekonomi menjadi berhala bagi siapa pun yang menjadi pengurus daerah dan negara. Biaya sosial dan ekologis dari mesin-mesin ekonomi yang berorientasi pertumbuhan diperlakukan sekadar sebagai eksternalitas bagi agen-agen partikelir. Oleh pengurus negara dan daerah biaya-biaya yang bermunculan di sepanjang rantai proses pengerukan tanah dan kekayaan alam serta penghisapan keringat buruh-buruh rendahan tersebut direduksi sedemikian rupa menjadi sekadar ampas atau dampak yang diukur dan diperhitungkan di ujung kisah.

Perangkat penanganan dan pengendalian dampak, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang diterapkan di ujung rantai sistem memang tidak dirancang untuk mengupas daya-rusak di sepanjang jalur-jalur yang saling-silang dari sistem produksi tersebut. AMDAL hanya syarat administratif yang melekat pada perizinan prinsip satuan-satuan kerja partikelir, yang disajikan sebagai keadaan yang "penting", "cukup penting", atau "tidak penting," dengan tindak penanganan ala kadarnya.

Daya-rusak dari rerantai proses pengerukan tanah dan kekayaan alam serta penghisapan tenaga dan keringat buruh tak-trampil tampil sebagai potret perendahan martabat manusia dan alam. Manusia dan alam dipaksa bertekuk lutut di hadapan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang agresif. Rakus lahan, rakus air, rakus buruh murah tak-trampil, rakus bahan bakar fosil, penimbul sengketa atau konflik, serta, pada banyak kejadian, kerap kali pelibat aparatus kekerasan untuk mengendalikan gejala-gejala kemarahan buruh dan warga, adalah ciri-ciri umum mesin pertumbuhan ekonomi itu.

Pelecehan martabat manusia dan alam dituturkan di kisah-kisah memilukan di sekujur pulau-pulau Nusantara, seakan sebuah arak-arakan penistaan rakyat yang jati dirinya terkikis akibat hilangnya ruang hidup. Kisah-kisah itu muncul di mana-mana, tak berkesudahan; termasuk di Sumatera, pulau besar yang telah terpapar mesin-mesin ekonomi pertumbuhan sejak masa pendudukan badan usaha Hindia Timur Bersatu atau Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada pertengahan abad ke-16 hingga akhir abad ke-17.

Sumatera menjadi tempat di mana perwakilan Kerajaan Belanda mengorganisir pengerukan bahan galian mineral dan batubara secara sistematis. Kuku kekuasaan Belanda menancap tajam setelah perjanjian Inggris-Belanda (Traktat London) pada tahun 1824 dan 1871 yang mencabut klaim Inggris atas Sumatera dan dengan demikian mengakhiri perang kedua negara itu. Melalui eksploitasi ekonomi dan ketrampilan administrasi, Belanda perlahan membuka wilayah pedalaman Sumatera dan mengukuhkan kekuasaan mereka sepanjang abad ke-19. Perlawanan paling sengit terjadi di wilayah utara Aceh yang baru takluk pada awal abad ke-20 setelah pertempuran selama hampir tiga dekade.

Pusat perhatian yang besar dari kerajaan-kerajaan Eropa, baik Portugis, Belanda, dan Inggris pada Pulau Sumatera tidak dapat dipisahkan dari karakter geologik dan biogeografik pulau ini. Sumatera kaya dengan sumber-sumber mineral dan energi fosil. Di Sumatera juga terentang hutan hujan tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Geologi Pulau Sumatera yang masih aktif tidak dapat dipisahkan dari posisi

Kepulauan Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng-lempeng tektonik; posisi yang mengakibatkan negeri ini berada di atas jalur gempa; yaitu patahan-patahan penyebab gempa.

Di daratan Pulau Sumatera terdapat zona patahan sepanjang 1.900 kilometer dari Banda Aceh sampai Teluk Semangko di selatan Lampung yang kemudian dikenal sebagai Patahan Semangka. Zona patahan ini sudah mengukir banyak catatan kejadian gempa bumi di wilayah-wilayah yang dilaluinya, dengan kerugian harta dan nyawa yang tidak sedikit.

Pulau Sumatera terletak pada zona subduksi (*subduction zone*), yaitu zona pertemuan antara dua lempeng tektonik berupa penunjaman lempeng India-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng-lempeng ini akan menyebabkan gempa yang tak jarang berkekuatan besar. Selain itu, Patahan Besar Sumatra (*Sumatra Great Fault*) yang masih aktif akan selalu mengancam kawasan itu apabila terjadi pergeseran di zona patahan tersebut. Zona subduksi di sepanjang Pulau Sumatra terdiri dari beberapa segmen, seperti segmen Aceh, segmen Simeulue-Nias, segmen Mentawai dan segmen Bengkulu.

Biogeografi Pulau Sumatera sangat dipengaruhi keberadaan rangkaian gunung-gunung berapi aktif, utamanya di wilayah Provinsi Sumatera Barat, seperti gunung-gunung Marapi, Tandikat, dan Talang. Sementara itu, Provinsi Sumatera Utara juga memiliki Gunung Sinabung yang selama ini dianggap sebagai gunung berapi “tidur” atau tidak aktif tapi justru tanpa diduga meletus, menimbulkan kerugian non-material dan material luar biasa bagi warga di sekitar kawasan tersebut.

Selain menjadikan tanah Pulau Sumatera subur bagi kegiatan pertanian, keberadaan rangkaian gunung api memberi warna khas pada biogeografi pulau yang ditandai dengan persebaran hutan hujan tropis, hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah, hutan rawa gambut, dan hutan mangrove, berikut keanekaragaman hayati yang berasosiasi dengan masing-masing ekosistem tersebut.

Seperti halnya biogeografinya, karakter geologik Pulau Sumatera juga dipandang sebagai anugerah karena menjadikan pulau ini sebagai

wilayah cadangan atau deposit kekayaan mineral (emas, perak, bijih besi, timah, dan sebagainya), serta sumber-sumber energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara.

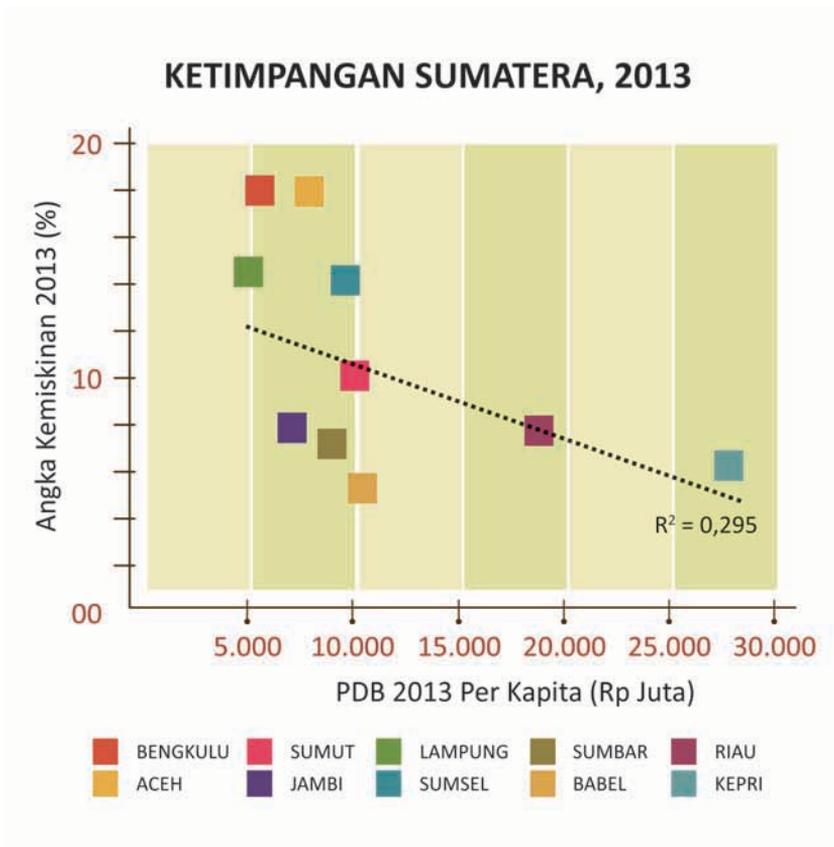
Hal-hal inilah yang menjadikan Pulau Sumatera laboratorium rekayasa manajerial perkebunan dan pertambangan yang canggih pada masa kolonial Belanda, yang ironisnya, terus dilanjutkan secara utuh hingga sekarang oleh penyelenggara Negara Republik Indonesia. Inilah sistem produksi yang untuk ukuran saat ini jelas-jelas sudah sangat tidak efisien, memiliki daya-rusak luar biasa, dan telah menimbulkan penyusutan daya-pulih dan produktivitas sosial dan alam. Inilah yang tampil sebagai arak-arakan krisis tak berkesudahan yang dialami warga di seujur Pulau Sumatera.

Kisah-kisah inilah yang dituturkan secara lirih oleh para penulis yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Sumatera. T tutur lirih-t tutur lirih itu merupakan hikmah dan pembelajaran dari kerja-kerja menyiarkan dan menyebarkan tuntutan kepada pengurus negara dan daerah dari warga pulau yang tergerus mesin-mesin pendongkrak pertumbuhan ekonomi, baik berupa sektor usaha perkayuan dan hutan, perikanan, pertanian dan perkebunan, tambang mineral, dan energi fosil.

Kebijakan Rencana Program (KRP) yang ada dalam Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera menyebutkan lima dari sebelas tujuan yang ingin dicapai, yaitu: (1) pusat pengembangan ekonomi perkebunan, perikanan, serta pertambangan yang berkelanjutan; (2) swasembada pangan dan lumbung pangan nasional; (3) kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan; (4) pusat industri yang berdaya saing; serta (5) pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/MICE*).

Semua kebijakan itu bermuara pada target angka laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita. Struktur ekonomi menurut lapangan usaha

dan penggunaan, perkembangan investasi, dan perkembangan produksi sektor pertanian dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi Sumatera. Nyatalah betapa indikator-indikator tersebut tidak ada urusannya dengan jaminan Negara atas keselamatan bagi warga Pulau Sumatera.



Struktur ekonomi Sumatera pada tahun 2012 ditopang oleh tiga sektor utama yang menyumbang 57% dari keseluruhan nilai ekonomi, sisanya dari enam sektor sekunder. Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan menyumbang 21,32%, disusul industri pengelolaan tambang migas dan non-migas sebesar 19,48%, dan 16,13% dari sektor pertambangan dan penggalian.

Sementara itu di sisi anggaran pemerintah *aggregate* provinsi, kabupaten, dan kota, pendapatan Dana Bagi Hasil yang berasal dari kekayaan alam mencapai Rp 19 triliun sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 27,2 triliun pada tahun anggaran 2013.

Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Sumatera pada periode itu adalah senilai 3,7 miliar Dollar AS dan Penanaman Modal Dalam Negeri senilai Rp 14,2 triliun.

Semua angka perekonomian itu belum mampu melepaskan Sumatera dari kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonomi Sumatera selalu berada di atas rata-rata nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tampaknya pertumbuhan ekonomi itu tidak ada urusannya dengan tingkat kemiskinan. Sebelumnya (2008-2010) angka kemiskinan Sumatera selalu berada di bawah rata-rata nasional, walaupun sedikit selisihnya. Setelahnya, angka kemiskinan Sumatera pada periode 2011-2013 justru selalu berada di atas rata-rata kemiskinan nasional. Selain itu kesenjangan tingkat kemiskinan antar provinsi belakangan terasa semakin besar. Kesenjangan tersebut dapat terkonfirmasi pada empat dari sepuluh provinsi di Sumatera yang masih jauh dari rata-rata angka kemiskinan nasional, seperti Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung.

Jelas pula lah bahwa pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Pulau Sumatera didorong hanya untuk melayani industri demi mencapai pertumbuhan ekonomi. Perluasan infrastruktur pelayan industrial memicu percepatan pengerukan kekayaan alam secara besar-besaran dan bahkan tidak dapat dikendalikan. Kisah-kisah tentang penyerobotan tanah (*land grabbing*) di sekujur Pulau Sumatera adalah potret yang semakin lama semakin dianggap sebagai sebuah kelaziman saja, sekedar bentuk pengorbanan warga demi tujuan pembangunan.

Apa yang akan terjadi apabila Presiden Joko Widodo sungguh-sungguh meraih target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%? Terlepas dari judul-judul visi dan misi kepemimpinannya yang bersemangat patriotik, seperti kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, serta slogan heroik "meninggikan martabat rakyat" dan "membangun dari pinggiran",

sebaiknya kita mesti bersiap diri untuk mengulangi arak-arakan derita rakyat di berbagai daerah, demi angka 7% tersebut.

Rezim Jokowi-JK tidak memiliki keberanian melakukan terobosan untuk menelikung mesin ekonomi pertumbuhan yang agresif, bahkan justru menggunakannya sebagai lokomotif penggerak satuan-satuan produksi yang memiliki daya-rusak tinggi.

Dalam kurun lima tahun ke depan tingkat kebutuhan lahan akan meningkat. Kebutuhan itu akan dipenuhi lewat pembukaan ekosistem hutan serta pengurukan wilayah pesisir, yang akan diikuti oleh perluasan jejaring infrastruktur penyalur bahan-bahan alam keluar dari situs keruknya. Beriringan kemudian adalah melesatnya kebutuhan buruh kasar tak-trampil. Mesin penggenjot pertumbuhan ekonomi 7% tersebut juga sangat membutuhkan tersedianya energi listrik dan bahan bakar. Dengan hitung-hitungan sederhana, rezim Jokowi-JK akan memilih energi listrik dan bahan bakar yang murah, dan tak lain adalah batu bara yang selalu menjadi pilihan termurah guna meningkatkan ambang-pendapatan (*profit margin*) sebesar-besarnya.

Dengan segala hormat pada niat baik Presiden Joko Widodo mengangkat martabat rakyat kebanyakan, jarak emosi kedudukannya sebagai kepala negara dan pemimpin bangsa terhadap potret utuh derita rakyat sangatlah jauh, yang bahkan tidak akan pernah bisa dijahit lewat perjalanan-perjalanan blusukan ke pelosok-pelosok daerah, sepanjang dia dikepung kepentingan pihak-pihak yang memperlakukan tanah, kekayaan alam, dan rakyat sebagai asupan mesin produksi ekonomi pertumbuhan, yang disebut sebagai sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Badan Ekonomi Kreatif yang digagas Presiden Joko Widodo semestinya tidak direduksi hanya mengurus industri pengrajin pertunjukan seni peran, tari dan rupa, yang didukung kecanggihan media-media digital. Ekonomi kreatif semestinya menjadi logika dasar dalam menerjemahkan niat baik Presiden Joko Widodo untuk memberangus mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang agresif, rakus lahan, rakus air, rakus buruh murah tak-trampil, rakus bahan bakar fosil, penimbul

konflik, pelibat aparatus kekerasan. Inilah yang justru akan melanggengkan kemerosotan martabat rakyat Indonesia.

### ***Krisis di Sekujur Pulau Sumatera***

Dari ujung selatan Pulau Sumatera, di wilayah Provinsi Lampung, hingga ke ujung utara, di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, arak-arakan derita rakyat yang tak-berkesudahan terus menerus digaungkan oleh organisasi-organisasi aktivis lingkungan hidup, oleh para Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan oleh organisasi-organisasi lain, lewat beragam jalur dan berbagai siasat kampanye.

Kerja-kerja tak kenal lelah yang telah dilakukan lebih dari dua dekade ini terus menerus membentur tembok tebal kepongahan kuasa pengurus daerah dan negara yang lebih memilih melayani kuasa-kuasa kapital keuangan. Rakyat hanya berguna pada saat menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bupati atau gubernur, sebagai sumber *suara (vote)*, dan tidak ada urusannya sama sekali dengan suara rakyat sebagai *suatu aspirasi dan harapan*. Rakyat diperlakukan sebagai sebuah stok demografik yang menjadi landasan oligarki kemampuan terpasang penyediaan buruh murah tak-trampil, dan pada saat yang sama dipolakan menjadi konsumen dari rerantai hulu produksi barang dan jasa industrial.

Di **Lampung**, kita disajikan tutur lirih tentang masyarakat desa di Mesuji, Kelompok Tani di sebuah desa beserta warga di sekitar Gunung Rajabasa, Lampung Selatan. Yang dituturkan adalah betapa pembangunan ekonomi, industrialisasi, dan investasi rakus lahan telah mengancam keselamatan warga dan alam. Kemudian Bapak Sebut Saja A di Mesuji yang saat ini menjadi korban kriminalisasi karena berupaya mempertahankan tanahnya dari perampasan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selain itu ada Bapak Wayan dan kelompok taninya yang juga kehilangan tanah sumber penghidupan karena pemerintah memberikan konsesi atas tanah itu kepada sebuah

perusahaan untuk membangun hutan tanaman industri. Di sekitar Gunung Rajabasa di Lampung Selatan, warga didorong ke dalam perangkap berbagai konflik horisontal dan vertikal demi melancarkan proyek raksasa pembangkitan listrik geothermal.

Di ketiga tutur lirin itu, warga terancam kehilangan sumber penghidupan, keselamatan fisik, legal, dan sosialnya, sumber airnya, juga jaminan pelayanan dasar yang seharusnya adalah tanggung jawab negara. Semua ini di tengah gebyar angka-angka dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, PAD, dan percepatan penyediaan infrastruktur industri.

Tutur lirin-tutur lirin ini adalah tentang warga yang lelah, tapi bagaimanapun harus bertahan, berjuang, mengupayakan keselamatan. Apapun itu demi menyelamatkan diri: memperjuangkan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Pola Kemitraan, termasuk juga lari sembunyi dari kejaran preman perusahaan dan polisi, melakukan gugatan hukum, demonstrasi di kementerian dan kantor-kantor pemerintah.

Di **Bengkulu**, kita disajikan tutur lirin warga yang keras mempertanyakan adakah harapan dari perkebunan kelapa sawit. Tutur lirin yang lembut menceritakan tanah-tanah yang hilang dan tanah-tanah yang harus dipertahankan, dan tutur lirin yang rendah hati memaparkan sejarah perjuangan warga di kampung-kampung melawan perusahaan pertambangan. Ada Ibu Yus yang menggugat perkebunan kelapa sawit tertua di Bengkulu, PTPN VII, karena perusahaan itu memaksanya menyerahkan tanah terakhir yang dimilikinya, yang hanya tersisa 1,5 hektare setelah perampasan oleh negara-swasta, setelah pengusuran kuburan suaminya, setelah keenam anaknya terpaksa berhenti sekolah. Ada kisah mBah Kardi beserta warga di Bengkulu dengan nasib tragisnya harus tersingkir berulang-ulang. Berulang-ulang seperti kaset rusak. Dahulu mBah Kardi dipaksa menyerahkan tanah dan kampungnya di Jawa untuk pembangunan waduk Gajah Mungkur. Kini Mbah Kardi dipaksa meninggalkan tanah dan kampungnya karena pertambangan batubara.

Kemudian ada tutur liris dari Seluma tentang dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari pertambangan pasir besi di kawasan pesisir. Juga tentang skenario-skenario dan praktik-praktik koruptif dan kekerasan yang selalu dipakai perusahaan dan negara untuk menyingkirkan warga dari tanah-tanah ruang hidupnya.

Di **Riau**, kita disajikan tutur liris tentang krisis keselamatan warga dan alam yang sungguh luar biasa, yaitu kejadian setiap tahun, bahkan akhir-akhir ini lebih dari sekali di tahun yang sama, pembakaran hutan dan lahan. Saat menghirup asap yang membahayakan jiwa dan generasi yang hilang dianggap biasa-biasa saja, saat itulah sesungguhnya krisis telah mencapai puncaknya. Bapak dan Ibu Rasyid beserta anak-anak mereka, Atiyya dan Zakiy, adalah satu dari ratusan ribu keluarga di Provinsi Riau yang saat asap melanda tidak bisa lari ke mana-mana. Tidak seperti segelintir korporasi dan punggawanya yang cukup kuasa dan sumber daya untuk menghindar, baik dari asap maupun dari pertanggungjawaban hukum.

Di **Sumatera Barat**, kita disajikan tutur liris yang adalah serangkaian potret krisis dan upaya warga menyelamatkan kehidupannya. Penulis beserta Ibu Syamsirmarnis di Batang Kapas, Pesisir Selatan, Ibu Yeni di Palembayan Agam, Bapak Raport di Mentawai, Iwan di Pasaman Barat, dan Uda Iswandi di Koto Panjang, beserta warga di nagari-nagari berkisah tentang konflik, pertentangan, permusuhan di antara warga sendiri, lahan-lahan pertanian yang lenyap, kedaulatan pangan yang hilang sehingga harus mengkonsumsi beras miskin, akses transportasi-komunikasi dan pelayanan dasar yang tiada, kerentanan bencana gempa bumi dan tsunami, proses hukum yang tidak memihak warga korban pembangunan dam, dan seterusnya dan seterusnya. Warga dipaksa menyerahkan sumber daya alamnya, didorong menjadi buruh industri, sekaligus pasar produk industri, sambil kethar-kethir setiap saat karena wilayah Sumatera Barat adalah wilayah rentan bencana.

Di ujung seluruh tutur liris dari Sumatera Barat ini nyatalah betapa baik martabat warga yang berbudaya Minangkabau, kedaulatannya atas pola konsumsi-produksi, dan kemandiriannya dalam hal pangan dan energi,

luluh lantak oleh agresivitas industri, pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit.

Di **Aceh**, kita disajikan tutur lirin tentang warga di Kuala Seumayam, Nagan Raya, dan Bapak Adi Samrida di Trouman Raya beserta ribuan warga di Aceh Selatan. Mereka semua kehilangan dusunnya beserta lahan pertanian, kuburan, dan seluruh sejarah penghidupannya. Warga Kuala Seumayam harus pindah dari dusun aslinya itu karena konflik dengan satwa liar, harimau. Kemudian mereka kembali direlokasi ke tempat baru, kali ini karena konflik bersenjata. Kemudian terjadi tsunami dan mereka kehilangan sedikit lahan pertanian yang masih tersisa di pinggir pantai. Dulu mereka mengelola sekitar 100 hektare, sekarang tinggal 1,5 hektare. Ironisnya, pada saat warga dari zaman ke zaman kehilangan tanah, perusahaan-perusahaan (perkebunan kelapa sawit) dari hari ke hari menguasai lebih banyak dan lebih banyak lagi lahan. Total luas perkebunan kelapa sawit di Aceh saat ini sudah mencapai hampir 300 ribu hektare, termasuk yang dikuasai oleh PT Kalista Alam hasil rampokannya dari lahan warga Kuala Seumayam.

Sementara itu warga Troumon Raya berada dalam ancaman pemaksaan untuk menyerahkan lahan sumber penghidupannya karena pemerintah “menunjuk” lahan itu menjadi kawasan hutan, menggantikan kawasan hutan di Sumatera Utara yang diberikan kepada sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Padahal jelas-jelas lahan masyarakat itu adalah lahan sumber penghidupan yang telah mereka kelola sejak zaman Kerajaan Troumon dahulu kala. Hanya dibutuhkan beberapa lembar kertas dan tanda tangan-tanda tangan pejabat pemerintah dan partikelir, berupa rekomendasi ini itu dan keputusan-keputusan ini itu, untuk mengambil lahan masyarakat dan menghilangkan sumber penghidupan dan akar sejarah sosial budaya tersebut.

Seperti begitu banyak warga lain di seluruh provinsi daratan Pulau Sumatera, warga Kuala Seumayam dan warga Troumon Raya ini sedang menuju puncak krisis kehidupan, ancaman keselamatan, dan kehancuran sosial dan ekologi.

Di **Sumatera Utara**, kita disajikan tutur lirih tentang Tombak Haminjon. Kisah ini adalah tentang hancurnya batas-batas tanah adat, hilangnya rotan sebagai penanda dan salah satu sumber kesejahteraan, dan tebang habisnya kemenyan. Penanaman tumbuhan baru eukaliptus adalah upaya-upaya menghilangkan jejak ingatan dan penanda kepemilikan tombak haminjon oleh masyarakat adat di Pandumaan-Sipituhuta, Sumatera Utara itu.

### ***Potret Horor Empat Krisis***

Empat infografis yang disajikan untuk kita berikut ini ingin menyampaikan pesan-pesan sebagai berikut:

#### **Persebaran Cemaran Asap:**

- Pembakaran lahan dan hutan di Sumatera, terutama di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Bengkulu sudah menjadi bagian dari kalender derita masyarakat. Kalender derita masyarakat itu konsisten dengan kalender kegiatan perkebunan kelapa sawit dan HTI.
- Artinya, pembakaran lahan dan hutan serta pencemaran asap bukan sebuah bencana yang tidak bisa diramalkan.
- Semua pelaku yang terlibat, termasuk para kuasa modal keuangan di belakangnya, mahfum betul yang mereka lakukan sebesar-besarnya untuk laba usaha, dan mereka pun sadar telah membebankan eksternalitas usaha mereka kepada publik.
- Bahkan ketika pembakaran lahan dan hutan terjadi pada 1997 yang juga dibarengi fenomena El Nino, sebaran cemaran asap yang mencapai negara-negara tetangga serta menimbulkan tekanan diplomasi pada masa Suharto itu, tidak pernah menjadi pelajaran

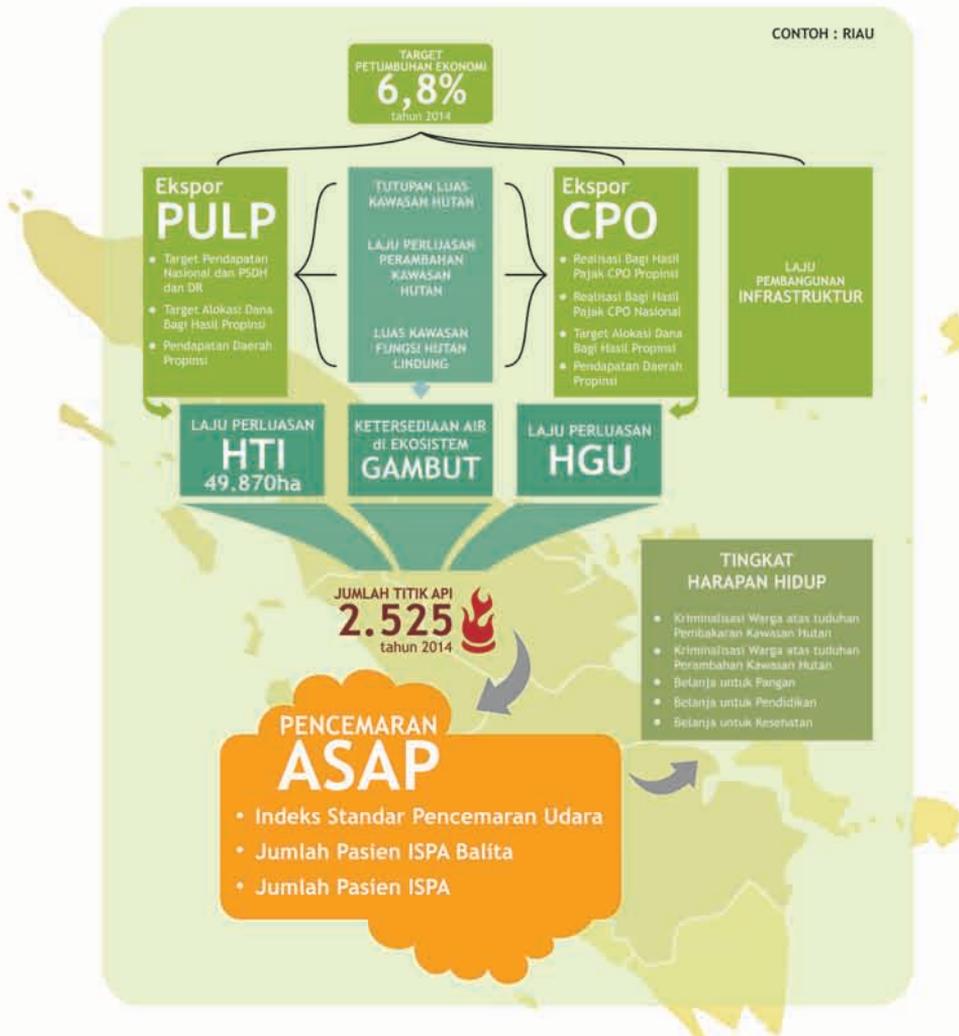
tidak saja bagi para pelaku usaha beserta seluruh rerantainya, tetapi juga tidak bagi para pengurus Negara dan pengurus daerah.

- Pasca-Reformasi tindakan pembakaran lahan dan hutan berikutan daya rusak serta dampaknya menjadi sesuatu yang boleh disebutkan sebagai keadaan yang "bisa diterima". Tidak ada kemarahan publik (mungkin hanya segelintir aktivis lingkungan yang rutin berdemonstrasi mencoba mengingatkan dan menggugah publik).
- Sehingga ketika sebaran cemaran asap menyelimuti sebagian besar wilayah provinsi di Pulau Sumatera tindakan Negara tidak lebih dan tidak kurang hanya bersifat mengobati gejala, dengan membuat hujan buatan, mengimbau khalayak untuk memakai masker pelindung, menangkapi pelaku pembakaran yang tertangkap tangan memegang korek api di lapangan serta tindakan lain, tanpa pusing dengan sumber penyakit yang sesungguhnya sudah dipahami sebagian besar kalangan: tindakan menangguk laba sebesar-besarnya oleh kalangan usaha berbasis lahan dan hutan.
- Sulit berharap bahwa pengurus Negara dan daerah peduli dengan masa depan warga di sebagian besar wilayah provinsi Pulau Sumatera akibat daya rusak cemaran asap terhadap pertumbuhan anak-anak, terutama perkembangan otak dan daya-pikir mereka.



## SEBARAN GEOGRAFIS CEMARAN ASAP

CONTOH : RIAU



### Kawasan Terdampak ASAP

- NAD
- SUMATERA UTARA
- SUMATERA BARAT
- RIAU
- JAMBI
- SUMATERA SELATAN



## Warga Biasa Rawan Menjadi Korban Pembangunan dan Perampasan Lahan:

- Makna pembangunan semakin terang benderang sekarang, bahwa dia pada hakekatnya memang tidak untuk menimbulkan manfaat langsung bagi warga secara luas.
- Pembangunan merupakan rute memutar yang menysar tolok ukur-tolok ukur ekonomi makro, seperti Pendapatan Domestik Bruto (PDB), pajak, dan angka-angka lain yang tidak ada urusannya dengan status keselamatan warga, daya-pulih produksi dan konsumsi warga, serta keberlanjutan dan daya-pulih fungsi-fungsi alam.
- Manfaat pembangunan mencapai warga melalui tetesan manfaat antara lain berupa lapangan pekerjaan, yang memiliki persyaratan cukup tinggi apabila warga tidak ingin menjadi buruh kasar murah dan tak-trampil. Manfaat lain adalah sarana pendidikan dan persekolahan, kesehatan, serta sarana publik lainnya.
- Dapat dikatakan bahwa pengurus Negara dan daerah, termasuk para politikus serta akademisi penyokong pembangunan seperti ini, melihat warga masyarakat tidak lebih dari sekedar kelompok penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tidak punya hak suara, karena tidak memiliki sumbangan berarti terhadap kinerja ekonomi makro nasional dan daerah, kecuali ketika musim Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tiba.
- Tidak perlu heran bagaimana pengurus Negara dan daerah memperlakukan secara istimewa para pelaku usaha dan penguasa modal keuangan karena mereka dianggap sangat berjasa menggerakkan angka-angka ekonomi makro Negara.

- Yang membuat kita semua miris, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi mencermati pola perampasan lahan yang masif di Sumatera, warga biasa memang harus selalu bersiap diri untuk kehilangan akses dan haknya atas tanah, atas nama *tujuan mulia pembangunan*, yakni mendongkrak angka-angka kinerja ekonomi makro nasional dan daerah.



## PERAMPASAN TANAH



### LUAS KONSESI



833.926,01	HPH
3.885.901,49	HTI
2.840.321,85	KEBUN
5.523.523,13	TAMBANG
1.495.295,72	TUMPANG TINDIH



### TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2014

ACEH	6,7%
SUMATERA UTARA	6,15%
SUMATERA BARAT	6,42%
RIAU	6,8%
KEPULAUAN RIAU	6%
JAMBI	7%
BENGKULU	6%
SUMATERA SELATAN	6%
BANGKA BELITUNG	6,6%
LAMPUNG	6%



## Sumatera Rawan Bencana:

- Kata 'bencana' mungkin sudah menjadi pembenaran (justifikasi) bagi keberlanjutan derita masyarakat di sekujur pulau akibat pembangunan yang sama sekali tidak mengikutkan karakter ekologis dan geologis serta oseanografik Pulau Sumatera dan perairan sekitarnya ke dalam kalkulasi perencanaan pembangunan.
- Tidak perlu kita terkejut ketika daya-rusak bencana alam telah diperparah oleh buruknya pembangunan sarana dan prasarana yang menyebabkan derajat kerusakan menjadi lebih parah, seperti pada gempa dan tsunami pada Desember 2004 yang memapar Aceh dan sebagian Sumatera Utara. Kemudian berlanjut dengan gempa Padang pada tahun 2007, 2009, dan 2010.
- Apakah kejadian-kejadian tersebut kemudian menjadi pertimbangan perencanaan? Bisa jadi memang dipertimbangkan, bahkan sudah dilaksanakan proyek-proyek pengendalian bencana, seperti yang dilakukan di Aceh dan Sumatera Barat, seperti pembuatan jalur evakuasi, dan sebagainya.
- Namun kalkulasi yang sama justru tidak terjadi pada perluasan investasi berbasis lahan, seperti pertambangan, perkebunan dan perhutanan, di mana kegiatan pembangunan infrastruktur pendukungnya ditempatkan tanpa memperhitungkan tingkat kerawanan bencana.
- Lebih parah lagi, seperti telah diungkapkan sebelumnya, ketika keadaan katastropik yang secara terang benderang disebabkan oleh ulah manusia pun ikut disebutkan sebagai keadaan bencana, seperti bencana asap, serta longsor dan banjir.
- Termasuk dalam hal ini adalah rencana membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi, di mana timbul kekhawatiran akan terjadi krisis air skala raksasa akibat tersedotnya air untuk

keperluan pendinginan turbin dan reaktor dari sumber-sumber air strategis di ekosistem Rajabasa.

- Jelaslah bahwa target-target ekonomi, PDB dan pertumbuhan ekonomi, lainnya mahkota dan genteng atap bangunan Pulau Sumatera. Pulau Sumatera nya sendiri adalah bangunan utama yang dalam dirinya memang rawan bencana karena patahan lempeng dan gunung berapi. Sementara itu pondasi, yang menopang bangunan Pulau Sumatera agar tidak roboh, terus menerus tergerus dan semakin meningkatkan kerawanan bencana, yaitu: kualitas hutan dan lingkungan hidup, keadilan akses tanah dan ruang hidup, keutuhan sosial-budaya, ketersediaan pelayanan dasar, dan kecukupan pangan, air dan energi.
- Risiko keselamatan sosial dan ekologi semestinya menjadi pertimbangan terpenting bagi seluruh provinsi di Pulau Sumatera.



## SUMATERA RAWAN BENCANA



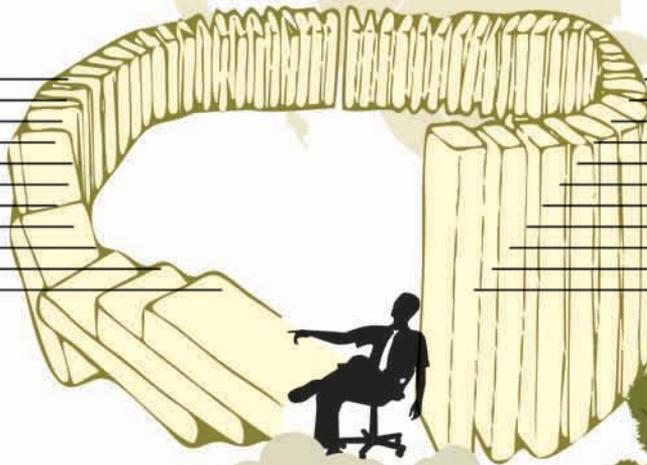
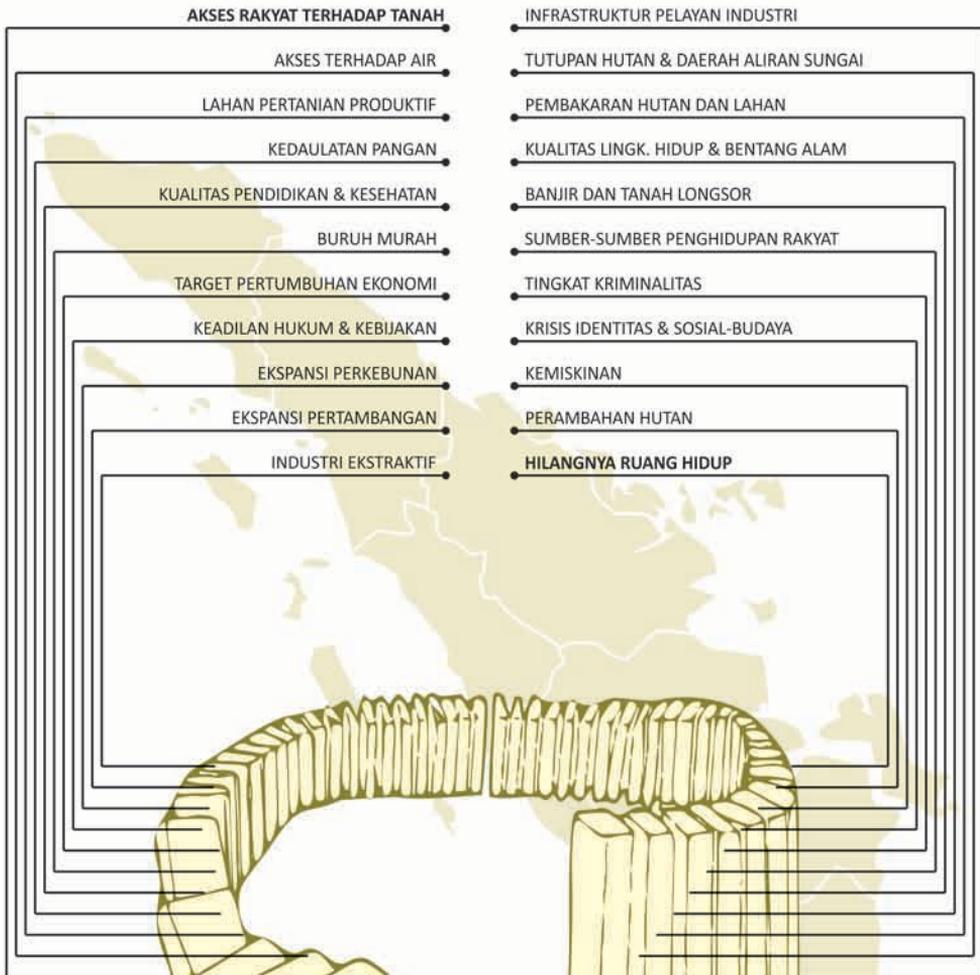
## Efek Domino yang Merobohkan Sumatera:

- Kisah klasik horor pertambangan di Pulau Sumatera sebagaimana dapat ditengok di pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung, pertambangan minyak dan gas di Sumatera Selatan, serta pertambangan batubara skala kolosal di Sawahlunto, Sumatera Barat, dan begitu ekstensifnya sebaran Izin Usaha pertambangan (IUP) di seluruh Sumatera adalah tapak sosial dan ekologis yang telah runtuh seperti kartu-kartu dalam rangkaian efek domino yang merobohkan Sumatera.
- Pertambangan bersama dengan perkebunan kelapa sawit, pembalakan hutan, dan hutan tanaman industrial memperoleh perlakuan sangat istimewa karena sumbangannya yang dianggap penting kepada angka-angka target pertumbuhan ekonomi serta Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Bagian dari keistimewaan itu adalah berbagai proyek infrastruktur energi, transportasi, dan komunikasi sebagai pelayan kepentingan industri.
- Peluang pekerjaan, seperti yang digembar-gemborkan pengurus Negara dan daerah, yang diciptakan industri pengerukan alam ternyata menyerap hanya segelintir warga. Industri ini membutuhkan tenaga-tenaga buruh yang trampil dan berpengalaman, yang justru dikerahkan dari daerah lain.
- Inilah paradoks yang menyedihkan, yaitu ketika warga dininabobokkan dan "dijinakkan" oleh pengurus daerah melalui berbagai insentif maupun kesengajaan pembiaran yang meruyakkan penambangan sisa-sisa batubara di sungai, sumur minyak tua, pembalakan liar, perambahan dan pengalihfungsian hutan, dengan risiko keselamatan yang sangat besar terhadap keselamatan mereka.

- Rentetan bencana Sumatera adalah pertanda efek domino tak berujung dengan kartu-kartu yang berjatuhan, yaitu akses rakyat terhadap tanah, akses terhadap air, lahan pertanian produktif, kedaulatan pangan, kualitas pendidikan dan kesehatan, buruh murah, target pertumbuhan ekonomi, keadilan hukum dan kebijakan, ekspansi perkebunan-pertambangan-lain-lain industri ekstraktif, infrastruktur pelayan industri, tutupan hutan dan daerah aliran sungai, pembakaran hutan dan lahan, kualitas lingkungan hidup dan bentang alam, banjir dan tanah longsor, sumber-sumber penghidupan rakyat, tingkat kriminalitas, krisis identitas dan sosial-budaya, kemiskinan, perambahan hutan, hilangnya ruang hidup...



## EFEK DOMINO YANG MEROBOHKAN SUMATERA



### ***Akhirulkalam...***

Semua tutur lirih ini adalah buah perenungan dan refleksi para penulis dari Lampung hingga Aceh, menggugat penyelenggara negara dan daerah yang menjadikan indikator ekonomi makro sebagai panglima, yang gagal menjamin keselamatan dan daya-pulih warga di Indonesia. Semua yang telah dituturkan hanyalah penggalan-penggalan kecil dari potret yang sesungguhnya kolosal dan mengerikan, ekspresi biaya-biaya sosial, kultural dan ekologis di sepanjang rerantai proses pengerukan tanah dan kekayaan alam serta penghisapan keringat buruh di Pulau Sumatera.

Dibutuhkan tindakan besar dan mendasar guna menghentikan derita warga ini. Yang dibutuhkan adalah kreativitas dan terobosan penyelenggara negara dan daerah untuk memilih arah dan rute yang mampu menjamin keselamatan dan daya-pulih warga. Bukan membuat Badan Ekonomi Kreatif yang itu, tapi kreativitas dan keberanian merombak landasan ekonomi-politik negara kepulauan ini.

Siasat-siasat bertahan hidup rakyat harusnya menjadi cerminan betapa selama ini mereka hidup dan berkehidupan sendirian, karena penyelenggara negara dan daerah lebih sibuk melayani diri sendiri, bermain-main dengan angka-angka indikator ekonomi makro. Tutur lirih para penulis lewat surat-surat permohonan maaf adalah ungkapan rendah hati mereka yang telah bekerja tak kenal lelah dengan sumber-sumber pendukung yang terbatas menemani, menyemangati dan membela warga korban pembangunan ekonomi Indonesia.

Selamat merenung dan berpikir dalam. Tindakan nyata Anda sangat dibutuhkan untuk menghentikan arak-arakan derita rakyat tidak hanya di Pulau Sumatera, tetapi juga di sekujur pulau-pulau Nusantara.

Jakarta, Juni 2015

**Arief Wicaksono**

Penasehat Samdhana Institute untuk Wilayah Sumatera

---

*ttd*

tutur tutur lirik

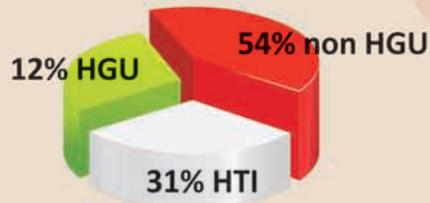


## GENERASI YANG AKAN HILANG AKIBAT PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

### LOKASI KEBAKARAN LAHAN



### LOKASI YANG TERBAKAR



# RIAU:

## generasi yang hilang akibat pembakaran hutan dan lahan

---

Kepada Istri dan anak-anakku tercinta,  
Asri, Atiyya dan Zakiy  
di rumah kita, Pekanbaru, Riau

Sayang, saat kondisi udara Pekanbaru sudah berada di zona hitam dan kandungan oksigen murni hanya 1% 'kalian' seharusnya sudah aku ungsikan. Namun, sayang, itu tidak dapat kulakukan. Penerbangan lumpuh, jalur darat dan laut juga rentan. Hampir semua daerah di negeri ini telah tercemar oleh kabut asap. Istri dan anak-anakku, ma'af aku tidak mampu mengevakuasi kalian...

Istriku, maafkan aku. Selama 10 tahun pernikahan kita engkau tidak pernah bebas dari menghirup asap pembakaran hutan dan lahan.

Atiyya dan Zakiy, Ayah juga minta maaf karena semenjak engkau berdua lahir dan menghirup udara dari 8 dan 6 tahun yang lalu, hingga

”

Istri dan anak-anakku, ma'af aku tidak mampu mengevakuasi kalian.

”

kini setiap tahun engkau berdua juga ikut menghirup racun dari asap yang dihasilkan pembakar hutan dan lahan.

Maafkan aku, istri dan anak-anakku, sayang-sayangku, karena umur pembakaran hutan dan lahan ini lebih lama dari umur pernikahan kita dan umur anak-anak kita. Keluarga kita bukan seperti keluarga *top management* di beberapa perusahaan di Riau yang jika kejadian asap begini keluarganya langsung dievakuasi keluar daerah. Kita juga tidak tinggal di *camp* perumahan perusahaan-perusahaan raksasa yang jika tidak dievakuasi, rumah mereka ditutup dengan *cover* hingga asap tidak masuk ke dalam rumah mereka.

Istri dan anak-anakku,

Bukan hanya kita, ada 1,1 juta jiwa di Kota Betuah ini dan lebih dari 6 juta jiwa warga Provinsi Riau yang bernasib sama dengan kita: menghirup udara yang tidak sehat. Di seluruh Bumi Lancang Kuning yang luasnya 8 juta hektare ini tidak ada wilayah yang bebas dari pencemaran asap. Larangan untuk keluar rumah satu-satunya cara yang dapat aku katakan kepada kalian, walaupun aku tahu tak ada halangan bagi asap pembakaran lahan untuk masuk meracuni ruang-ruang privat kita. Tapi hanya itu yang dapat kita lakukan selama ini.

Istriku,

Nanti ketika Engkau mengajar di kelas mata pelajaran biologi, sampaikanlah bahwa penghancuran hutan alam bukan saja menyebabkan banjir dan tanah longsor akan tetapi juga asap pembakaran hutan dan lahan. Sudah lebih 4 juta hektare hutan alam Riau yang ditebang selama 30 tahun ini. Lahan gambut yang rentan dan rapuh itu kini juga telah dieksploitasi habis-habisan. Peralihan tata guna lahan dan perubahan fungsi hutan dan lahan gambut menjadi perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri, HTI, mendorong praktik tebang dan bakar, yang kemudian menyebabkan pencemaran asap sebagaimana yang kita alami selama 17 tahun ini.



Engkau tahu, lahan gambut merupakan lahan tidak subur dan miskin hara. Agar menjadi subur, pH lahan harus dinaikkan menjadi 6 (netral) dengan cara ditaburi kapur (kalsium) dan pupuk. Sisa potongan kayu jika dibiarkan akan membusuk dan menjadi sumber hama dan penyakit.

Membakar lahan adalah cara paling mudah dan murah untuk mematikan hama. Abu sisa pembakaran juga akan meningkatkan kadar magnesium, kalsium, dan kalium, sehingga tak perlu lagi diberi kapur banyak-banyak. Hanya butuh biaya 2 juta rupiah per hektare untuk membersihkan lahan dengan cara bakar, sementara jika pembersihan lahan tanpa bakar maka biaya yang dibutuhkan adalah 30-40 juta rupiah per hektare. Jauh lebih mahal, kan?

Sementara perusahaan-perusahaan itu selalu inginnya cara yang paling murah, supaya untungnya berlipat ganda. Jadi, kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi saat ini dapat dipastikan hanyalah rangkaian dari kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) untuk perkebunan skala sedang dan besar (perusahaan), Hutan Tanaman Industri (HTI), usaha pertanian rakyat, serta kegiatan kehutanan lainnya.

Aku berharap ceritamu nanti di pelajaran biologi tentang Hutan, Asap dan Pembakaran Hutan dan Lahan akan diceritakan kembali oleh para muridmu kepada orang tua-orang tua mereka yang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat-pejabat Negeri dan para pengusaha itu.

Istriku,

Aku pernah bercerita padamu bahwa kakek dan buyutku juga berladang di tanah bergambut ini, akan tetapi mereka tidak pernah menimbulkan asap yang mencemari udara seperti saat ini. Mereka berladang dan menanam tanaman yang sesuai dengan karakteristik lahan gambut. Orang-orang tua kita dulu tidak pernah berladang dengan cara mengeringkan gambut dengan kanal dan merusak karakteristik alami gambut yang basah. Walaupun dibakar, tetapi karakteristik gambut yang basah tidak berubah sehingga apinya tidak menjalar kemana-mana. Tapi lihatlah kini, gambut dikeringkan sehingga begitu ada pembakaran terus meluas dan menjalar ke mana-mana.

“  
Korporasi dan  
pemilik modal yang  
menjadi aktor  
utama sangat sulit  
untuk diproses dan  
hampir tidak  
pernah dihukum

”

Di seluruh pencemaran asap yang terjadi saat-saat ini, 68%nya berasal dari lahan gambut yang terbakar. Dua puluh delapan persen dari gambut yang terbakar tersebut adalah gambut dalam dan 36%nya di gambut yang sangat dalam. Sementara tentang lokasi yang terbakar: 31% berada di konsesi HTI, 12% di HGU, dan 54% di kebun yang tidak memiliki HGU.

Sayang sekali bahwa proses penegakan hukum di negeri kita ini masih sangat lambat dan tebang pilih. Ratusan orang yang dijadikan tersangka dalam kejadian kebakaran 2014, namun semuanya hanya

masyarakat kecil dan hanya operator di lapangan. Korporasi dan pemilik modal yang menjadi aktor utama sangat sulit untuk diproses dan hampir tidak pernah dihukum.

Istri dan anak-anakku,

Dalam kondisi *berazab* ini kurangilah beraktivitas di luar rumah! Jangan lupa selalu gunakan masker saat pergi ke sekolah dan ke luar rumah. Gunakanlah masker N95 seperti yang terakhir kali itu, yang terpaksa kita beli dari uang tabungan Atiyya karena waktu itu tidak ada lagi dana cadangan di keluarga kita. Kebanyakan masker yang dibagi-bagikan gratis di jalanan itu tidak memadai, tidak bisa memfilter partikel di bawah ukuran 5 mikron yang ada dalam udara tercemar seperti ini.

Pembagian masker yang murahan dan tidak memenuhi standar ini bukan karena daerah kita tak punya uang. Kita merupakan provinsi yang memiliki konsesi hutan tanaman industri terluas di Sumatera (1,7 juta hektare) dan merupakan daerah penghasil CPO terbesar di Indonesia dengan total produksi mencapai 7.570.854 ton/tahun (37% dari total produksi nasional). Kita merupakan daerah terkaya ke-3 di Republik ini. Lebih luar biasa lagi, kabarnya kita mampu mengalami kerugian hingga 20 trilyun rupiah selama kejadian asap pada bulan Februari hingga April 2014.

Akan tetapi, walaupun APBD Riau mencapai 8,8 trilyun rupiah, hanya ada 0,01% yang dapat dibelanjakan untuk keperluan pencegahan dan penanggulangan kerusakan. Terlalu banyak biaya rutin dan gaji pegawai yang harus dibayar, plus program-program lain yang sebetulnya jelas tidak sepenting dan segenting pencegahan dan penanganan kesehatan kita, warga provinsi ini.

Oleh karena itu, sayangkan, jangan lupa selalu sisihkan sedikit uang belanja dapur untuk membeli beberapa macam obat-obatan pencegahan, seperti obat tetes mata, obat batuk, atau pengencer dahak.

Istri dan anak-anakku,

Kalian bersama jutaan perempuan dan anak-anak di negeri ini merupakan penerima dampak paling berat dari pencemaran asap ini. Polusi akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan sangat berbahaya bagi kesehatan, khususnya bagi generasi penerus di negeri ini. Kejadian yang menimpa Ibu Ade yang anggota dewan itu menjadi bukti. Beliau sedang hamil besar saat asap dari kebakaran hutan dan lahan terjadi. Kesibukan aktivitas di luar ruangan membuat Beliau jarang menggunakan masker. Setelah bayinya lahir, dokter menyatakan positif bahwa anaknya menderita gangguan pernafasan akibat asap yang dihirup orang tuanya. Kita turut prihatin dan berdoa yang terbaik untuk anaknya Ibu Ade itu.

Pencemaran asap juga akan berdampak buruk pada pertumbuhan sel otak dan intelegensia bayi. Aku terus menerus khawatir anak kita dan anak-anak generasinya yang ada saat ini fungsi otaknya akan lemah, karena pertumbuhannya terganggu oleh racun yang terkandung dalam partikel asap pembakaran lahan. Tak terbayang olehku seperti apa kualitas generasi Riau di masa mendatang karena telah bertahun-tahun warganya menghirup udara beracun. Akankah Riau kehilangan generasi penerus untuk 15 sampai 20 tahun mendatang?

Istriku,

Jika esok Engkau rapat dengan orang tua murid, katakan pada mereka yang anggota dewan dan yang menjadi pejabat di negeri ini bahwa kondisi yang terjadi saat ini membuktikan gagalnya pengembangan ekonomi berbasis perkebunan besar di lahan gambut. Mereka harus segera menghasilkan kebijakan daerah yang mampu menjamin keselamatan warganya. Jangan hanya peraturan-peraturan tentang retribusi tempat hiburan dan parkir saja! Tapi sudahlah, aku sendiri tidak yakin dengan permintaanku yang satu ini. Bahkan aku juga tidak yakin bahwa mereka sendiri yang akan datang dalam rapat orang tua murid nanti.

Kegelisahan dari seorang suami dan ayah!

Salam,

**Muslim Rasyid**

*ttd*



**SIASAT  
EVAKUASI DIRI DAN KELUARGA**

1. Daftar telepon dan alamat keluarga atau kenalan di kota-kota atau pulau-pulau lain yang biasanya tidak terpapar asap.
2. Jaga silaturahmi dengan keluarga atau kenalan tersebut sehingga mereka tidak kaget apabila diminta menampung pengungsi korban pencemaran asap.
3. Daftar kendaraan untuk evakuasi dan buatlah kesepakatan di muka tentang biaya sewa dll. untuk mengangkut pengungsi korban pencemaran asap.
4. Selalu siapkan di rumah satu Tas Darurat yang berisi dalam jumlah secukupnya paling tidak yang berikut ini:
  - a. air minum
  - b. masker N95
  - c. pakaian ganti
  - d. makanan yang tahan lama
  - e. alat masak-makan-minum
  - f. radio jinjing
  - g. senter
  - h. alat-bahan-panduan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
  - i. kebutuhan bayi
  - j. topi-selendang-kain-selimut untuk menutupi muka dan seluruh badan
  - k. fotokopi KTP-SIM-Paspor-dll.
  - l. kantong-kantong plastik
  - m. kertas tisu dan alat-bahan mandi-cuci-kakus (MCK).



KRISIS  
TANAH DAN PERAMPASAN LAHAN



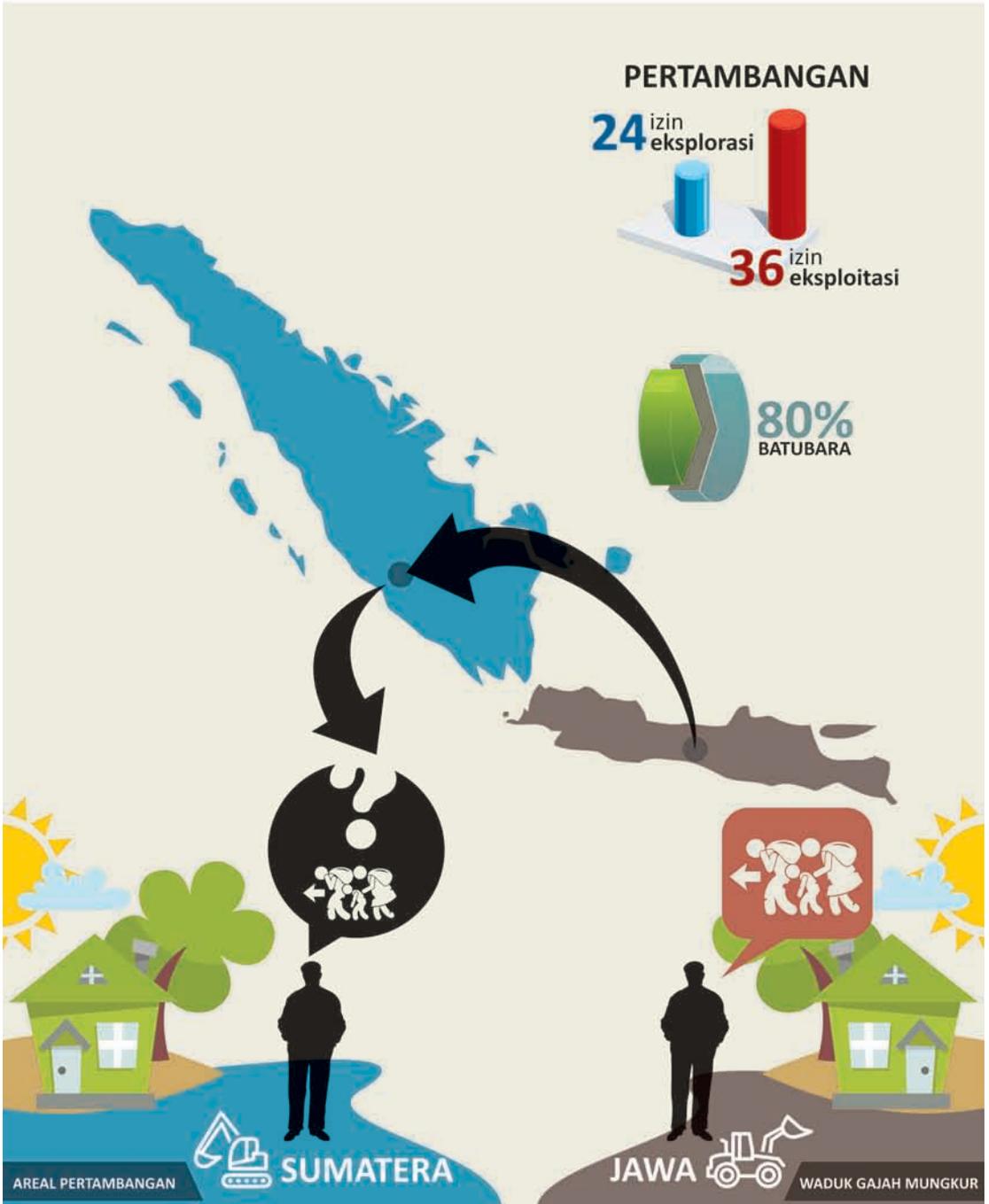
BIOREGION  
PESISIR SELATAN



PROVINSI  
BENGKULU

## TANAH YANG TELAH HILANG DAN TANAH YANG HARUS DIPERTAHANKAN

### PERTAMBANGAN



# **BENGKULU:**

## **tanah yang telah hilang dan tanah yang harus dipertahankan**

---

**Kepada MBah Kardi**

**Di Desa Marga Bakti, Kabupaten Bengkulu Utara**

MBah Kardi yang saya hormati,

Dari hari ke hari kita harus berjuang untuk memastikan bahwa kita diakui, dianggap, oleh negara ini. Jangan sampai kita letih dalam melakukan perjuangan ini! Jangan sampai kita harus lagi-lagi mencari tanah baru dan membangun kehidupan yang baru lagi juga! Apakah mBah tidak capek dan letih dengan proses itu semua? Apakah mBah tidak ingin menikmati hari tua dengan melihat anak cucu bermain lari-larian di tanah yang mBah olah dengan sepenuh hati, mencapai kebahagiaan yang kita semua inginkan?

Apabila perjuangan ini tidak dipertahankan maka mBah tidak akan pernah melihat anak cucu mBah bermain-main di lokasi tanah yang telah diberikan oleh negara sebagai ganti atas hilangnya tanah lahir mBah karena pembangunan Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah beberapa tahun silam. Masihkah mBah ingat masa-masa sulit itu..? ? ?



mBah,

Kenapa penting sekali untuk melakukan perjuangan ini? Karena saat ini provinsi kita, Bengkulu, menjadi satu dari sekian banyak yang melakukan eksploitasi tanah untuk pertambangan batu bara. Wilayah Provinsi Bengkulu yang hanya seluas 1.987.870 hektare sebenarnya sangat kecil kalau dibandingkan dengan wilayah tambang-wilayah tambang di provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera. Wilayah provinsi kita juga sangat kecil kalau dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang sudah hampir 2 juta jiwa. Wilayah total provinsi kita sebenarnya hanya sedikit lebih luas dari wilayah hutan di Provinsi Jambi yang mencapai 2 juta hektare. Sungguh berdesak-desakan kita ini di Bengkulu. Penduduknya terus bertambah dan lebih parah lagi adalah didesak-desak oleh perizinan pertambangan. Ada totalnya 68 izin. Dua puluh empatnya adalah izin eksplorasi dan 36nya izin eksploitasi. Dari semua izin itu, 80%nya adalah izin-izin pertambangan batu bara.

Hampir semua pertambangan di Provinsi Bengkulu melakukan pertambangan terbuka. Lokasi konsesi pertambangan itu kebanyakan adalah di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti DAS Ketahun, DAS Bengkulu, dan DAS-DAS lainnya. Wajarlah bahwa saat ini rata-

rata sungai-sungai besar yang ada di Provinsi Bengkulu telah rusak total. Rusak warnanya, rusak rasanya, rusak bentang alamnya. Ini semua akibat ketidakpatuhan perusahaan tambang-perusahaan tambang dalam menjaga lingkungan.

mBah,

Tentang sungai-sungai yang rusak itu, saat ini yang terparah adalah Sungai Air Ketahun dan Sungai Air Bengkulu. Sampai hari ini pemerintah belum menindak tegas para perusak lingkungan khususnya penghancuran sumber air masyarakat itu. Termasuk di Sungai Air Bengkulu yang sampai saat ini menjadi sumber utama bahan baku air PDAM PT Tirta Dharma di Kota Bengkulu.

Sungai Air Bengkulu yang menjadi sumber air PDAM ini telah tercemar akibat pencucian batu bara dan limbah pabrik karet. Hasil penelitian WALHI Bengkulu menunjukkan bahwa di hulu Sungai Bengkulu terdapat 6 perusahaan tambang batu bara, yaitu: PT Inti Bara Perdana, PT Bukit Sunur, PT Fetro Rejang, PT Sirat Unggul Permai, PT Kusuma Raya Utama, dan PT Danau Mas Hitam. Kemudian ada 2 pabrik CPO, pengolahan minyak sawit, yaitu: PT Cahaya Sawit Lestari dan PT Palma Mas Sejahtera, dan 2 pabrik karet: PT Batang Hari Bengkulu dan PT Bengkulu Angkasa Makmur. Aktivitas semua pabrik dan perusahaan-perusahaan ini adalah di sepanjang Sungai Air Bengkulu dan nampak bahwa mereka juga memutus anak sungai-anak sungai yang ada di hulu Sungai Bengkulu.

Itulah sebabnya Sungai Bengkulu, sumber PDAM dan air minum kita, tercemar berat.

”  
sungai-sungai  
besar yang ada di  
Provinsi Bengkulu  
telah rusak total.  
Rusak warnanya,  
rusak rasanya,  
rusak bentang  
alamnya  
”

“  
Kalau dulu tanah  
mBah diambil  
untuk pembuatan  
bendungan,  
sekarang untuk  
pertambangan  
batu bara

”

Ini jelas adalah pelanggaran atas Pasal 33 UUD 1945: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal ini menyatakan bahwa prinsip mendasar dalam mengelola sumber daya alam, termasuk air, harus mengedepankan “rakyat”, yaitu mBah sendiri, saya, dan semua warga. Bukan seperti cerita Sungai Bengkulu itu, yang malah dijadikan penopang bisnis investasi kotor yang dipraktikkan oleh pertambangan batu bara, perkebunan besar kelapa sawit, dan lain sebagainya.

Ini adalah realita yang terjadi di provinsi kita. Akankah ini terus berlanjut sampai ke generasi-generasi selanjutnya? Nampaknya ancaman kerusakan ini terus berlanjut dan berlanjut seperti yang dialami oleh mBah Kardi sendiri yang sampai saat ini bersama warga desa harus terus melakukan perlawanan agar desa mereka tidak terlalu hancur dari aktivitas pertambangan batu bara. MBah Kardi sudah tua dan tentu ingin rasanya menikmati hasil dari sulitnya kehidupan yang dilalui selama ini, setelah berjuang membangun peradaban pasca pengusuran saat pembuatan Waduk Gajah Mungkur di Jawa itu.

Saya masih ingat cerita mBah yang harus rela meninggalkan semua kenangan peradaban yang telah dibangun bersama keluarga secara turun menurun karena pembuatan Waduk Gajah Mungkur ini. Dengan kecewa dan berat hati mBah terpaksa mengikuti program transmigrasi

ke Provinsi Bengkulu. Waktu itu kemudian seolah-olah akan ada harapan baru bagi keturunan mBah yang akan datang, karena program ini adalah program unggulan pada masa Presiden Suharto.

Akan tetapi kemudian mBah merasakan sendiri bagaimana menjalani kehidupan sebagai warga baru di Provinsi Bengkulu. MBah hadir ke sini tanpa mengetahui bagaimana kondisi tanah yang akan didiami. MBah tahu sendiri bagaimana sesampainya di lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ternyata lokasi itu adalah hutan belantara. Diberi tanah yang sama sekali belum diolah seluas 2 hektare, diberi sebuah rumah berdinding papan dan berlantai tanah. Sedih sekali pasti saat itu, mBah, meninggalkan tanah leluhur di Jawa dan sekeluarga harus memulai lagi dari awal untuk kehidupan.

Akan tetapi saya mendengar cerita mBah bahwa selang berganti tahun harapan itu mulai muncul. MBah Kardi sudah menemukan apa yang bisa dilakukan di tanah transmigrasi itu. MBah Kardi dan warga lainnya memulai pertanian dengan menanam karet. Sesuatu yang mBah sebetulnya belum pernah lakukan selama hidup di Jawa. Seiring waktu, hasil jerih payah mBah Kardi mulai menuai hasil dan tingkat kesejahteraan keluarga mulai meningkat. Bisa membangun sebuah rumah yang cukup layak untuk anak dan istri.

Namun pada saat keadaan mulai baik dan stabil itu, mBah dihadapkan dengan situasi yang sangat mengerikan karena kemudian desa dan kebun mBah dimasukkan secara semena-mena ke dalam konsesi pertambangan batu bara.

Ini adalah sejarah pedih yang berulang. Kalau dulu tanah mBah diambil untuk pembuatan bendungan, sekarang untuk pertambangan batu bara.

Sekali lagi mBah harus kembali berpikir keras, di mana tanah yang akan didiami demi melanjutkan kehidupan? MBah pernah bilang kepada saya, "Apakah takdirku akan selalu begini...? ? ?"

mBah,

Meskipun pengetahuan saya jauh dari cukup, saya selalu berkeyakinan bahwa negara yang besar ini seharusnya dapat menjamin hak, melindungi rakyat dengan memberikan kepastian menguasai ruang (tanah) untuk semua warga. Dan ini mestinya bukan seperti kecenderungan selama ini yang mBah rasakan sendiri, rakyat adalah beban negara.

Banyak hal tentang ini tergantung pada pemimpin negara kita ini. Bagaimana dia bersikap dan menyiasati upaya menyejahterakan rakyatnya? Bukannya malah menimbulkan kehancuran dengan mengambil tanah-tanah rakyat, memicu keresahan dengan menciptakan konflik antara masyarakat dengan pemegang konsesi izin pertambangan dan perkebunan!

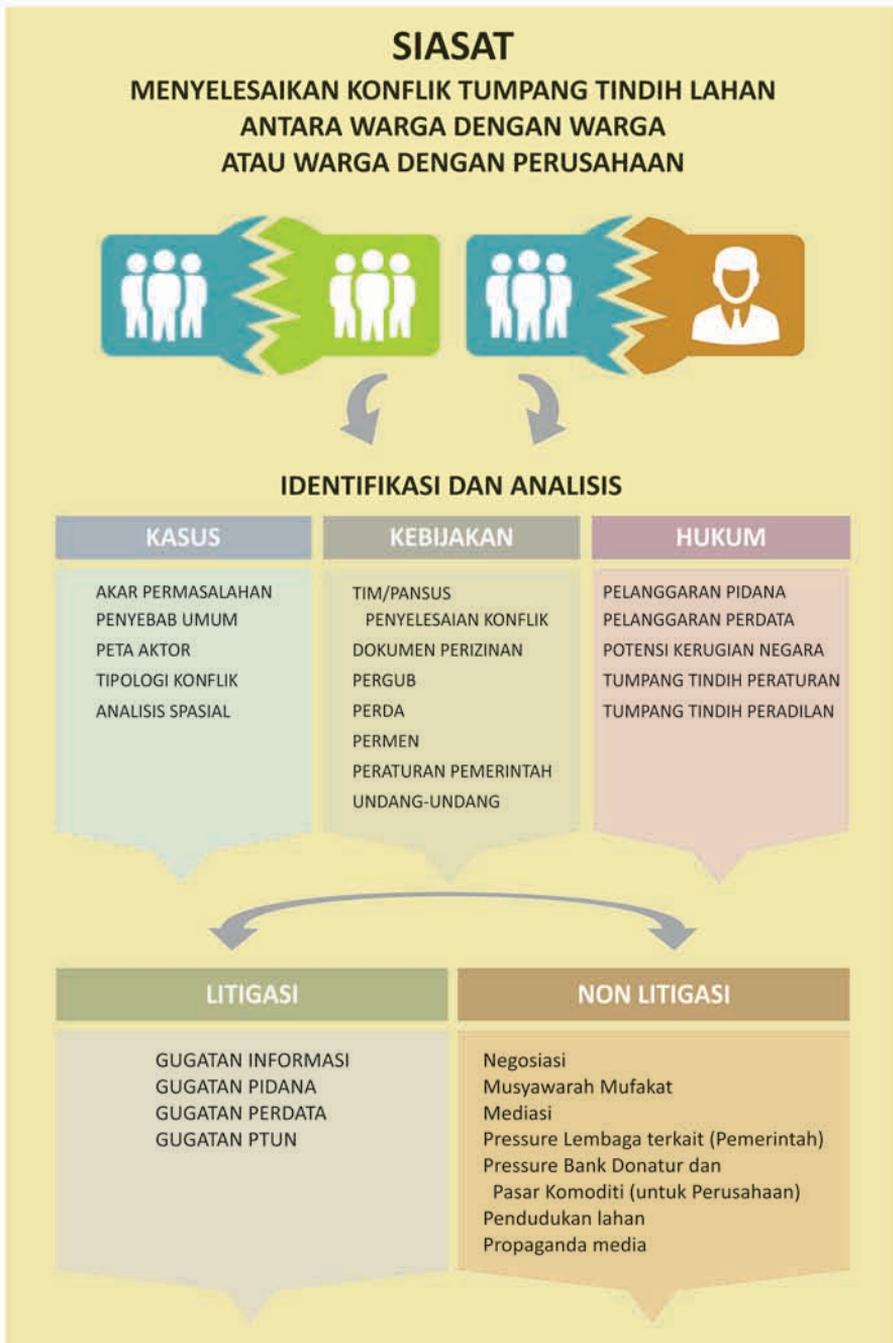
mBah,

Kita memang harus berjuang terus, jangan sampai lelah, dan sampaikan selalu pada anak cucu mBah cerita lama yang menyakitkan itu, dan cerita hari ini yang penuh kegetiran. Moga-moga sejarah buruk ini berhenti sampai di sini dan jangan pernah terulang pada anak cucu mBah selanjutnya....

Salam,

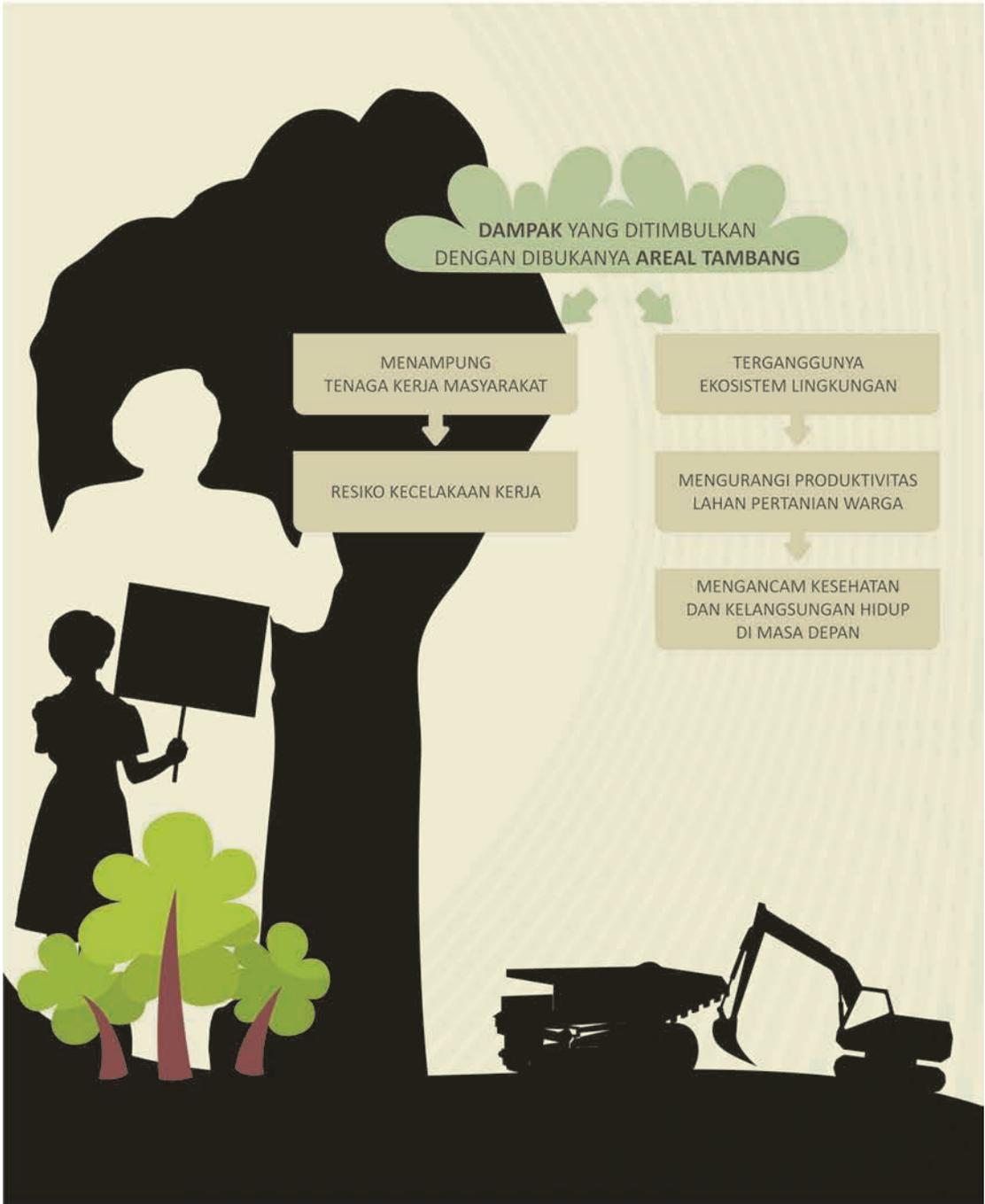
**Beni Ardiansyah**

\_\_\_\_\_ *ttd*





## HILANGNYA TANAH NAGARI NAGARI



# SUMATERA BARAT:

## hilangnya tanah nagari nagari

---

**Kepada Ibu Syamsimarnis**

**di Nagari Tuik IV Koto Kec. Batang Kapas, Pesisir Selatan**

Saya berdo'a Insya Allah Ibu selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kekuatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Mudah-mudahan Ibu juga masih ingat dengan saya, karena memang kita bertemu tidak dalam rentang waktu yang panjang, sehingga Ibu mungkin perlu waktu sejenak untuk mengingatnya kembali. Saya Uslaini, Ibu, yang pernah datang dengan 3 orang teman ke Nagari Tuik IV Koto.

Ibu Syamsimarnis,

Pertemuan kita pada tanggal 10 Maret 2015 itu buat saya merupakan pertemuan yang sangat berkesan sekali. Saat itu Ibu bercerita bahwa keberadaan Ibu di kampung baru 7 tahun belakangan, ketika sudah memasuki masa pensiun, yang mana sebelumnya Ibu menetap di Padang sebagai seorang guru. Keinginan Ibu dan keluarga untuk kembali dan menetap di kampung adalah dengan harapan akan bisa menapaki kehidupan yang tenang dan menikmati masa pensiun dengan suasana yang nyaman.

Namun betapa terkejutnya Ibu karena harapan yang dibawa tadi ternyata berubah menjadi kekhawatiran akan masa depan Ibu dan juga anak-anak serta saudara yang tinggal di kampung. Hancurnya harapan itu adalah ketika Ninik Mamak Nagari Tuik IV Koto, yang merupakan kampung

tempat tinggal Ibu, telah bersepakat menyerahkan 2.635 hektare lahan yang berupa kawasan hutan Nagari Tuik, Nagari Taluak Tigo Sakato, Nagari Ampek Koto Mudik, Nagari IV Koto Ilie, Nagari Koto Nan 2 IV Koto Ilie, Nagari Nan Tigo IV Koto Ilie, dan Nagari Taratak Tempatih untuk dijadikan wilayah usaha pertambangan batu bara.

Pada waktu itu Ibu menyampaikan bahwa ketika wilayah yang diserahkan oleh Ninik Mamak tersebut sudah mulai ditambang oleh perusahaan, ketika itu pula mulai terancamnya Ibu dan warga di kampung Ibu, terutama yang berdekatan dengan aktivitas pertambangan itu. Aktivitas tambang itu nantinya, menurut Ibu, bisa dipastikan tidak akan memberikan perubahan lebih baik untuk masyarakat di kampung Ibu.

Dalam beberapa kali pertemuan pihak PT Barito Karya Denai menyampaikan bahwa ketika perusahaan beraktivitas akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di kampung dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ibu bilang bahwa sejauh informasi yang telah Ibu dapatkan tidak pernah ada bukti bahwa ketika ada aktivitas pertambangan maka terbuka pula peluang bagi masyarakat di kampung, bahwa akan ada lapangan pekerjaan, dan akan membaik tingkat kesejahteraan masyarakat. Ibu telah mengetahui informasi betapa teknologi penambangan batu bara yang dilakukan sekarang membuat tidak lagi banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, kecuali untuk penjaga portal dan beberapa tenaga buruh harian lepas.

“  
harapan  
ketenangan dan  
kesejahteraan  
hidup ternyata  
berubah menjadi  
kekhawatiran  
atas keselamatan

”

Ibu bahkan memberikan contoh kejadian di Sawahlunto yang mana semenjak zaman penjajahan Belanda sudah ada aktivitas tambang tapi sampai sekarang pun masyarakat Sawahlunto tidak menikmati kehidupan yang lebih baik, walaupun di sana pernah beroperasi perusahaan besar tambang batu bara, yaitu Perusahaan Negara Tambang Batu bara Ombilin (PNTBO).

Ibu Syamsimarnis,

Yang Ibu sampaikan memang benar adanya. Masyarakat di Sawahlunto sampai sekarang harus mempertaruhkan keselamatan, nyawa, dan masa depan keluarga mereka di dalam lubang tambang. Potensi tambang permukaan sudah habis dieksploitasi sehingga mereka harus menjadi buruh tambang dan masuk ke dalam lubang-lubang dengan kedalaman puluhan meter untuk mendapatkan batu bara.

Pada tanggal 16 Juni 2009 terjadi ledakan yang mengakibatkan sedikitnya 33 orang tewas di dalam salah satu lubang tambang batu bara tersebut.

Pada tanggal 25 Januari 2014 di tempat yang sama, yaitu di Parambahan, Kota Sawahlunto, kembali terjadi ledakan di lubang galian tambang batu bara yang menewaskan 3 orang. Amran Nur, Walikota Sawahlunto waktu itu, mengatakan bahwa terdapat sekitar 250 orang yang nekat bekerja sebagai buruh tambang di KP tersebut.

Katanya kemudian, "Kenapa saya katakan nekat? Ya, karena mereka bekerja di sana hanya untuk memenuhi kebutuhan perut. Mereka tidak pernah berpikir mengenai keselamatan kerja selama menambang."

Miris memang; untuk memenuhi kebutuhan perut mereka kemudian harus mengabaikan keselamatan mereka.

“  
Ibu dan  
sebahagian besar  
warga yang  
menolak rencana  
pertambangan  
tersebut malah  
kemudian  
dimusuhi dan  
dikucilkan  
”

Ibu Syamsimarnis,

Memang kampung Ibu belum sampai mengalami apa yang terjadi di Kota Sawahlunto tersebut, namun kekhawatiran sekali bagi Ibu saat ini adalah karena jika aktivitas tambang itu berjalan maka sumber air yang selama ini digunakan untuk pertanian, peternakan, bahkan untuk minum akan tercemar karena salah satu sungai yang menjadi sumber air kebutuhan masyarakat, yaitu Sungai Tuik, hulunya berada di dalam wilayah

pertambangan tersebut. Ribuan hektare areal pertanian masyarakat akan terancam produktivitasnya. Dan akhirnya justru angka pengangguran akan meningkat karena sektor produksi rakyat yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka akan terancam hancur produktivitasnya.

Ibu Syamsimarnis,

Saya merasa senang dan bangga terhadap Ibu. Tapi perasaan saya bercampur dengan sedih karena saat Ibu dan sebahagian besar warga telah menyadari risiko yang akan diterima jika wilayah yang sudah diserahkan oleh Ninik Mamak tersebut mulai dikelola untuk pengambilan batu bara oleh perusahaan, izin tetap dikeluarkan oleh pemerintah. Kesedihan saya menjadi bertambah ketika Ibu menyampaikan bahwa Ibu dan sebahagian besar warga yang menolak rencana pertambangan tersebut malah kemudian dimusuhi dan dikucilkan. Ini membuat saya semakin bangga dan salut kepada Ibu dan warga yang melakukan penolakan tersebut karena walaupun dimusuhi dan dikucilkan, Ibu dan warga tidak surut langkah dan tetap memperjuangkan keselamatan penghidupan masa depan.

Seperti Ibu, saya juga takut membayangkan apa yang akan terjadi nantinya jika wilayah tersebut sudah dimanfaatkan oleh perusahaan yang mendapatkan izin untuk mengambil batu bara di wilayah tersebut. Lahan belum dimanfaatkan oleh perusahaan saja ternyata sudah menyebabkan konflik di tengah masyarakat, apalagi kalau nanti sudah beraktivitas penuh? Apakah Ibu dan keluarga serta warga di kampung Ibu harus betul-betul mengalami risiko yang Ibu takutkan itu, baru kemudian semua sadar bahwa kekhawatiran dan ketakutan Ibu ternyata benar adanya.

Ibu Syamsimarnis,

Situasi seperti ini ternyata tidak hanya terjadi di Nagari Tuik IV Koto karena hal yang sama juga terjadi di Nagari Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, di mana atas persetujuan Ninik Mamak Nan 8 telah diserahkan lahan seluas 199 hektare kepada PT TRIPABARA untuk aktivitas tambang batu bara. Izin yang sudah diberikan semenjak tahun 2007 itu telah menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Ternyata

juga sementara ini bukan batu bara yang keluar dari kawasan tersebut. Justru yang keluar dari kawasan tersebut adalah kayu. Situasinya, masyarakat di Nagari Lunang Silaut juga menolak rencana penambangan batu bara yang akan dilakukan oleh PT TRIPABARA.

Ibu Syamsimarnis,

Aktivitas pertambangan di Sumatera Barat bukanlah hal yang baru. Berdasarkan catatan sejarah, penambangan tidak hanya dilakukan saat-saat ini tapi sudah dimulai sejak tahun 1685 M, tepatnya di Salido, Pesisir Selatan, dan Ophir di Pasaman. Di samping itu, sejak zaman penjajahan, negeri kita juga dibuka sebagai wilayah pertambangan batubara, yaitu dimulai di awal tahun 1900an di Kota Sawahlunto.

Terus berlanjut sampai sekarang dan hingga saat ini tercatat ada 262 perusahaan pertambangan di Sumatera Barat. Ini berdasarkan Data Kementerian ESDM tahun 2015 yang menunjukkan jumlah perusahaan yang memiliki Izin Eksplorasi dan Operasi Produksi untuk pertambangan batubara, emas, timah hitam, bijih besi, karst, tembaga dan logam dasar.

Total luas konsesi perusahaan-perusahaan itu adalah 332.047,119 hektare. Dari 262 perusahaan itu, 123 perusahaan memiliki sertifikat CnC, artinya dianggap *clean and clear*, bersih dan beres.

Pertanyaannya: bagaimana bisa Clean and Clear? Bersih dan Beres? Sementara dari catatan WALHI Sumbar aktivitas pertambangan selalu menimbulkan konflik, baik sesama masyarakat seperti di Sundatar Kab. Pasaman, Aie Dingin Kab. Solok Selatan, PT Semen Padang di Kota Padang, demikian juga di Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kab. Darmasraya, dan Kab. Lima Puluh Kota.

Di samping itu setiap aktivitas tambang yang dilakukan baik secara administrasi mendapatkan izin maupun yang tidak mendapatkan izin pasti akan berdampak terhadap aliran sungai yang ada di dekat aktivitas tambang tersebut. Ini seperti di Sungai Batang Hari yang alirannya melewati Kab. Solok Selatan, Kab. Darmasraya, dan Kab. Sijunjung, serta Sungai Batang Aru di Kota Padang yang di hulunya terdapat aktivitas tambang batu kapur PT Semen Padang, Batang Palangki di Kabupaten Sijunjung, Batang Nopan di Pasaman.

Tercemarnya air sungai tersebut tidak hanya mengakibatkan terganggunya produktivitas petani dan peternak, akan tetapi juga mengancam ketersediaan air layak pakai untuk masyarakat yang dialiri aliran sungai tersebut. Kondisi ini akan dirasakan untuk masa waktu yang tidak bisa dihitung, panjang di masa yang akan datang, dan akan berakhir dengan terancamnya keselamatan warga sekitar daerah pertambangan dan daerah aliran sungai yang tercemar, terganggunya kemampuan produksi yang pada akhirnya berakibatnya rendahnya kemampuan konsumsi masyarakat seperti kebutuhan sandang dan pangan.

Mungkin ada yang mengatakan bahwa dibukanya wilayah pertambangan akan memajukan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda nagari, dan membuat nagari kita ini menjadi kaya. Tapi, sekali lagi, belajar dari Kota Sawahlunto yang telah ditambang batu baranya sejak dulu, yang terjadi adalah masyarakat setiap hari selama puluhan tahun hidupnya harus menghirup udara yang mengandung gas metana, dan setiap tahun akan ada perempuan yang menjadi janda atau anak menjadi yatim karena suami atau ayah mereka meninggal di lobang tambang yang meledak atau longsor.

Tidak banyak masyarakat nagari yang akan menjadi karyawan perusahaan tambang karena untuk bekerja di usaha pertambangan harus memiliki ketrampilan khusus. Di Nagari Lunang Utara, saat Ninik Mamak menyerahkan tanahnya pada perusahaan untuk menjadi wilayah pertambangan batu bara, mereka awalnya juga berpikir tentang membuka lapangan pekerjaan bagi anak kemenakan. Yang terjadi saat ini: dari ratusan pegawai tambang hanya 12 orang yang berasal dari Nagari Lunang dan sekitarnya, dengan jabatan sebagai penjaga portal, juru masak, atau tukang cuci.

Apa yang mau kita harapkan dari usaha pertambangan? Apakah kita ingin mendapatkan hutan yang dibabat habis, lubang tambang yang selalu mengeluarkan gas metana, longsor lahan yang menutupi sungai dan irigasi kita, sungai yang kering dan kotor sepanjang tahun karena hilangnya daerah tangkapan air? Kita akan mati merana di tanah kita sendiri karena air bersih langka, sawah dan ladang tak dapat ditanami, serta penyakit saluran pernafasan karena setiap hari menghirup udara yang kotor.

Di sini lah, persis seperti Ibu rasakan, saya merasa sangat sedih.

Ibu Syamsimarnis,

Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin sampai hari ini kami belum bisa membantu lebih banyak sebagaimana mungkin Ibu dan masyarakat di Nagari Tuik IV Koto harapkan. Akan tetapi saya sangat yakin perjuangan Ibu dengan warga lainnya tidak akan bergantung pada bantuan dan dukungan dari kami. Saya menyadari, dan saya yakin, seperti Ibu sadar dan yakin, bahwa kekayaan alam yang ada di muka bumi ini adalah diciptakan untuk kita dalam menjalani keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Jadi kita tentu juga tidak boleh ceroboh dalam memanfaatkannya hingga mengabaikan keselamatan kita dan keberlanjutan kehidupan anak cucu kita.

Terima kasih saya kepada Ibu yang sudah memberikan pembelajaran, kekuatan juga bagi saya untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik.

Salam hangat dari saya, semoga Ibu terus diberi kekuatan dan kesabaran. Aamiin.

Dari Ananda,

**Chaus**

\_\_\_\_\_ *ttd*



## TANAH UNTUK HARIMAU, TAMBANG DAN PERKEBUNAN; TANAH BUKAN UNTUK MANUSIA

### PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI ACEH TAHUN 2014

ACEH UTARA  
135.352,70 Ha 47,18%

NAGAN RAYA  
35.024,05 Ha 12,21%

ACEH TAMIANG  
28.731,78 Ha 10,02%

ACEH TIMUR  
21.180,80 Ha 7,38%

ACEH SINGKIL  
19.539,00 Ha 6,81%

ACEH BARAT DAYA  
18.711,00 Ha 6,52%

ACEH SELATAN  
12.120,00 Ha 4,22%

ACEH BARAT  
8.705,00 Ha 3,03%

ACEH JAYA  
2.679,00 Ha 0,93%

BIREUN  
2.311,00 Ha 0,81%

KOTA LANGSA  
2.193,67 Ha 0,76%

SIMEULU  
300,00 Ha 0,10%

ACEH BESAR  
24,88 Ha 0,01%

sumber : WALHI



**ACEH:**

**tanah untuk harimau, tambang,  
dan perkebunan; tanah bukan  
untuk manusia**

---

**Kepada Yth,**

**Bapak Ali**

**Di Kuala Seumayam, Kecamatan Darul Makmur**

**Kabupaten Nagan Raya, NAD**

Assalamualaikum Wr.Wb,

Salam hormat dari kami Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada advokasi dan kampanye penyelamatan lingkungan hidup serta mendedikasikan diri untuk melindungi hak-hak masyarakat dan sumber-sumber penghidupan rakyat. WALHI merupakan organisasi lingkungan tertua di Indonesia dan berada di 28 provinsi termasuk di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD).

Bapak Ali yang baik,

Saya mendengar tentang persoalan yang Bapak hadapi bersama dengan ratusan warga lainnya di Desa Kuala Seumayam. Saya dengar bahwa dahulu Bapak terpaksa harus meninggalkan Dusun Pantan Bayu, Desa Kuala Seumayam yang luas wilayahnya 100 hektare karena adanya konflik dengan satwa liar harimau. Konflik dengan harimau itu telah menyebabkan korban jiwa di pihak warga. Kemudian dengan berat hati pada tahun 1960 Bapak bersama 500 orang warga, yaitu sekitar 83

“  
Dalam konflik  
tentang harimau,  
karena konflik  
bersenjata, karena  
tsunami, karena  
proyek-proyek  
perkebunan...  
rakyat lah yang  
tersingkir”  
”

Kepala Keluarga (KK) pindah ke tempat baru, ke arah pinggir pantai, yang walaupun masih di dalam Desa Seumayam tapi kondisinya jauh berbeda, lebih aman. Bapak dan warga bertahan di tempat itu hingga tahun 2003. Saat itu, kesulitan ekonomi membuat Bapak dan warga lainnya tetap mengelola lahan di dusun yang lama sebagai sumber ekonomi keluarga walau tidak mudah mempertahankan lahan pertanian tersebut.

Kemudian, konflik bersenjata terjadi di negeri ini dan semakin mempersulit kehidupan masyarakat. Hingga akhirnya pada tahun 2002 militer melarang warga bercocok tanam di dusun lama dengan alasan keamanan.

Tidak dapat melakukan aktivitas pertanian di dusun lama membuat masyarakat beralih menjadi nelayan atau mengelola lahan sempit di sekitar pemukiman.

Kondisi sulit itu rasanya tidak akan pernah berakhir mengingat kondisi perang yang mengancam keselamatan warga dan juga tindakan militer yang membakar pemukiman warga membuat warga memilih untuk pergi meninggalkan desa demi keselamatan nyawa. Setelah mengungsi beberapa waktu, akhirnya sekitar tahun 2004, 51 KK masyarakat Desa

Kuala Seumayam direlokasi oleh pemerintah ke wilayah yang ditempati sekarang dengan luas areal 1,5 hektare. Masyarakat yang mendiami wilayah relokasi umumnya kemudian berprofesi sebagai nelayan. Mereka mencari kerang di sungai dan menangkap ikan. Pilihan profesi ini dilakukan karena tidak ada pekerjaan lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

Itu sejarah yang sedikit saya ketahui.

Pada saat ini kehidupan masyarakat Desa Kuala Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, belum dapat dikatakan telah mencapai standar kehidupan yang layak. Desa Kuala Seumayam belum memiliki sarana dan prasarana pelayanan dasar seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan akses jalan. Tanah untuk pemukiman penduduk juga tidak cukup tersedia di desa ini. Lahan perkampungan termasuk lahan masyarakat untuk bercocok tanam, telah habis dikuasai oleh perusahaan-perusahaan perkebunan.

Saya melihat bahwa kondisi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di Desa Kuala Seumayam ini merupakan salah satu bukti bahwa negara telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Hal ini sungguh sebuah ironi di negara yang sudah 70 tahun merdeka, apalagi di Aceh yang berstatus sebagai daerah otonomi khusus ini.

Pak Ali yang saya hormati,

Jika kita melihat data yang tercantum di Catatan Akhir Tahun 2014 WALHI Aceh mengenai sektor perkebunan kelapa sawit di Aceh, hingga tahun 2014, perkebunan kelapa sawit telah tersebar di 13 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Total luas wilayah perkebunan itu adalah 286.872,88 hektare. Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten dengan wilayah perkebunan kelapa sawit terluas, yaitu 135.352,70 hektare atau 47,18%, disusul oleh Nagan Raya dengan 35.024,05 hektare atau 12,21%, Aceh Tamiang 28.731,78 hektare atau 10,02%, Aceh Timur 21.180,80 hektare atau 7,38%, Aceh Singkil 19.539,00 hektare atau 6,81%, Aceh Barat Daya 18.711,00 hektare atau 6,52%, Aceh Selatan 12.120,00 hektare atau 4,22%, dan Aceh Barat 8.705,00 hektare atau 3,03%. Sedangkan 5 kabupaten/kota lainnya

mencatatkan angka luasan perkebunan kelapa sawit di bawah 1%, yaitu Aceh Jaya seluas 2.679,00 hektare atau 0,93%, Bireun 2.311,00 hektare atau 0,81%, Kota Langsa 2.193,67 hektare atau 0,76%, Simeulu 300,00 hektare atau 0,10%, serta Aceh Besar 24,88 hektare atau 0,01%.

Pak Ali yang saya hormati,

Saya memahami kondisi sulit yang Bapak dan warga hadapi setiap hari. Letak geografis wilayah relokasi yang Bapak diami bersama masyarakat sekarang sangat jauh dari kota kecamatan. Saya mendengar bahwa sebelum tahun 2004 interaksi masyarakat dengan desa lain dilakukan dengan mengandalkan jalur sungai dan laut. Hubungan interaksi ekonomi masyarakat hanya dilakukan di daerah Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk mencapai Desa Kuala Seumayam ini dibutuhkan waktu 2 jam serta harus melewati jalan perkebunan PT Kalista Alam. Masyarakat terpaksa harus melewati jalan tersebut karena tidak ada akses jalan lain ke wilayah ini. Saat musim hujan, kondisi badan jalan terlalu sempit dan licin, sehingga sangat susah untuk dilalui. Saya merasakan suasana kehidupan desa ini sangat berbeda dengan desa lain.

Jika kita melihat tentang infrastruktur yang seharusnya ada dalam suatu desa untuk mendukung kehidupan warganya, kita tidak dapat menemukannya di wilayah ini. Sarana pendidikan yang layak seperti di desa-desa lainnya tidak tersedia di desa ini, seperti gedung sekolah dasar.

Di desa Bapak, masyarakat menjadikan sebuah rumah penduduk sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak sekolah. Hanya ada 2 ruang kelas yang dibatasi dengan dinding pemisah. Masyarakat terpaksa menjadikan rumah warga sebagai tempat pendidikan karena jauhnya akses ke desa tetangga yaitu Desa Suak Bahong. Di sekolah di desa tetangga ini pun hanya tersedia seorang guru honor dan seorang lulusan SMU yang membantu pelaksanaan belajar mengajar.

Pendidikan yang dapat dijangkau oleh anak-anak kita hanya sampai kelas 3 sekolah dasar saja, sebab selain hanya mempunyai 2 ruang

belajar, juga tidak ada guru pengajar. Terkadang sekolah libur jika guru pengajar yang hanya dua itu sakit.

Setelah selesai kelas 3 sekolah dasar, para siswa terpaksa belajar di kelas 3 lagi. Tidak ada kelas 4. Hal ini selain disebabkan ketidakmampuan ekonomi orang tuanya, jarak yang sangat jauh untuk mencapai sekolah di desa tetangganya juga menjadi alasan lain. Saya melihat saat ini tercatat ada 29 siswa yang belajar di sekolah ini, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Berdasarkan keterangan masyarakat setempat, ada beberapa siswa yang sudah berumur 12 tahun sampai 15 tahun masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar.

Saya melihat selain persoalan sarana pendidikan, kebutuhan dasar lainnya seperti sarana kesehatan juga bermasalah di desa ini. Sebagai sebuah desa yang seharusnya mandiri, desa ini belum memiliki sarana kesehatan. Sering terdengar cerita masyarakat bahwa jika ada warga yang sakit mereka hanya mengandalkan obat kampung. Jika tidak bisa disembuhkan dengan obat kampung, maka masyarakat terpaksa membawa pasien ke puskesmas desa tetangga yang letaknya jauh dari Desa Kuala Seumayam. Kalau harus ke Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya, masyarakat Desa Kuala Seumayam harus menempuh perjalanan sekitar 3 jam jika cuaca cerah.

Pak Ali yang baik,

Saat kami sampai di desa ini, kami dapat menyaksikan di bagian kiri/kanan serta di bagian depan dan belakang rumah warga telah ditanami kelapa sawit oleh perusahaan. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang mendiami wilayah ini terjepit oleh sawit-sawit HGU PT Kalista Alam. Masyarakat sama sekali tidak memiliki lahan. Bahkan, yang sangat memprihatinkan, lahan kuburan pun tidak ada. Masyarakat Desa Kuala Seumayam harus meminta izin kepada PT Kalista Alam bila akan menguburkan jenazah warga yang meninggal. Kasus ini pernah terjadi pada bulan April 2008, saat salah seorang warga desa meninggal dunia.

Persoalan ketiadaan lahan masyarakat karena telah dikuasai oleh PT Kalista Alam pernah disampaikan kepada Camat, Bupati, dan Gubernur. Namun sampai saat ini belum ada perkembangan beritanya. Hingga saat ini, telah hampir 10 tahun lamanya, masyarakat Kuala Seumayam terpaksa hidup dalam kondisi yang sangat di bawah standar kehidupan layak dan bersengketa dengan PT Kalista Alam.

Sementara PT Kalista Alam terus memperluas HGU nya sehingga antara perkebunan sawit PT Kalista Alam dengan rumah masyarakat sekarang hanya berjarak beberapa meter saja. Sedangkan lahan desa yang juga didiami oleh masyarakat saat konflik bersenjata, yaitu wilayah pinggir pantai, sekarang ini telah masuk dalam areal HGU perusahaan lain, yaitu PT ASTRA.

Saya melihat masyarakat desa Bapak sekarang jadi sangat sinis terhadap pendatang. Ini karena banyak yang datang namun mereka hanya Pemberi Harapan Palsu. Sudah banyak data dan keterangan yang diberikan oleh masyarakat kepada para pendatang itu kemudian malah hilang entah kemana.

Semangat yang semakin lemah membuat masyarakat merasa semakin lelah untuk menuntut hak mereka, baik ke pihak pemerintah maupun ke pihak perusahaan yang memiliki HGU di atas tanah yang dulunya mereka miliki itu.

Pak Ali, meskipun demikian saya sungguh salut dengan perjuangan yang Bapak dan warga desa lakukan selama bertahun-tahun, walau hingga saat ini masih belum memenuhi keinginan kita semua. Saya melihat kronologis kasus dan perjuangan panjang masyarakat Desa Kuala Seumayam yang panjang dan masih belum akan berakhir.

Saya mengetahui walau sudah pindah dari dusun lama, tadinya warga masih menggarap tanahnya di sana untuk perkebunan dan lahan perkuburan masyarakat. Namun kegiatan ini terhenti sejak akhir tahun 2002 dan awal 2003, saat masyarakat dilarang oleh militer untuk bercocok tanam di Dusun Pantan Bayu dengan alasan suasana konflik. Masyarakat terpaksa tidak menggarap lagi tanah mereka itu. Masyarakat khawatir karena jika masuk ke Dusun Pantan Bayu mereka

akan dituduh memberikan makanan kepada GAM. Selain itu masyarakat juga dibatasi pasokan makanannya bila mau masuk ke Dusun Pantan Bayu.

Semenjak konflik terjadi, banyak rumah masyarakat Kuala Seumayam yang berada di pinggir pantai dibakar sehingga akhirnya mereka keluar dari Desa Kuala Seumayam untuk menyelamatkan diri dari peperangan. Hingga akhirnya tahun 2004, pasca tsunami, masyarakat direlokasi oleh Pemerintah Nagan Raya ke pemukiman sekarang yang luasnya hanya 1,5 hektare untuk 51 KK.

Saya memahami bahwa karena profesi masyarakat Kuala Seumayam adalah petani, wajarlah jika masyarakat mencoba untuk menggarap lagi lahan mereka di Dusun Pantan Bayu. Namun, pihak PT Kalista Alam tidak memperbolehkan lagi masyarakat masuk ke wilayah tersebut karena wilayah itu dianggap sebagai lahan HGU PT Kalista Alam.

Upaya untuk memperoleh kembali hak masyarakat atas tanah Dusun Pantan Bayu dimulai pada tanggal 12 April 2007, saat Keuchik Kuala Seumayam, Pak Muhammad, mengirimkan surat kepada Bupati Nagan Raya perihal pemberitahuan tanah desa yang telah ditanami kelapa sawit oleh PT Kalista Alam dan masyarakat ingin mengambil kembali tanahnya.

Respon atas surat yang dikirimkan oleh Keuchik Kuala Seumayam diterima pada tanggal 16 Agustus 2007. Bupati Nagan Raya mengirimkan surat kepada PT Kalista Alam perihal penundaan sementara penanaman baru atas tanah sengketa sambil menunggu proses penyelesaian lebih lanjut. Selanjutnya Bupati Nagan Raya

“  
...PT Kalista Alam  
telah  
mendatangkan  
Brimob untuk  
melakukan  
pengamanan aset  
mereka dan  
menakuti serta  
mengancam warga  
Kuala Seumayam  
”

membentuk Tim Pengembalian Batas Areal HGU PT Kalista Alam. Tim yang berdasarkan surat nomor 050/95/SK/2007 ini diketuai oleh M. Kasem Ibrahim. Kemudian tim ini melakukan pengukuran. Namun kemudian anggota tim pengukur tidak mengetahui kelanjutan dari hasil pengukuran yang telah dilakukannya.

Terdapat banyak kejanggalan dalam proses pengukuran, yaitu *pertama*: Sebelum tim pengukuran turun ke lokasi, masyarakat menemukan patok-patok sebagai pembatas lahan HGU PT Kalista Alam, padahal sebelumnya patok-patok tersebut tidak pernah ada. *Kedua*: Sampai saat ini banyak anggota tim pengukuran yang tidak mengetahui hasil pengukurannya. Bahkan anggota DPRK yang juga sebagai tim pengukuran tidak mengetahui hasil pengukurannya sampai sekarang.

Anehnya pada tanggal 4 Februari 2008, Bupati Nagan Raya mengirimkan surat kepada Direktur PT Kalista Alam perihal pelaksanaan kegiatan kebun PT Kalista Alam yang isinya memerintahkan perusahaan untuk kembali melaksanakan kegiatan di atas tanah yang dipersengketakan tersebut.

Persoalan ini dilaporkan oleh Keuchik Sumber Makmur pada tanggal 19 April 2008 melalui surat kepada Gubernur NAD perihal telah terjadinya penyerobotan tanah masyarakat oleh PT Kalista Alam. Surat itu direspon oleh gubernur pada tanggal 22 April 2008 dengan mengirimkan surat perintah kepada Bupati Nagan Raya agar meneliti izin lokasi PT Kalista Alam serta menyelesaikan persoalan konflik pertanahan yang terjadi antara PT Kalista Alam dengan masyarakat.

Menindaklanjuti hal ini masyarakat Desa Kuala Seumayam, pada tanggal 9 Juni 2008, hendak mengerjakan tanahnya kembali, namun digagalkan oleh Brimob. Pihak PT Kalista Alam telah mendatangkan Brimob untuk melakukan pengamanan aset mereka dan menakuti serta mengancam warga Kuala Seumayam.

Masyarakat ditakut-takuti bahwa yang laki-laki akan dibelah kepalanya lalu selanjutnya akan dibawa ke pos, sedangkan yang perempuan akan diborgol, apabila lahan tersebut tidak diberikan kepada pihak PT Kalista

Alam. Brimob juga mengatakan, “Jangan percaya lagi kepada Pak Camat dan Keuchik. Mereka makan suap.”

Atas persoalan itu, masyarakat Kuala Seumayam telah mengirimkan surat pengaduan kepada Camat Darul Makmur, Koramil Darul Makmur, dan Polsek Darul Makmur. Pada tanggal 31 Oktober 2008 pihak camat memanggil beberapa desa untuk melakukan musyawarah penetapan batas antara Abdya dengan Nagan Raya. Pihak camat berharap agar masyarakat seluruhnya, termasuk masyarakat Desa Kuala Seumayam, tetap mempertahankan batas alam di tengah sungai.

Pada hari Sabtu tanggal 1 November 2008 PT Kalista Alam mengerahkan 2 *becho* untuk mengeringkan dan mengerjakan lahan gambut seluas kurang lebih 60 hektare. Lahan tersebut sedianya akan digarap oleh masyarakat Desa Kuala Seumayam. Menurut pengakuan masyarakat, atas lahan tersebut pada tahun 1996 Keuchik Kuala Seumayam telah mengeluarkan surat keterangan tanah bagi masyarakat Kuala Seumayam untuk menjadi lahan pertaniannya. Namun PT Kalista Alam telah lebih dulu mengerjakan lahan tersebut. Dan, pada tanggal 2 November 2008, sudah dikerahkan Brimob oleh PT Kalista Alam di pintu masuk dan di areal lokasi pengerjaan lahan baru.

Pak Ali, saya memahami betapa masyarakat berharap kehidupan yang lebih baik dan negara menjalankan perannya dalam melindungi seluruh rakyatnya, termasuk sumber kehidupan yang lebih baik, hidup aman tanpa tekanan dari pihak lain. Dan saya melihat permintaan warga berikut ini terhadap pemerintah sangatlah wajar.

### **Beberapa Permintaan Masyarakat Desa Kuala Seumayam Terhadap Pemerintah:**

Pertama: Membebaskan lahan 4 hektare yang posisinya pas di depan gampong dari PT Kalista Alam untuk dijadikan lokasi pemakaman bagi masyarakat, karena saat ini tidak ada lahan untuk itu.

Kedua: Membangun akses jalan yang bagus dan tidak lagi melewati jalan PT Kalista Alam. Selama ini masyarakat Kuala Seumayam harus melewati jalan PT Kalista Alam karena cuma itu satu-satunya akses jalan menuju desa mereka. Akibatnya juga, walaupun ada pihak luar yang ingin memberi bantuan kepada masyarakat Kuala Seumanyam, maka pihak luar itu harus melapor dulu ke pihak perusahaan. Kalau pihak perusahaan tidak mengizinkan maka bantuannya tidak akan sampai ke Kuala Seumayam.

Ketiga: Menyediakan sarana Kesehatan (POLINDES). Sudah sepuluh tahun lamanya masyarakat Kuala Seumayam menempati desa mereka tapi belum juga mendapat sarana kesehatan apa pun.

Keempat: Menyediakan sarana pendidikan. Masyarakat Kuala Seumayam saat ini hanya memiliki sekolah dasar, itu pun sampai kelas 3 saja dan tidak ada guru tetapnya (PNS). Cuma tenaga pengajar honorer satu orang dan yang bantu-bantu, lulusan SMU, satu orang.

Kelima: Memetakan gampong. Sampai saat ini masyarakat Kuala Seumayam tidak memiliki peta yang menunjukkan luas dan batas gampong yang jelas.

Kami dari WALHI tidak dapat memastikan apakah semua permintaan masyarakat tersebut akan dipenuhi oleh pemerintah sebagai aparatur negara dalam mengurusinya, namun yang pasti kami akan selalu bersama Bapak dan warga Desa Kuala Seumayam dalam usaha mendapatkan hak sebagai warga negara yang merdeka dan berdaulat.

Semoga surat ini menambah semangat Bapak dan warga Desa Kuala Seumayam dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dirampas oleh perusahaan dan diabaikan oleh negara.

Salam,

**Muhammad Nur**

\_\_\_\_\_ *ttd*



KRISIS  
TAMBANG DAN PERKEBUNAN



BIOREGION  
PESISIR UTARA



PROVINSI  
NAD

ENAK-ENAK AJA KAU **RAMPAS** DAN  
**TUNJUK-TUNJUK** KAWASAN HUTAN,  
MEMANGNYA KAMI DIANGGAP APA?



**80%** ACEH SELATAN  
KAWASAN EKOSISTEM LEUSER  
SUAKA MARGASATWA RAWA SINGKIL

**72.990,4 Ha**  
PERKEBUNAN  
**62.967 Ha**  
PERTAMBANGAN



**10** PERUSAHAAN  
PERKEBUNAN



**ACEH:**

**enak-enak aja kau rampas dan  
tunjuk-tunjuk kawasan hutan,  
memangnya kami dianggap  
apa?**

---

**Kepada Yth,**

**Bapak Adi Samrida**

**(Koordinator Advokasi Perjuangan Masyarakat Troumon Raya)**

**Di Aceh Selatan**

Assalamualaikum Wr.Wb.,

Salam Hormat,

Semoga saat membaca surat ini Bapak dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam melakukan perjuangan melindungi hak masyarakat Troumon Raya.

“  
 ...calon lahan pengganti  
 atau tukar menukar  
 untuk penghutanan  
 kembali yang diajukan  
 oleh PT First Mujur  
 Plantation & Industry  
 Medan sebenarnya  
 adalah lahan  
 masyarakat dan lahan  
 yang di atasnya telah  
 diberikan izin untuk  
 perusahaan-  
 perusahaan lain  
 ”

Saya membaca dokumen tentang kasus yang terjadi di Aceh Selatan dimana sebuah kawasan yang melingkupi 4 kecamatan, yaitu Troumon, Troumon Tengah, Troumon Timur, dan Bakongan Timur ditunjuk sebagai kawasan areal pengganti (Tukar Menukar Penghutanan Kembali). Kawasan yang ditunjuk itu seluas ±11.187 hektare dan berada di luar kawasan hutan. Dasarnya adalah surat Bupati Aceh Selatan Nomor 522/1112 Tanggal 07 Oktober 2010 yang merekomendasikan kawasan ini sebagai kawasan pengganti untuk PT First Mujur Plantation & Industry yang membuka perkebunan kelapa sawit seluas 11.187 hektare di Provinsi Sumatera Utara.

Lebih awal lagi adalah Dokumen Hasil Telaahan Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Aceh Selatan Tanggal 28 Juni 2011 yang merupakan jawaban atas Surat Bupati Aceh Selatan Nomor 522.2/355/2011 tentang Permohonan Penerbitan Pertimbangan Teknis Pada Calon Areal Pengganti (Tukar Menukar dan Penghutanan Kembali) di Kabupaten Aceh Selatan seluas ±11.187 hektare di luar Kawasan Hutan yaitu Areal Penggunaan Lain (APL).

Dalam dokumen tersebut tercantum bahwa PT First Mujur Plantation & Industry ingin melakukan proses Tukar Menukar Lahan Pengganti Kawasan Hutan dan Rencana Reboisasi di Kabupaten Aceh Selatan seluas 11.187 hektare (Lokasi Blok I seluas 4.360 hektare dan Blok II seluas 6.827 hektare). Pada lokasi yang dimohonkan pada Blok II tersebut telah dikeluarkan izin lokasi oleh Bupati Aceh Selatan dan telah dikeluarkan

telaahan ketersediaan lahan untuk pembangunan kebun kelapa sawit oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan.

Saat kita baca lebih lanjut hasil analisis dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Selatan untuk Blok I seluas 4.360 hektare, ternyata di sebagian lokasi itu telah ada permohonan izin lokasi oleh PT Rimba Cahaya untuk IUP Pertambangan Bijih Besi seluas 191 hektare melalui surat nomor 266/RC/11-05 dan di Blok II seluas 6.827 hektare telah dikeluarkan izin lokasi seluas  $\pm 1.084$  hektare untuk 6 perusahaan perkebunan kelapa sawit (CV Agro Gemilang, CV Setia Fitri, CV Berlateh Jaya, PT Citra Pilar Mandiri, CV Sigantang Sira, dan PT Perkebunan Nusantara I Blok A) di Kecamatan Troumon Timur, dan telah dikeluarkan telaahan terkait ketersediaan lahan bagi 4 perusahaan perkebunan kelapa sawit lain lagi (CV Mitra Indah Perkasa, CV Pusaka, CV Khadafy Lida, dan CV Manggar Setia) seluas  $\pm 2.544$  hektare di Kecamatan Troumon Tengah. Lokasi Blok II itu ternyata juga merupakan areal yang dimohonkan oleh PT Bumi Agro Lestari, seluas 8.000 hektare, untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Di blok ini juga terdapat lokasi transmigrasi dan lahan garapan masyarakat seluas  $\pm 1.028$  hektare.

“  
...tidak ada dan tidak  
jelasnya tapal batas  
antara kawasan  
konservasi dan  
kawasan kelola rakyat  
akan berdampak pada  
justru rusaknya  
kawasan konservasi  
atau hilangnya ruang  
kelola rakyat  
”

Jadi bisa kita simpulkan dari berbagai telaahan ini bahwa calon lahan pengganti atau tukar menukar untuk penghutanan kembali yang diajukan oleh PT First Mujur Plantation & Industry Medan sebenarnya adalah lahan masyarakat dan lahan yang di atasnya telah diberikan izin untuk perusahaan-perusahaan lain. Nyata bahwa rencana tukar menukar itu akan merugikan banyak pihak di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya masyarakat Troumon Raya yang telah memiliki lahan tersebut secara turun temurun dari nenek moyangnya, sejak zaman Kerajaan Troumon dahulu.

Pak Adi Samrida yang baik,

Saya memahami kekhawatiran masyarakat Troumon Raya akan kehilangan lahan dan tanahnya akibat kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat ini. Di samping telah dikeluarkannya banyak izin untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan bagi perusahaan di Kabupaten Aceh Selatan, ada lagi yang terbaru itu, yang saat ini prosesnya sudah sampai pada surat rekomendasi Gubernur NAD dan Bupati Aceh Selatan untuk menjadikan 11.187 hektare lahan itu sebagai pengganti lahan perkebunan kelapa sawit yang dibuka di Provinsi Sumatera Utara.

Secara awam saja nampak tidak masuk di akal. Kawasan hutan yang dibuka dan dijadikan perkebunan kelapa sawit adalah di Sumatera Utara, akan tetapi lahan masyarakat Aceh Selatan yang terancam hilang untuk dijadikan kawasan hutan penggantinya.

Berikutnya, saya juga membaca surat keberatan dari masyarakat Troumon Raya yang menolak penetapan kawasan Suaka Margasatwa Rawa Singkil seluas 102.500 hektare yang berada di 3 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Sulubussalam, yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Kita tentu saja menghargai niat baik pemerintah untuk melindungi kawasan ini, kawasan gambut yang masih tersisa di dunia, sebagai kawasan konservasi untuk flora dan fauna endemik seperti Orang Utan, Harimau, dan Gajah. Namun tidak ada dan tidak jelasnya tapal batas antara kawasan konservasi dan kawasan kelola rakyat akan berdampak pada justru rusaknya kawasan konservasi atau hilangnya ruang kelola rakyat. Persoalan ini jika dibiarkan tentu akan memicu konflik ke depannya. Implikasinya nanti adalah penegakan hukum oleh negara dalam melindungi kawasan sehingga akan merugikan masyarakat lokal.

Pak Adi yang baik,

Saya juga sudah berdiskusi dengan Bapak Sarbunis terkait dengan persoalan yang saat ini Bapak hadapi bersama masyarakat Troumon Raya. Saya yakin Bapak mengenal beliau dengan sangat baik karena beliau juga merupakan putra Aceh Selatan yang juga Direktur Yayasan Gampong Hutan Lestari (YGHL), salah satu lembaga anggota WALHI Aceh. Beliau

menjelaskan dengan sangat detail pada saya terkait persoalan ini dan langkah perjuangan apa saja yang telah dilakukan bersama-sama dengan HMI, HIPMI, WALHI Aceh, dan masyarakat Aceh Selatan untuk melindungi lahan masyarakat.

Pak Sarbunis menyatakan, "*Jangan ada lagi tukar guling lahan masyarakat untuk kepentingan perusahaan atau negara.*" Sudah jelas bahwa secara topografis 63,45% kawasan Aceh Selatan merupakan daerah yang memiliki kemiringan curam atau terjal yang tidak dapat dibudidayakan oleh masyarakat.

Hampir 80% dari wilayah kabupaten ini adalah kawasan hutan yang meliputi Kawasan Ekosistem Leuser dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Saat ini di Kabupaten Aceh Selatan hanya terdapat 19% dari luas wilayah yang berupa Areal Penggunaan Lain (APL). Artinya, dari total luas wilayah 3.841,60 Km<sup>2</sup>/384.160 hektare, hanya 72.990,4 hektare yang adalah kawasan APL. Dari seluruh kawasan APL itu, 12.120 hektarenya sudah jadi perkebunan kelapa sawit dan di 11.628 hektare lagi telah dikeluarkan izin lokasi dan telaahan ketersediaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit bagi 10 perusahaan.

Di lain pihak, data WALHI Aceh menunjukkan bahwa di Kabupaten Aceh Selatan terdapat usaha pertambangan yang menggunakan lahan seluas 62.967 hektare. Sebagian besar dari lahan pertambangan itu berada di dalam kawasan hutan lindung dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Jadi memang semua data dan informasi ini menunjukkan bahwa hanya tersedia sedikit ruang bagi masyarakat untuk dijadikan kawasan pemukiman dan kawasan budidaya pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi masyarakat.

Jika kita melihat tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Selatan yang 2,5% per tahun dengan jumlah penduduk tahun 2012 sejumlah 208.002 jiwa, seharusnya Aceh Selatan memiliki kawasan budidaya setidaknya 22-25% dari total luas wilayah kabupaten. Yang terjadi malahan sebaliknya. Kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh pemerintah bukannya memperluas akan tetapi malah mempersempit kawasan budidaya, yaitu jika wilayah ini ditetapkan sebagai kawasan pengganti untuk penghutan kembali.

Pak Adi, saya memahami bahwa perjuangan yang akan Bapak jalani masih akan sangat panjang. Banyak hal telah Bapak lakukan bersama masyarakat untuk mempertahankan wilayah ini, mulai dari membangun kekuatan bersama masyarakat, melakukan *hearing* ke DPRK Aceh Selatan, menemui berbagai dinas dan instansi terkait di Kabupaten Aceh Selatan dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, mengirim surat kepada Bupati Aceh Selatan, dan melakukan kampanye melalui media, membangun jaringan dengan LSM dan Organisasi Masyarakat Sipil yang ada di kabupaten dan Provinsi NAD.

Meskipun sudah melakukan seluruh upaya itu, dugaan berdasar hasil analisis kawan-kawan di Yayasan Gampong Hutan Lestari (YGHL) dan WALHI Aceh adalah bahwa kemungkinan besar izin penetapan kawasan pengganti untuk penghutanan kembali yang diminta oleh PT First Mujur Plantation & Industry Medan di Kabupaten Aceh Selatan akan tetap dikeluarkan. Salah satu indikasinya adalah informasi bahwa beberapa anggota DPRK Aceh Selatan pernah diundang oleh perusahaan untuk rapat membahas hal ini di Kota Medan, Sumatera Utara, dan upaya Kementerian Kehutanan menekan pemerintah daerah untuk segera merealisasikan pemberian izin untuk tukar menukar lahan ini.

Jelaslah bahwa langkah masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi terkait dengan proses administrasi perizinan ini sangat tepat, juga upaya di lapangan untuk mengawasi lahan yang direkomendasikan oleh Bupati dan Gubernur itu. Kita harus memastikan tidak ada aktivitas pengukuran lahan oleh pihak mana pun tanpa pengawasan dari masyarakat.

Kita menghargai komitmen beberapa anggota DPRK Aceh Selatan yang mendukung perjuangan rakyat dan ikut mempertanyakan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Selatan serta ikut mendesak Gubernur NAD agar segera mencabut surat rekomendasi yang telah dikeluarkan untuk PT First Mujur Plantation & Industry Medan.

Sungguh mengecewakan bahwa Bupati dan Gubernur malahan menjawab bahwa surat rekomendasi-surat rekomendasi itu dikeluarkan oleh Bupati Aceh Selatan dan Gubernur NAD periode sebelumnya. Karena itu kita masih harus berjuang memastikan lahan kita aman untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan keturunan kita di masa depan.

Berdasarkan Catatan WALHI Aceh, dari 134 perusahaan yang membuka usaha di Aceh, yang menguasai 381.000 hektare lahan, hampir 98%nya berkantor di Kota Medan, Sumatera Utara. Ini tentu persoalan bagi Aceh, sumber daya dan lahannya dikuasai oleh perusahaan yang berasal dari luar Aceh. Seharusnya Pemerintah Provinsi NAD tegas dan memastikan semua perusahaan itu membuka kantor di Aceh. Hal ini penting untuk memastikan sejauh mana kegiatan usaha ini menyumbang pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat Aceh.

Bapak Adi,

Demikian surat ini saya buat untuk Bapak dan warga yang terancam kehilangan lahan. Tukar menukar lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit ini adalah petunjuk nyata berkuasanya kepentingan industri dan investasi di atas keselamatan warga di Aceh pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Semoga surat ini menjadi refleksi bagi perjuangan masyarakat Troumon Raya, Aceh Selatan dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat adat yang lahannya terancam oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Terima Kasih.

Salam,

**Muhammad Nur**

\_\_\_\_\_ *ttd*



KRISIS  
TANAH DAN PERAMPASAN LAHAN



BIOREGION  
PESISIR SELATAN



PROVINSI  
BENGKULU

## ADAKAH HARAPAN KEHIDUPAN DARI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERTUA DI BENGKULU?



**49** BENGKULU  
PERUSAHAAN KELAPA SAWIT



# **BENGKULU:**

## **adakah harapan kehidupan dari perkebunan kelapa sawit tertua?**

---

**Kepada:**

**Ibu Yus**

**di Desa Pring Baru, Kecamatan Talo Kecil,**

**Kabupaten Seluma**

**Bengkulu**

Ibu yang saya hormati dan kasihi,

Apa kabar? Semoga surat ini sampai ke tangan Ibu yang sedang dalam keadaan sehat dan wal afiat. Harapan keselamatan juga saya doakan untuk keenam anak Ibu, semoga semua sehat dan bahagia, terus berbakti kepada ibu dan almarhum ayah mereka.

Saya menulis surat ini karena saya dan teman-teman merasakan adanya sebuah dorongan yang sangat besar untuk menyampaikan kepada Ibu, juga beberapa kenalan dan sahabat di berbagai tempat di Sumatera, pandangan-pandangan, temuan, dan keresahan kami tentang krisis kehidupan yang Ibu rasakan saat ini. Saya juga ingin berbagi beberapa siasat yang mungkin bisa sama-sama kita upayakan untuk menjaga kehidupan kita.

Ibu terkasih,

Sudah lama kita dengar bahwa kelapa sawit adalah primadona di negara kita ini. Alasan yang selalu didengung-dengungkan adalah untuk menyejahterakan rakyat. Artinya untuk kesejahteraan Ibu juga yang adalah bagian dari rakyat.

“  
Betapa tidak adilnya akses terhadap tanah. Ibu Yus dipaksa menyerahkan tanahnya yang masih tersisa hanya 1,5 hektar kepada perusahaan kelapa sawit tertua di Bengkulu, PTPN VII  
”

Dengan alasan itu provinsi kita, Bengkulu, telah menyerahkan tanah kurang lebih seluas 208.546 hektare kepada 49 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 79 perusahaan pertambangan. Artinya, kalau dirata-rata, masing-masing perusahaan itu mendapat tanah lebih dari 1.000 hektare. Ini berarti pula masing-masing perusahaan itu memiliki tanah 670 kali lebih banyak daripada Ibu yang saat ini tersisa hanya 1,5 hektare. Enam ratus tujuh kali lebih luas.

Sudah demikian, Ibu bahkan harus mengalami yang paling tragis dari semuanya, yaitu dipaksa menyerahkan yang hanya 1,5 hektare itu kepada perusahaan kelapa sawit tertua di provinsi kita, PTPN VII.

Ibu, perampasan tanah ini semakin memperdalam jurang ketidakadilan. Ini sangat KONTRAS, bukan Komisi Nasional Anti Kekerasan, lho....tapi justru kebalikannya.... Penuh Kekerasan.

Dari 121 perusahaan penguasa tanah di provinsi yang kita cintai ini, ada 10 perusahaan dengan penguasaan tanah terbesar, yaitu PT Desaria Plantion Mining, PT Dinamika Selaras Jaya, PT Ciptamas Bumi Selaras, dan PT Sepang Makmur Perkasa di Kabupaten Kaur. Di Kabupaten

Muko-Muko ada Group Sipef (PT Agro Muko, PT Mukomuko Agro), PT Agrecinal, dan PT Sapta Sentosa Jaya Abadi. Kemudian ada PT Sandabi Indah Lestari yang berada di dua kabupaten, yaitu Bengkulu Utara dan Seluma, dan PT Mutiara Sawit Seluma di Kabupaten Seluma. Sepuluh perusahaan tadi adalah yang di perkebunan kelapa sawit. Sedangkan yang di pertambangan, 10 perusahaan yang paling banyak menguasai tanah negara, istilahnya konsesi, adalah Group Fine Wealthy Limited (PT Famiaterdio Nagara, PT Faminglevto Bakti Abadi, PT Benjana Inti Alam) di Kabupaten Seluma. Di Kabupaten

Kaur ada PT Asia Hamilton Resources, PT Bumi Hamilton Resources, PT Berangas Prima South, PT Maha Bara Karya, dan PT Bukit Resources. Kemudian ada Group Firman Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara.

Nah, ini yang lebih menyakitkan. Tahukah Ibu bahwa 121 perusahaan yang ada di provinsi kita tersebut ternyata hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Hanya 10 orang saja. Nama-nama konglomerat penguasa tanah di provinsi kita adalah: Kusuma Lingga Wijaya, Denny, Matthew T. Adams, Sukardi, Rudi Rahmad Kurniadi, Tri Boewono, Sonny Adnan, Taufik Djaunadi, Dani Harno Wijoyo, dan M. Yasin. Mereka inilah yang bisa kita bilang sebagai 10 konglomerat pemilik konsesi terbanyak di provinsi kita. Sebagian besar dari nama-nama itu ternyata juga adalah nama yang muncul sebagai rekanan dari pemilik modal asing.

Persis seperti yang Ibu alami, semua masyarakat yang langsung bersentuhan dengan deretan perusahaan dan nama-nama konglomerat ini mengalami kekerasan dan perampasan tanah. Mereka juga harus berjuang mempertahankan tanahnya. Termasuk kenalan saya juga, Ibu

“  
...semua masyarakat  
yang langsung  
bersentuhan dengan  
deretan perusahaan  
dan nama-nama  
konglomerat ini  
mengalami  
kekerasan dan  
perampasan tanah  
”

Fatma, seorang janda yang berasal dari Desa Lunjuk yang sekabupaten dengan Ibu. Semua harus berjuang setiap saat, terus melakukan perlawanan, agar sisa tanahnya tidak digusur habis oleh perusahaan kelapa sawit.

Nyata sekali juga bahwa perusahaan-perusahaan dan konglomerat-konglomerat itu, bersama dengan pemerintah kita sendiri, yang selama ini telah membentuk opini menyesatkan, kasarnya menipu, Ibu dan ibu-ibu lainnya, juga bapak-bapak dan semua orang, bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit akan membawa keberkahan. Ternyata seperti yang Ibu alami sendiri, BUKAN KEBERKAHAN tapi KEHANCURAN.

Memang benar, perkebunan kelapa sawit membawa kekayaan melimpah ruah, tapi untuk perusahaan-perusahaan dan konglomerat-konglomerat itu, bukan untuk Ibu dan warga masyarakat. Apa lah daya Ibu dan ibu-ibu lainnya yang hanya masyarakat biasa yang saat ini mengalami bahwa ternyata janji-janji di awal dahulu dari pihak perusahaan ternyata palsu, bahkan harus rela terkena imbasnya.

Kenyataannya adalah hilangnya tanah Ibu.

Akibatnya adalah lunturnya nilai-nilai sosial di kampung Ibu, dimana dulu sangat tolong-menolong sekarang semuanya diadu-domba, masing-masing berusaha mencari kesalahan sesama orang kampung demi mendapatkan imbalan dari perusahaan kelapa sawit.

Buktinya sekarang Ibu dan orang-orang di kampung Ibu harus rela menjadi buruh di tanah sendiri.

Ibu Yus terkasih,

Sekarang Ibu dan warga kampung Ibu sudah tahu langsung dan merasakan sendiri betapa dahsyatnya dampak atau imbas perkebunan kelapa sawit ini atas keberlangsungan hidup. Bahkan, hanya untuk bertahan hidup, ada warga kampung Ibu yang harus mencuri buah sawit perusahaan dengan konsekuensi dikejar-kejar oleh keamanan perusahaan. Hanya untuk mencari cara bertahan hidup! Sebab tidak lagi memiliki tanah sedangkan, sebagaimana ibu sendiri paham, kultur kita sejak zaman dahulu dan diturunkan secara turun menurun adalah bercocok tanam dan mengolah tanah sebagai orang merdeka, bukan sebagai buruh seperti sekarang ini.

Saya harus menyampaikan pendapat saya bahwa hadirnya perkebunan kelapa sawit skala besar sebenarnya mengambil hak untuk hidup bagi masyarakat petani kita di Bengkulu. Salah satunya adalah karena daya tahan masyarakat kita sesungguhnya memang tidak untuk menghadapi peraturan-perundangan dan berbagai kebijakan pemerintah untuk perluasan-perluasan atau ekspansi perkebunan.

“  
...obor yang menyala,  
penanda bahwa  
warga masyarakat  
lokal yang notabene-  
nya adalah  
masyarakat  
pedalaman, orang  
biasa, atau  
masyarakat adat,  
janganlah selalu  
diidentikkan sebagai  
masyarakat yang  
jauh dari akses  
informasi dan tidak  
mengerti apa-apa

”

Peraturan-perundangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah itu jelas sekali menganggap atau membuat masyarakat seolah-olah tidak memiliki apa-apa. Tidak ada atau tidak punya apa-apa. Itulah akar musabab banyaknya pelanggaran kemanusiaan dan kekerasan, bukan hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan ekonomi, di lokasi sekitar HGU (Hak Guna Usaha untuk perkebunan atau penyerahan penguasaan tanah kepada perusahaan). Lha wong manusianya dianggap tidak ada atau tidak memiliki apa-apa....!!!

Sudah sangat wajar keterjepitan ini memaksa almarhum suami Ibu dahulu dan Ibu teruskan sampai sekarang tergugah dan menentang, menolak keras adanya perkebunan sawit. Bukan hanya almarhum dan Ibu yang secara lantang berusaha melawan. Banyak juga ternyata yang sekarang-sekarang ini baru tahu keadaan sebenarnya dan kemudian menentang pengadaan perkebunan sawit besar-besaran.

Ini juga salah satu sebab saya menulis surat ini ke Ibu. Supaya tertulis lah apa yang saya dengar dan amati dari Ibu, yaitu pengalaman Ibu yang dahulu mungkin minim pengetahuan tentang dampak perkebunan kelapa sawit, kemudian mengalami sendiri, dan berjuang melakukan perlawanan untuk bertahan hidup.

Ibu adalah salah satu obor yang menyala, penanda bahwa warga masyarakat lokal yang notabene-nya adalah masyarakat pedalaman, orang biasa, atau masyarakat adat, tidak lagi boleh selalu diidentikkan sebagai masyarakat yang jauh dari akses informasi dan tidak mengerti apa-apa.

Ibu Yus,

Kalau di atas tadi saya bercerita tentang luasnya tanah yang diserahkan penguasaannya kepada segelintir perusahaan dan konglomerat, kali ini saya ingin memberi perbandingan dengan tanah yang diolah oleh masyarakat seperti Ibu dan warga lainnya.

Dari luas Provinsi Bengkulu yang 1.987.870 hektare, tanah yang disediakan oleh negara untuk diolah oleh Ibu dan semua warga

masyarakat hanya 141.283 hektare. Jumlah inilah yang harus Ibu berbagi dengan hampir 2 juta jiwa penduduk provinsi kita ini. Pantaslah tanah Ibu hanya 1,5 hektare dan terancam hilang karena angka-angka ini berarti rata-rata hanya tersedia tanah 0,07 hektare per jiwa. Bagaimana manusia bisa hidup dengan tanah sekecil itu? Bagaimana Ibu bisa menghidupi 6 anak Ibu dengan tanah sesedikit itu....?

Saya yakin pasti tidak akan bisa. Padahal kita tahu bahwa negara kita ini bukan diamanatkan untuk menelantarkan rakyatnya....bukan agar rakyatnya harus berdarah-darah berjuang untuk mendapatkan tanah.

Ibu tentu sepakat bahwa sudah selayaknya pemerintah kita menjalankan amanat sesungguhnya Undang Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun bangsa demi terciptanya rakyat sejahtera. Apabila rakyat sejahtera, pasti bangsa akan sejahtera juga.

Bukan malah sebaliknya yang dilakukan negara kita, seperti yang Ibu Yus sendiri dan orang-orang di kampung Ibu alami, yaitu harus berhadapan dengan PTPN VII Unit Talo Pino. PTPN VII ini adalah Perseroan Terbatas Perkebunan Negara yang adalah salah satu perkebunan kelapa sawit tertua di Bengkulu. Milik Negara akan tetapi telah memberikan contoh terburuk tentang bagaimana cara memanfaatkan aparatur negara untuk menguasai tanah serta menyingkirkan Ibu Yus dan warga kampung Ibu. Ini adalah contoh terburuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kriminalisasi oleh PTPN VII terhadap warga yang mempertahankan tanahnya. Perusahaan ini, juga biasanya perusahaan-perusahaan lain, kemudian menutup semua itu dengan praktik ganti rugi setelah penggusuran paksa. Inilah standar operasi perusahaan-perusahaan negara dan swasta di Bengkulu dalam melegitimasi penguasaan atas tanah.

Ibu terkasih,

Kalau saya sekadar geram, Ibu dan warga di kampung Ibu menderita dan marah. Aparat negara yang seharusnya melindungi dan melayani

Ibu dan warga, malah di tahun 2010 memenjarakan 20 warga kampung Ibu sekaligus. Mereka adalah Dwi Nanto, Firmansyah, Palki, Nahadin, dan Aldin yang menjadi tersangka utama, kemudian Didin, Sirman, Tahwin, Wahidi, Walana, Limi, Yoyon, Paiman, Badran, Tasir, Baidi, Tahardin, Ikwan, Ari Wibowo, dan Yuyun menjadi tersangka ikutan. Secara langsung ini menghilangkan mata pencarian puluhan keluarga, bahkan memutus sekolah anak-anak di kampung sekitar perkebunan.

Hormat takzim saya untuk Ibu yang adalah salah satu korban itu, yang kemudian harus menghadapi tragedi digusurnya kuburan suami Ibu di sela-sela pohon kelapa sawit yang dulu Ibu tanam dengan suami Ibu. Ibu juga yang harus menjadi buruh harian di PTPN VI padahal tanah perkebunan itu sebenarnya adalah kebun Ibu sendiri warisan dari suami. Dan Ibu harus merelakan 6 anak ibu yang masih belia terpaksa berhenti sekolah karena tidak satu pun yang dapat dibiayai dari gaji harian Ibu di PTPN.

Ibu Yus,

Di seluruh masalah dan upaya bertahan hidup Ibu sekeluarga, **maap** saya belum bisa membantu apa pun. Sedangkan Negara kita yang telah menciptakan situasi seperti ini, menciptakan janda-janda yang tak berdaya, dan dari janda-janda itu lahir buruh-buruh murah untuk perusahaan-perusahaan dan konglomerat-konglomerat, sebagaimana skenario mereka, bahkan minta **maap** pun tidak.

Kalau Ibu tidak bisa membalas surat ini, moga-moga suatu saat ada kesempatan saya untuk berkunjung dan mendengarkan langsung dari Ibu yang saya hormati dan kasih.

Bengkulu, April 2015

**Beni Ardiansyah**

\_\_\_\_\_ *ttd*



KRISIS IDENTITAS DAN SOSIAL-BUDAYA



BIOREGION PESIR TIMUR



PROVINSI LAMPUNG

# KONFLIK DAN KRIMINALITAS DEMI PERTUMBUHAN EKONOMI

## PERTUMBUHAN EKONOMI LAMPUNG



**14,39%**

Termasuk dalam 11 provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi se Indonesia



**5.242** kasus Kriminal yang terjadi

KESenjangan EKONOMI YANG TINGGI

# LAMPUNG:

## konflik dan kriminalitas demi pertumbuhan ekonomi

---

Kepada Yth.

Bapak Sebut Saja A

Tokoh masyarakat di sebuah desa di Kabupaten Mesuji,  
Lampung

Bapak Sebut Saja A yang baik,

Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Rizani, saat ini bekerja di Yayasan MITRA BENTALA, Lampung.

Mungkin Bapak heran menerima surat saya ini, karena tentu Bapak tidak mengenal atau ingat saya. Rasanya baru sekali saya jumpa dengan Bapak dan pertemuan itu pun sangat singkat. Waktu itu saya juga tidak sempat memperkenalkan diri dan berbincang dengan Bapak. Pertemuan singkat tersebut terjadi di Kantor WALHI Lampung.

Pada saat itu Bapak sedang serius sekali memperbincangkan dengan Direktur WALHI Lampung, Bapak Hendrawan, persoalan yang sedang Bapak dan warga alami. Masalah yang terbesar adalah karena Bapak akan dikriminalkan. Saya sangat miris mendengarnya, yaitu bahwa upaya warga masyarakat meminta hak-haknya atas tanah kelahirannya sendiri ternyata harus berhadapan dengan persoalan hukum dan dianggap sebagai pencurian.

Kini Bapak harus hidup dalam pelarian, tidak menyerah pada kriminalisasi yang sedang Bapak hadapi.

Bapak,

Masih teringat oleh saya kejadian yang sangat menghebohkan di tahun 2011, yaitu konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan terkait dengan sengketa lahan. Kejadian tersebut juga berlanjut dengan perkelahian yang sangat sadis antara warga Bapak dengan aparat keamanan perusahaan yang sampai menimbulkan korban jiwa. Kejadian tersebut sempat menjadi pemberitaan dan perbincangan yang sangat hangat, bukan saja di media lokal akan tetapi sampai ke media nasional. Salah satu stasiun TV swasta sempat menyiarkan kejadian tersebut. Kemudian ada *hearing* atau dengar pendapat dari perwakilan masyarakat dengan anggota DPR RI tentang asal mula kejadian yang sebenarnya.

Kejadian tersebut berawal dari ketidakjelasan batas tanah warga Bapak dengan batas yang diklaim oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ketidakjelasan dan kejadian saling klaim hasil dari perkebunan sawit tersebut sudah terjadi bertahun-tahun lamanya dan akan terus terjadi jika kita tidak mampu mendeteksi apa yang menjadi dasar penyebab kejadian tersebut.

Saya selaku orang luar melihat bahwa persoalan tersebut muncul oleh karena hilangnya tanah-tanah warga Bapak yang selama ini menjadi sumber penghasil pendapatan untuk menyambung hidup. Banyak tanah warga masyarakat yang dijual kepada perusahaan perkebunan tersebut. Yang tergambar dalam pikiran kita pada umumnya dan warga Bapak pada khususnya tentunya adalah bahwa keberadaan suatu perusahaan akan meningkatkan kesejahteraan bagi kita yang berada di sekitar areal perusahaan. Juga bahwa akan ada banyak pemuda-pemudi yang bekerja yang berarti tingkat pengangguran akan semakin berkurang. Pemerintah akan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dari beroperasinya perusahaan, kemudian jalan-jalan di wilayah sekitar perusahaan akan semakin baik. Dan pada akhir

ceritanya, selesailah masalah-masalah klasik kemiskinan. Kita akan semakin makmur, hidup tentram, damai di negeri tercinta ini.

Gambaran kesejahteraan dan kemakmuran yang akan didapat dengan industrialisasi sektor perkebunan tersebut tak lain adalah pandangan dan cara berpikir pemerintah daerah. Sektor perkebunan menjadi sumber penghasilan daerah dan visi utamanya adalah menggerakkan pembangunan dengan hasil yang didapat melalui pajak untuk pada akhirnya menopang kemakmuran bersama. Perluasan sektor perkebunan akan menjadi maksimal dengan dijadikannya lahan-lahan tidak produktif menjadi lahan perkebunan, lahan-lahan yang tidak bertuan dijadikan areal konsesi bagi perusahaan-perusahaan, dan bahkan kawasan register yang konon berfungsi sebagai wilayah lindung juga diberikan pengelolaannya kepada perusahaan-perusahaan.

Padahal, kalau kita mau berpikir secara objektif tentu akan menemukan bahwa di wilayah register banyak terdapat warga yang selama ini mendiami dan mengelola lahan. Akan tetapi kenyataannya mereka dianggap perambah dan semua aktivitas yang dilakukan dianggap ilegal. Kata-kata

ilegal ini membuat kami miris mendengarnya. Hanya untuk bertahan hidup, kita akan dihadapkan kepada proses hukum dimana kalau kita tidak memiliki pengacara yang hebat, dalam 1 jam pemeriksaan saja kita akan langsung ditetapkan sebagai tersangka.

“

...perusahaan yang diharapkan memberikan dampak positif bagi laju pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Lampung menjadi sebab dan pelaku konflik yang sedemikian hebatnya dengan warga masyarakat...

”

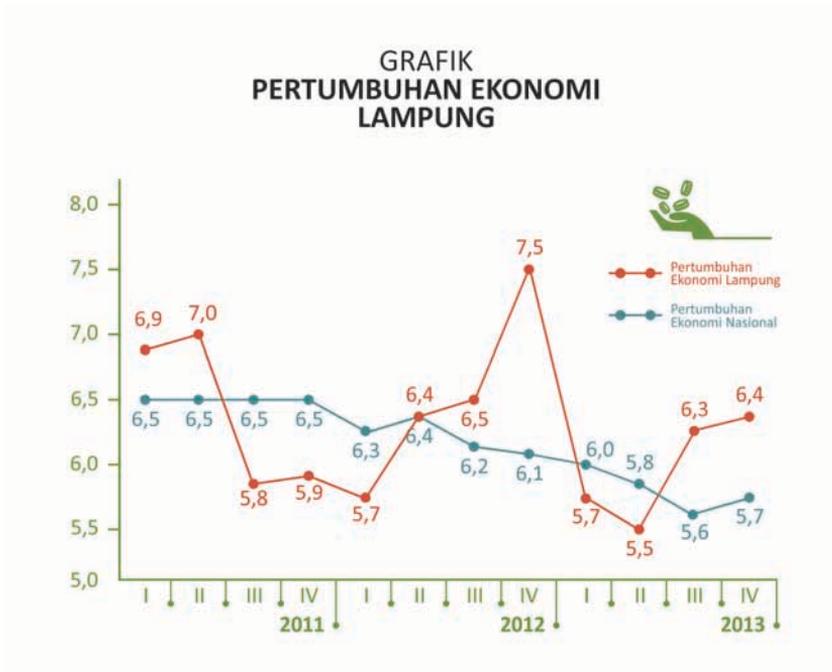
Itulah cerita-cerita singkat yang saya rangkum dari apa yang saya alami, lihat, dan dengar dari teman-teman aktivis lingkungan. Tentu banyak cerita lainnya yang Bapak alami sendiri secara langsung yang tidak mampu saya ceritakan di sini.

Sekadar pencerahan saja, saya akan bercerita kenapa pemerintah memberikan keleluasaan pengelolaan lahan untuk industri perkebunan besar. Salah satu teorinya adalah bahwa adanya perusahaan perkebunan berskala besar tentunya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah kita, Lampung. Istilah laju pertumbuhan ekonomi di masyarakat kita adalah sebuah istilah yang baru atau masih asing, ekstrimnya orang kampung bilang bahasa dari luar, yang kadang kita sulit untuk memahaminya. Katanya **pertumbuhan ekonomi** adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Katanya pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah. Katanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Jadi mungkin sekarang kita dapat sedikit pahami kenapa pemerintah daerah begitu berhasrat membuka seluas-luasnya, memberikan akses sebesar-besarnya, untuk perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar. Di atas kertas nampaknya mudah sekali menghitung capaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ini.

Pak Sebut Saja A,

Menurut catatan yang saya dapatkan, pertumbuhan ekonomi Lampung dalam tiga tahun terakhir ini mengalami percepatan. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6.53%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2012 itu pertumbuhan ekonomi Lampung bahkan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 6,26%. Menurut catatan itu juga, laju pertumbuhan ekonomi Lampung meningkat terus dari tahun ke tahun.



Penyumbang terbesar percepatan laju pertumbuhan ekonomi di Lampung ini adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, yaitu 35,90%, kemudian perdagangan, hotel dan restoran 15,85%, industri pengolahan 15,54%, kemudian pengangkutan dan komunikasi 11,53%. Kemudian sektor jasa 9,10%, sektor listrik, gas, dan air bersih 0,55%.

Melihat dari data ini, nampaknya sektor perkebunan belum menjadi komponen penting dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi Lampung. Padahal banyak sekali perusahaan perkebunan besar yang ada di provinsi ini.

Padahal juga kita telah ketahui bahwa banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari keberadaan perusahaan perkebunan, di antaranya yang terjadi di tiga desa (Sri Tanjung, Nipah Kuning, dan Kagungan Dalam). Dalam dokumen yang ada dan saya

baca di WALHI Lampung tercatat bahwa salah satu perusahaan, PT BSMI, yang telah beroperasi selama 17 tahun ternyata masih menimbulkan permasalahan dengan sistem plasma yang pernah dijanjikannya. Padahal lahan pencadangan yang disiapkan seluas 7.000 hektare dari 17.000 hektare area perkebunan yang dikuasai perusahaan tersebut. Belum lagi proses ganti rugi lahan yang kabarnya hanya setengahnya yang telah mendapat ganti rugi.

Ini sungguh ironis. Keberadaan perusahaan yang diharapkan memberikan dampak positif bagi laju pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Lampung ternyata masih menyisihkan persoalan yang sangat sulit untuk diselesaikan dan bahkan sebab dan pelaku konflik yang sedemikian hebatnya dengan warga masyarakat, termasuk dengan Bapak sendiri dan rekan-rekan Bapak yang telah menjadi korban.

Pak Sebut Saja A,

Bapak tidak sendiri. Banyak masyarakat yang telah menjadi korban penangkapan akibat dari 'pencurian' sawit sebagaimana tuduhan perusahaan. Banyak sekali. Nampaknya ini pula salah satu yang menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas di Provinsi Lampung, yaitu 2.542 kasus di tahun 2013 menurut data BPS.

Selain semakin parahnya kriminalitas, ternyata provinsi kita juga tak pernah lepas dari ketertinggalan atau kemiskinan. Saya memperoleh data dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang menunjukkan bahwa di Lampung masih ada empat kabupaten dalam dampungan KPDT, artinya termasuk dalam kategori daerah tertinggal.

Dalam hal ini memang Lampung tidak sendiri. Di seluruh Pulau Sumatera masih terdapat 46 kabupaten tertinggal dampingan KPDT. Empat di antaranya adalah di Lampung, yakni Lampung Barat, Lampung Utara, Way Kanan, dan Pesawaran.<sup>1</sup>

Masih berkaitan dengan ketertinggalan adalah informasi tentang kemiskinan. Statistik kemiskinan September 2013 menyebutkan bahwa angka kemiskinan Lampung adalah di peringkat 11 tertinggi dari 33 provinsi se-Indonesia. Artinya, di seluruh Indonesia hanya ada 10 provinsi yang lebih miskin dibanding Lampung.

Lampung juga adalah 3 dari 10 provinsi di Sumatera yang angka kemiskinannya berada di atas rerata nasional. Rerata angka kemiskinan nasional adalah 11,47. Angka kemiskinan Lampung adalah 14,39. Artinya, Lampung lebih miskin dibanding rata-rata kemiskinan nasional.

Kalau dari segi jumlah, statistik menyatakan bahwa jumlah orang miskin di Lampung pada tahun 2013 adalah 114.439 ribu jiwa. Moga-moga Pak Sebut Saja A tidak termasuk dalam angka statistik itu ya he he he...

Angka-angka kriminalitas, ketertinggalan, dan kemiskinan yang coba saya uraikan di atas jelas kontradiktif dengan teori indah tentang perkebunan-perkebunan besar dan pertumbuhan ekonomi Lampung. Apalagi kalau kita memperhatikan juga bahwa ternyata target PAD Provinsi Lampung tahun 2012 sebesar 1,8 trilyun ternyata jauh dari tercapai....hanya 1,7 trilyun PAD tahun 2012 itu!

“  
...kita akan susah,  
akan terpinggirkan,  
akan dikriminalkan  
kalau urusannya  
adalah tentang  
akses atas tanah

”

---

<sup>1</sup> (<http://www.kemeneqpd.t.go.id/hal/300027/183-kab-daerah-tertinggal>)

Pak Sebut Saja A,

Pada akhirnya Bapak akan seperti saya mempertanyakan tentang teori indah di balik semua angka-angka itu. Betulkah semua itu membawa Provinsi Lampung menjadi semakin baik?

Inilah refleksi saya dan barangkali juga kita semua, terutama Bapak dan warga masyarakat. Bapak lah yang mengalami sendiri kenyataan miris dari teori indah perkebunan besar, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu saya sepenuhnya sependapat dengan Bapak bahwa tidak semestinya kita memberikan tanah-tanah kita hanya karena iming-iming sedikit uang dan teori-janji indah akan menyajahterakan kita. Justru lebih luas lagi, barangkali Bapak bisa menyebarluaskan pemahaman kepada warga masyarakat bahwa kita akan susah, akan terpinggirkan, akan dikriminalkan mana kala kita tidak memiliki akses atas tanah.

Lebih parah lagi, persoalan tanah ini akan memunculkan permusuhan antar warga akibat saling klaim. Tentunya kita ingat Sdr. Rano Karno dan sdr. Jailani, korban dan para kepala keluarga yang mati terbunuh, meninggalkan istri dan anak tercinta, karena persoalan tanah.

Oleh karena itu, Pak Sebut Saja A, pesan saya jika ada orang yang bergaya perlente, yang bermobil, yang mengajak Bapak untuk sekadar ngobrol dengan membawa Bapak ke tempat-tempat mewah dengan

fasilitas yang lengkap, hati-hatilah! Bapak harus curigai bahwa itu semua adalah sebagai bentuk pendekatan (lobi) dan taktik orang-orang yang ingin menguasai tanah-tanah kita.

Lampung, April 2015

**Rizani**

*Atd*

## SIASAT MENGENALI MAKELAR DAN CALO TANAH



Jika ada orang yang bergaya perlente, yang bermobil, yang mengajak Bapak untuk sekedar ngobrol dengan membawa Bapak ke tempat-tempat mewah dengan fasilitas yang lengkap, hati-hatilah! Bapak harus curigai bahwa itu semua adalah sebagai bentuk pendekatan (lobi) dan taktik orang-orang yang ingin menguasai tanah-tanah kita.

Jangan menandatangani absen dengan judul yang tidak jelas, karena bisa jadi dipakai untuk merekayasa persetujuan. Juga berhati-hatilah dalam menandatangani perjanjian yang menggunakan kata-kata yang bersayap.



## INVESTASI RAKUS RUANG ANCAMAN KESELAMATAN WARGA

Kawasan Hutan

**1,25 juta ha**



**0,99%**

12.000 Ha.

Hutan Kemasyarakatan



**70%**

Proyek Restorasi Ekosistem  
oleh Industri Kertas & Perkebunan



# RIAU:

## investasi rakus ruang ancaman keselamatan warga

---

**Kepada Bang Edi dan teman-teman di Segamai dan Serapung,**

Aku berharap kita semua dalam keadaan sehat dan teman-teman di Segamai-Serapung tetap semangat berjuang untuk dapat menjaga dan mengelola hutan desa.

Belum lama ini kita dikejutkan dengan surat gubernur kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa (SK HPHD) belum dapat dikeluarkan karena RTRWP Riau belum selesai.

Aku berharap perkembangan ini tidak menyurutkan tekad kita untuk berjuang mendapatkan hak mengelola hutan kita sendiri.

Perkembangan ini adalah pelajaran berharga bagi kita tentang bagaimana sulitnya mendesak negara agar mengurus hak kelola bagi rakyatnya sendiri.

Ini juga salah satu bukti betapa sulitnya mendorong negara agar serius menghentikan kerusakan hutan.

“

...kita sadar  
tidak ada  
pencadangan  
kawasan hutan  
yang adil untuk  
rakyat

”

Dengan laju deforestasi 160 ribu hektare pertahunnya, hutan di Provinsi Riau saat ini hanya tersisa 20% saja dari seluruh luas daratan yang ada. Sebagian besar kehilangan hutan di Riau disebabkan oleh berbagai bentuk eksploitasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan, yaitu untuk hutan tanaman maupun alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Bang Edi beserta teman-teman di Segamai dan Serapung,

Kondisi saat ini harus membuat tekad kita semakin kuat untuk merebut wilayah kelola rakyat. Kenapa harus direbut? Karena kita sadar tidak ada pencadangan kawasan hutan yang adil untuk rakyat. Lembaran SK 4234/Menhut-VI/BRPUK/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 07/Menhut-II/2011 tentang Pencadangan Kawasan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu jelas-jelas memperlihatkan ketidakadilan alokasi pencadangan itu. Dari 1,25 juta hektare kawasan hutan yang dicadangkan di Provinsi Riau, hanya 0,99 persen (12.000 hektare) yang dicadangkan untuk rakyat melalui skema Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan. Malangnya, dari 12.000 yang dicadangkan untuk rakyat itu pun 70% nya telah dirampok untuk memoles *brand image* industri kertas & perkebunan kayu lewat proyek-proyek restorasi ekosistem.

Buku basis data spasial kehutanan RI tahun 2013 mendokumentasikan dengan baik ketimpangan itu. Sudah lebih 2 juta hektare lahan dikuasai oleh korporasi-korporasi yang berbisnis kehutanan. Hanya 4.220 hektare yang dikelola rakyat melalui skema Hutan Desa dan itupun diganjal dengan alasan tata ruang yang belum selesai. Kemudian, walaupun ada IUPHHK-HTR seluas 86.328 hektare namun kita sama-sama paham itu bukanlah milik rakyat karena skema hutan tanaman rakyat itu hanyalah akal-akalan untuk pemenuhan bahan baku industri kertas.

### Izin Pemanfaatan Hutan Provinsi Riau

No	Perizinan	Luas hektar
1	IUPHHK-HA	229.228
2	IUPHHK-HTI	1.656.897
3	IUPHHK-HTR	86.328
4	IUPHHK-RE	20.265
5	IUPHHBK-HT	21.620
6	Hutan Desa	4.220

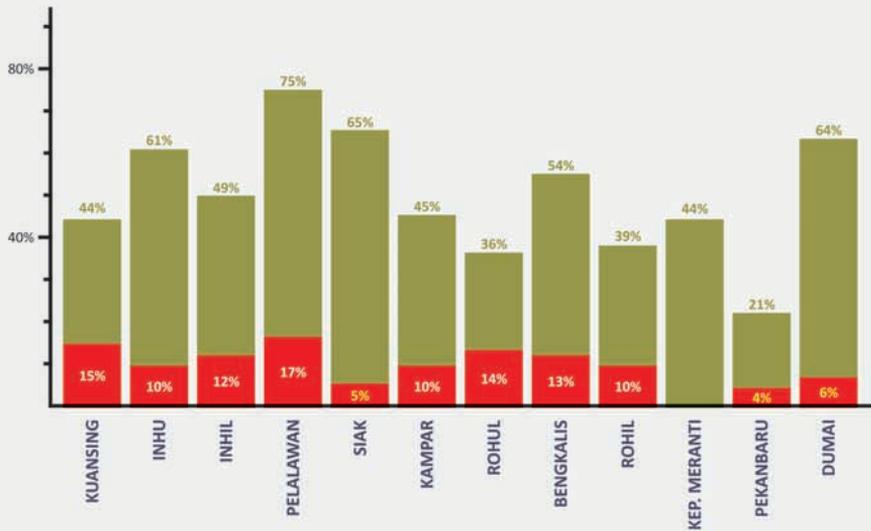
Bang Edi beserta teman-teman di Segamai dan Serapung,

Kenyataannya, walaupun sudah ada lebih dari 1,6 juta hektare kawasan konsesi HTI dan Hutan Alam di Provinsi Riau namun industri sektor kehutanan ini ternyata tidak berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau secara merata. Data Dinas Kehutanan Provinsi Riau menunjukkan bahwa 77% dari seluruh lahan konsesi di Riau berada di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Di Kabupaten Pelalawan bahkan lebih dari 41% luas wilayahnya telah menjadi kawasan industri kehutanan. Faktanya, statistik tahun 2009 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di kabupaten ini mencapai 17% dari total penduduk, dan 44 desa (50%) di Pelalawan masih saja berstatus desa miskin dan tertinggal.

**LUAS KAWASAN HTI/HEKTAR  
di EMPAT KABUPATEN di RIAU**

Nama Daerah/ Kabupaten	Sebaran (Kecamatan)	Jumlah Izin (HEKTAR/HTI)	Luas Kawasan	Total Luas Wilayah	%
BENGKALIS	8	28	295,862.06	773,393	38.26%
KEP. MERANTI	4	8	101,134.41	370,784	27.28%
PELALAWAN	10	65	566,512.25	1,392,494	40.68%
SIAK	10	38	315,006.50	855,609	36.82%

**PERBANDINGAN  
PENGUSAHAAN LAHAN OLEH PERKEBUNAN KAYU + SAWIT  
DENGAN TINGKAT KEMISKINAN**

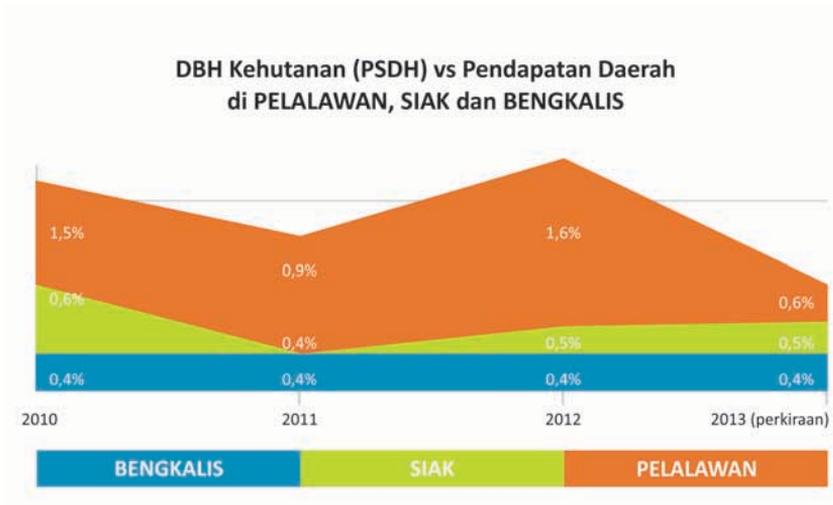


Sumber : Jikalahari

Dalam hal infrastruktur pun, misalnya jalan sebagai akses vital untuk publik, terlihat perbedaan yang mencolok antara desa-desa di wilayah HTI dan di luar wilayah HTI. Jalan-jalan di wilayah HTI cenderung tidak layak. Kebanyakan jalan ke desa-desa di wilayah-wilayah itu masih berupa jalan tanah, kecuali di desa di kawasan HTI yang berada di pinggir jalan poros lintas timur. Posisi desa-desa di wilayah-wilayah HTI yang mayoritas jauh dari jalan poros dan ibukota kecamatan menyebabkan akses jalan ke arah desa-desa itu belum tersentuh pembangunan oleh pemerintah kabupaten. Di luar wilayah HTI, biasanya di jalan poros antar desa, berkembang pemukiman penduduk. Hal ini tidak terjadi di desa-desa yang berada di areal konsesi HTI.

Besaran kontribusi sektor kehutanan yang menjadi pendapatan daerah penghasil sebagai penunjang pembangunan daerah tidak sebanding dengan besaran dampak yang ditimbulkannya. Kita menyaksikan wilayah yang dikelilingi konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) justru dikategorikan menjadi wilayah tertinggal. Selain itu, bencana akibat kehilangan hutan, pencemaran asap pembakaran hutan dan lahan, serta konflik antara warga dengan perusahaan menjadi realitas yang tidak dapat dihindarkan.

Konflik yang muncul sebagian besarnya adalah akibat perebutan lahan untuk kehidupan masyarakat di wilayah penghasil hutan. Sementara itu, kontribusi sektor kehutanan untuk pendapatan daerah jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang timbul dari kejahatan kehutanan itu.



Bang Edi beserta teman-teman di Segamai dan Serapung,

Buruknya tata kelola dan korupsi menjadi lingkaran setan di sektor sumber daya alam. Keduanya terus menggerogoti hak rakyat untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas hutan dan tanah.

Namun aku masih ingat pernyataan Bang Edi saat ditanya wartawan beberapa waktu lalu terkait usulan hutan desa ini, “Pokoknya bagaimana menyelamatkan hutan dulu.” Mengapa? Sebab, kawasan yang menjadi usulan Hutan Desa Segamai-Serapung dikelilingi konsesi-konsesi perusahaan kayu.

“Kalau tak ada lagi hutan yang terjaga, dari mana masyarakat desa mendapatkan kayu untuk membuat dayung, sampan dan membangun rumah? Mau tinggal di mana satwa-satwa itu, jangan sampai karena tidak ada hutan mereka masuk kampung dan mengganggu ketentraman warga.”

Bang Edi,

Mari, kembali kita semangatkan warga kampung! Belum mengantongi SK HPHD bukan berarti berhenti untuk menjaga hutan dan tanah. Sekejap saja kita lengah, hutan kita pasti dirambah para pemodal yang serakah.

Semoga kita tetap memegang tunjuk ajar Melayu yang menyatakan bahwa hutan dan tanah adalah simbol marwah. Negeri Sangar yang terletak di Laut Embun (Sungai Kampar) tertulis jelas dalam *tombo* persukuan petalangan sebagai "bukti" hak atas tanah. Akan tetapi kini tidak sedikit pihak luar yang menganggap *tombo* itu sebagai dongeng pengantar tidur saja. Sungai dan *tasik sangar* yang menjadi wilayah hutan desa harus menjadi simbol pengembalian marwah masyarakat desa.

Perjuangan mengambil kembali hak kelola ini dapat menjadi bukti bahwa kita tidak menyia-nyiakan hutan dan tanah yang menjadi rintisan moyang persukuan petalangan dalam membangun dusun, kampung, negeri, kebun, dan ladang untuk kesejahteraan anak cucunya.

Pekanbaru, Mei 2015

**Muslim Rasyid**

\_\_\_\_\_ *ttd*

“  
...terkait usulan  
hutan desa ini,  
pokoknya  
bagaimana  
menyelamatkan  
hutan dulu  
”



KRISIS  
PANGAN DAN AIR



BIOREGION  
PESISIR BARAT



PROVINSI  
SUMATERA BARAT

## AIB KITA PENANDA KRISIS LUAR BIASA

DULU ...  
SURPLUS PANGAN



BERUBAH ...  
TANAMAN SAWIT



SEKARANG ...  
PENERIMA RASKIN



SUMATERA BARAT

**49.577.580 ton**

BERAS RASKIN SETIAP TAHUN

# SUMATERA BARAT: aib kita penanda krisis luar biasa

---

Kepada Yth,

Ibu Yeni Karlina

Di Nagari Salareh Aie, Kec. Palembang Agam

Assalamualaikum wr.wb.,

Saat Ibu membaca surat ini saya berharap Ibu dan keluarga dalam keadaan sehat wal afiat.

Ibu Yeni yang baik, saya sengaja menulis surat ini pada Ibu karena mengingat pertemuan kita bersama ibu-ibu dari 6 nagari yang ada di Kecamatan Palembang pada bulan puasa tahun 2014 lalu.



Saya masih ingat dengan jelas saat Ibu mengatakan, *“Aib bagi kami saat kami memasak nasi di dapur, bau beras raskinnya tercium oleh orang yang lewat di jalan depan rumah.”*

Kondisi yang Ibu rasakan itu juga dirasakan oleh ribuan ibu-ibu lainnya di Kecamatan Palembang dan bahkan juga di seluruh negeri ini.

Mari kita lihat angka-angkanya. Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat adalah 354.738 jiwa, yang setiap tahunnya mengkonsumsi beras raskin hingga 49.577.580 ton. Beras raskin itu dibagikan kepada saudara-saudara kita yang berada di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Ini sungguh sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Dan saat kita merasakan kondisi ini sebagai aib, pemimpin-pemimpin negeri ini malah menganggap penyaluran beras raskin besar-besaran itu adalah sebuah keberhasilan yang perlu dibanggakan.

Sebagai orang Minang yang memegang teguh adat istiadat yang telah kita warisi secara turun temurun, aib keluarga adalah sesuatu hal yang sangat besar. Bagi kita orang Minang **“biarlah mati berkalang tanah daripada hidup menanggung malu.”**

Belajar dari adat Minang Kabau yang berlaku di nagari ini, nenek moyang kita sudah mengajarkan dengan sangat baik tentang bagaimana menjaga kondisi keluarga dan suku agar tidak menjadi aib dalam nagari. Jika Ibu Yeni masih ingat kata orang tua-orang tua kita, ada tiga kondisi dalam keluarga atau kaum yang jika tidak ditangani dengan baik oleh Ninik Mamak akan menjadi aib bagi kaum:

*Mayit Tabujua Tak Bakubua  
Gadiah Gadang Indak Balaki  
Rumah Gadang Katirisan*

Ibu Yeni tentu sudah paham maksud tiga kondisi di atas. 'Mayit Tabujua Tak Bakubua' maksudnya adalah ada anggota keluarga yang sudah tua atau cacat yang dia hidup tapi tidak bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau ada sanak lelaki kita yang sudah tua dan dikembalikan oleh keluarga istri atau anaknya ke keluarga kita.

'Gadiah Gadang Indak Balaki' maksudnya adalah ada anggota keluarga kita menjadi janda dan punya tanggungan namun tidak punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tentu akan menjadi aib jika ninik mamak lepas tanggung jawab yang menyebabkan dia menjadi pengemis atau lebih buruk lagi jadi pelacur atau melakukan hal lain yang melanggar norma agama dan norma adat.

Kondisi yang ketiga adalah 'Rumah Gadang Katirisan' yang juga merupakan aib jika dibiarkan terjadi. Maksud istilah ini adalah ada anak gadis dalam kaum yang masih belum menikah karena ayah atau ibunya tidak sanggup untuk mencarikan uang jempunan bagi calon menantunya. Kondisi ini kalo dibiarkan tentu akan menjadi aib besar dalam keluarga. Tercoreng arang di kening jika anak gadis dalam kaum menjadi perawan tua atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan adat.

“  
...saat kita  
merasakan kondisi  
ini sebagai aib,  
pemimpin-  
pemimpin negeri  
ini malah  
menganggap  
penyaluran beras  
raskin besar-  
besaran itu adalah  
sebuah  
keberhasilan yang  
perlu dibanggakan

”

Untuk menjaga agar tiga kondisi ini tidak terjadi dan menjadi aib bagi kaum kita, adat kita mengajarkan untuk berusaha sekuatnya menyelesaikan persoalan ini. Dalam pepatah Minang disebutkan:

*Ndak ado Kayu, Tajang Dikapiang*

*Nak Ameh, Bungka Diasah*

*Nak Dagiang, Kuciang Didabiah*

Ninik mamak dalam kaum kita lah yang bertanggungjawab untuk memastikan agar tidak ada persoalan dalam kaum yang akan menjadi aib kaum dalam nagari. Dari zaman dahulu Ninik Mamak dalam Minang Kabau diberi 'Sawah Singguluang' dan 'Sawah Abuan' yang dikerjakan secara gotong royong oleh seluruh anggota kaum. Hasil panen padi dari sawah Singguluang dan sawah Abuan diserahkan seluruhnya pada Ninik Mamak dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kaumnya, termasuk untuk membiayai anggota kaum yang tidak mampu.

Namun kita lihat kondisi hari ini di Ranah Minang, tidak ada lagi sawah Singguluang dan sawah Abuan untuk Ninik Mamak. Bahkan 'Sawah Taruko' yang harusnya diolah untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota kaum kini sudah tidak ada lagi. Sawah-sawah telah dijual atau diserahkan kepada orang lain untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Kondisi inilah yang menyebabkan kita orang Minang rela makan beras miskin yang bau. Tidak ada lagi padi di lumbung yang bisa dibagikan oleh Ninik Mamak untuk membantu anggota kaum yang janda dan jompo agar tidak menjadi pengemis atau pelanggar norma agama dan norma adat.

Kondisi buruk Ranah Minang hari ini juga terjadi di nagari kita. Palembang yang dulu dikenal sebagai lumbung pangan Kabupaten Agam, yang berasnya bagus dan rasanya enak, kini tak lagi menghasilkan cukup beras untuk dinikmati oleh warganya sendiri.

Saya melihat ada yang berubah dari nagari kita. Hamparan luas yang dulu menguning oleh padi yang sedang masak dan siap dipanen kini sangat sulit kita temui, berubah menjadi hamparan perkebunan kelapa sawit. Irigasi dan sungai kita mengering karena hutan dan perbukitan kita ditebangi dan diganti tanaman sawit. Adapun tanah-tanah yang tidak ditanami sawit kini menjadi tanah liat yang terbengkalai karena tidak ada air di saluran irigasi, karena hutan kita telah berganti sawit.

Ibu Yeni pasti berpikir, “Apa salahnya menanam sawit? Kan buahnya bisa kita jual dengan harga lumayan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.”

Saya ingin sedikit memberikan gambaran kepada Ibu. Kelapa sawit adalah jenis tanaman yang membutuhkan banyak air untuk bisa hidup, tapi struktur akarnya tidak dapat menyimpan air. Penanaman kelapa sawit dengan sistem monokultur, yaitu satu jenis tanaman dalam lahan yang luas, akan merusak kondisi tanah. Tanah menjadi kering dan jika hujan tiba tanah itu tidak mampu menyerap air. Hal ini menyebabkan kita kebanjiran di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.

Ibu Yeni yang baik,

Sekarang mari kita bicara soal kedaulatan pangan keluarga. Ibu sebagai ibu rumah tangga memiliki kewajiban untuk memastikan ada tidaknya makanan yang tersedia di meja makan untuk seluruh anggota keluarga. Ibu yang mengetahui berapa banyak beras yang akan dimasak dan lauk

“  
... kawasan hutan  
kita telah berubah  
menjadi  
Perkebunan Kelapa  
Sawit PT Agra  
Masang Plantation  
milik Wilmar Group  
dengan luas 8.000  
hektare di  
Kecamatan  
Palembayan...  
”

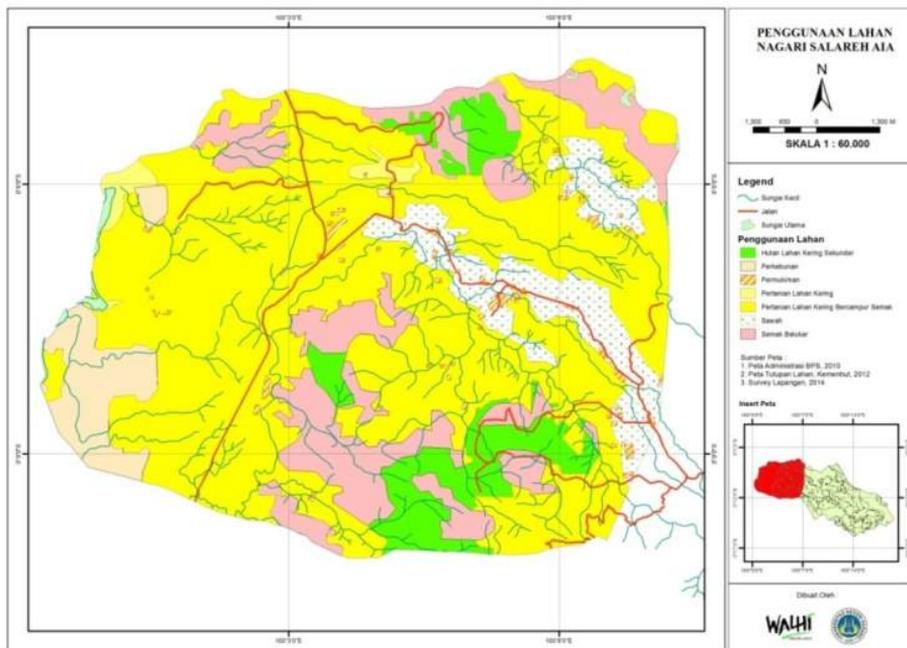
atau sayur apa yang akan dihidangkan. Jika saat ini Ibu tak lagi bebas leluasa menentukan jumlah beras yang akan dimasak atau sayur yang mau dihidangkan itu artinya kedaulatan pangan keluarga Ibu sudah tidak ada.

Bagaimana bisa kita berdaulat atas dapur kita jika kita tak lagi punya padi di lumbung? Bagaimana pula kita berdaulat apabila saat ingin memasak kita khawatir tetangga akan mencemooh karena aroma raskin yang kita masak tercium hingga ke jalanan?



Mungkin Ibu masih ingat awal tahun lalu, saat kita melakukan pemetaan penggunaan lahan di nagari kita bersama mahasiswa Geografi UNP. Hasil pemetaan itu menunjukkan bahwa telah terjadi alih fungsi lahan kita dari lahan pangan produktif menjadi perkebunan kelapa sawit, yaitu seluas 70 hektare hanya dalam 2 tahun saja. Ini

dilakukan oleh masyarakat. Sementara itu kawasan hutan kita telah berubah menjadi Perkebunan Kelapa Sawit PT Agra Masang Plantation milik Wilmar Group dengan luas 8.000 hektare di Kecamatan Palembang, dan PT Perkebunan Pelalu Raya di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembang dengan luas 550 hektare.



Ibu Yeni, berat sekali rasanya jika kita membayangkan nagari kita yang berada jauh dari pusat kota ini, yang akses menuju rumah kita harus melewati celah sempit perbukitan yang terjal. Bayangkan jika negeri yang rawan bencana gempa bumi ini kemudian terisolir karena jalan menuju nagari kita tertutup longsor atau terban ke lembah yang dalam. Saat kita terisolir dan terputus jalur pengangkutan logistik saat terjadi bencana, bisakah kita merebus dan menghidangkan kelapa sawit untuk anak dan keluarga kita, karena tidak ada lagi beras hasil sawah sendiri atau tidak ada jalan untuk memasukkan beras raskin yang mau kita masak?

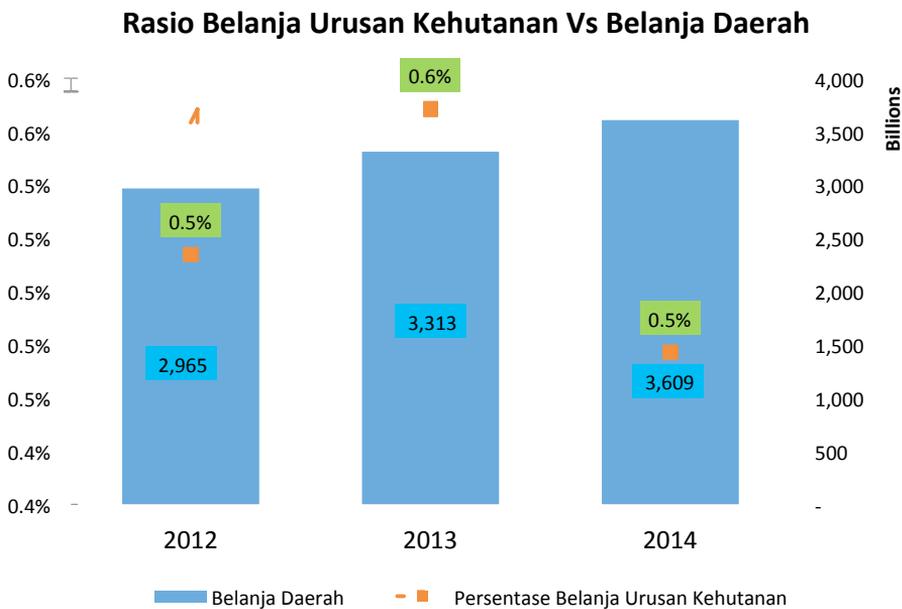


Saya ingin memberikan saran kepada Ibu agar segera bersikap dalam keluarga untuk memastikan tidak ada lagi lahan pangan produktif di nagari ini yang diubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Mari juga kita mengingatkan Ibu Aryati, Camat Palembayan, akan janjinya pada kita untuk mengeluarkan peraturan perlindungan lahan pangan produktif di Palembayan agar tidak dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit atau untuk pembangunan infrastruktur.

Selain itu, kita juga harus pro-aktif untuk menjaga lingkungan dan hutan kita. Sangat sulit jika kita mempercayakan penjagaan hutan dan lingkungan hidup kita pada pemerintah karena sampai hari ini pemerintah kita lebih melayani investor daripada rakyatnya. Dana pembangunan yang ada di provinsi ini lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan pembangunan infrastruktur untuk melayani investor seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan.

□



Berkaitan dengan urusan pelestarian hutan, salah satu permasalahannya adalah minimnya alokasi anggaran karena urusan kehutanan bukan merupakan urusan wajib. Urusan kehutanan hanya merupakan urusan pilihan. Selain itu, urusan sektor hutan dan lahan juga bukanlah urusan yang dimandatkan oleh konstitusi atau undang-undang. Tidak seperti urusan pendidikan yang anggarannya dimandatkan tidak boleh kurang dari 20 persen dan kesehatan yang tidak boleh kurang dari 10 persen, di luar gaji pegawai!

“  
... adat istiadat kita  
menuntun kita untuk  
tidak mengandalkan  
orang lain agar kita  
kembali menjadi  
bermartabat dan  
berdaulat  
”

Meskipun tidak ada standar yang baku atau *benchmark* tentang berapa proporsi terbaik untuk alokasi belanja pengelolaan hutan dan lahan, namun faktanya jelas bahwa alokasi belanja yang disediakan oleh pemerintah daerah sama sekali tidak sebanding dengan pernyataan-pernyataan pemerintah tentang menjadikan hutan dan lahan sebagai sumber pendapatan daerah. Termasuk pernyataan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang secara jelas menggambarkan bahwa sektor hutan dan lahan merupakan bagian penting dari tujuan pembangunan daerah.

Ibu Yeni yang saya hormati,

Kembali tentang aib kita sebagai Orang Minang yang telah saya tuliskan di bagian-bagian sebelumnya, kaitannya dengan cerita-cerita tentang anggaran dan kebijakan pemerintah, menurut saya sudah jelas bahwa adat istiadat kita menuntun kita untuk tidak mengandalkan orang lain agar kita kembali menjadi bermartabat dan berdaulat. Orang lain yang tidak boleh menjadi andalan itu nyatalah dari cerita tentang keberpihakan mereka kepada investor dan minimnya perhatian pemerintah kita sendiri pada urusan kehutanan dan lahan untuk rakyat.

Kita tidak bisa mengandalkan pemerintah dalam mempertahankan tanah dan sawah kita, sumber pangan dan lumbung kita, dan hutan-hutan penyedia air kita. Kita harus bergerak sendiri bersama kaum kita, untuk nagari kita.

Wass.Wr.Wb.,

Chaus

\_\_\_\_\_ *ttd*



## ANWAR SADAT SAHABAT RAKYAT

### HUTAN di SUMATERA SELATAN

**8.702.741 ha**

#### HUTAN PRODUKSI

**2.525.034 ha**

#### HUTAN KONSERVASI

**539.645 ha**

#### HUTAN LINDUNG

**539.645 ha**

SUMATERA SELATAN memiliki potensi tambang 50% di Pulau Sumatera

sumber : WALHI

### SUMBER DANA BAGI HASIL (DBH)

**49% - 57%**

#### AREAL TAMBANG

**2.787.022 ha**

#### PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

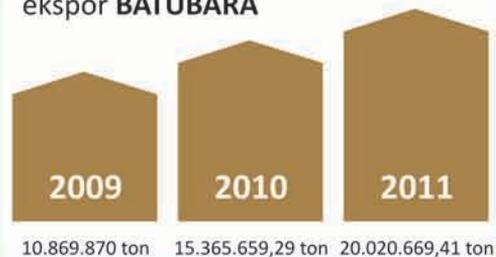
**1.000.000 ha**

#### HUTAN TANAMAN INDUSTRI

**1.375.312 ha**

APBD SUMATERA SELATAN 2009-2013

### ekspor BATUBARA



sumber : FITRA



# SUMATERA SELATAN:

## anwar sadat sahabat rakyat

---

Sahabatku Anwar Sadat,

Do'a dan harapanku selalu bahwa Engkau sahabatku selalu dalam lindungan Allah SWT dan ridho- Nya selalu menyertai perjalananmu. Aamiin.

Sahabat, pertama sekali saya mohon maaf jika surat ini agak membuatmu kaget, karena sepuluh tahun sudah kita jalani



sebagai sahabat baru ini pertama kalinya saya mengirimkan surat kepadamu. Selama ini kita berkomunikasi sangat sering baik lewat telpon maupun lewat email, dan kita biasa berbicara sangat panjang ketika kita bertemu langsung. Banyak cerita yang terungkap selama ini di antara kita namun tidak semua terdokumentasikan dengan baik dan sistematis.

Anwar Sadat sahabatku, perkenalkan sahabatmu ini mencurahkan ke dalam surat ini sebagian memori selama persahabatan kita berlangsung dengan harapan akan menjadi dokumentasi yang bisa dibaca olehmu dan mungkin anak-anak kita serta orang lain yang sempat menemukan surat ini nantinya. Banyak pengalaman dan pembelajaran yang saya

dapatkan dalam perjalanan persahabatan kita sebagai sesama aktivis lingkungan hidup. Terus terang, keteguhanmu dan keyakinanmu terhadap perjuangan yang kau jalani menjadi motivasi tersendiri buat diriku.

Sahabatku,

Masih teringat jelas olehku tahun 2010 saat kau bersama petani dari beberapa kabupaten di Sumatera Selatan menyampaikan aspirasi pada saat peringatan Hari Agraria Nasional, dimana kemudian dirimu mendapatkan perlakuan kekerasan.

Saat itu dirimu yang sedang berupaya menenangkan massa dan menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Sumatera Selatan dipukul oleh Ajudan Gubernur. Namun dirimu tidak gentar dan melaporkan tindakan tersebut sampai ke Mabes Polri. Sehingga kejadian itu diselesaikan secara damai karena permohonan dari Gubernur Sumatera Selatan untuk mencabut laporan di Mabes Polri. Namun yang menjadi menarik, pencabutan laporan tersebut ditempuh berdasarkan keputusan organisasi tanpa didasari motif untuk mencari keuntungan, dimana hal itu dilakukan tanpa adanya *'bargaining'* atau kompromi yang mempengaruhi idealisme perjuanganmu.

Saya yakin satu peristiwa lagi dalam hidupmu yang pasti tidak akan pernah terlupakan olehmu dan juga olehku, yaitu ketika bulan Januari tahun 2013. Kami semua sahabatmu mendapatkan kabar bahwa engkau telah diamankan oleh Polda Sumatera Selatan dan dimasukkan ke dalam tahanan bersama stafmu, Dedek Caniago, dan 24 orang petani. Tuduhannya adalah melakukan tindakan melawan hukum merusak pagar kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan serta penghasutan saat bersama masyarakat menyampaikan tuntutan untuk membebaskan anggota masyarakat dari 22 desa di Ogan Ilir yang ditahan oleh Polda Sumatera Selatan.

Masyarakat dari 22 desa itu dituduh telah merampas lahan perusahaan PTPN VII Unit Cinta Manis di Kabupaten Ogan Ilir. Namun dirimu yakin, berdasarkan hasil investigasi yang kau lakukan dengan kawan-

kawan, justru PTPN VII Unit Cinta Manis yang telah merampas lahan masyarakat di 22 desa tersebut.

Yang membuatku lebih terenyuh dan kaget adalah ketika melihat foto dirimu yang dalam keadaan luka di kepala dan darah menetes sampai jatuh di mukamu, sampai bajumu yang putih berlumuran darah.

Sahabat, banyak hal yang membuatku bangga dan salut kepada dirimu. Dalam kondisi seperti itu nyatalah semangat pantang menyerahmu dan kokohmu pada keyakinan bahwa apa yang sedang Engkau perjuangkan bersama masyarakat selama ini adalah sesuatu yang benar.

Bahkan ketika dalam proses menjelang diajukan ke pengadilan pun dirimu masih dengan lantang menyatakan bahwa walaupun mendapatkan perlakuan seperti saat itu, dirimu tidak akan pernah bungkam terhadap tindakan-tindakan yang telah merugikan rakyat Sumatera Selatan.

Sahabatku Anwar Sadat,

Sekali lagi bangga dan salutku kepada dirimu bertambah besar, karena aku tahu dalam kondisi seperti itu dirimu harus merelakan untuk tidak bisa berkumpul dengan istri dan anak-anakmu yang aku tahu masih kecil. Melalui surat ini izinkan juga aku untuk menyampaikan penghargaan dan rasa hormatku kepada istrimu yang aku yakin dengan rasa cinta yang besar terhadap dirimu dan anak-anakmu, dengan penuh pengertian tetap memberi semangat kepada dirimu untuk tetap bertahan dan tidak menyerah ketika mendapatkan berbagai perlakuan buruk tersebut.

Anwar Sadat sahabatku,

Saya yakin perjuanganmu bersama rakyat yang tertindas dan tersisihkan dari sumber penghidupannya didasari dengan keyakinan bahwa telah terjadi perlakuan yang tidak adil kepada mereka, dimana masyarakat 22 desa di Kabupaten Ogan Ilir telah dirampas dari lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka oleh PTPN VII Unit Cinta Manis untuk dijadikan lahan perkebunan tebu.

”  
...penghargaan dan  
rasa hormatku  
kepada istrimu  
yang aku yakin  
dengan rasa cinta  
yang besar  
terhadap dirimu  
dan anak-anakmu,  
dengan penuh  
pengertian tetap  
memberi semangat  
kepada dirimu  
untuk tetap  
bertahan dan tidak  
menyerah...  
”

Peristiwa yang membuat dirimu luka di kepala dan sampai harus menerima hukuman 7 bulan kurungan tidaklah satu-satunya kondisi yang dialami oleh rakyat di Sumatera Selatan, tapi di banyak tempat dan di banyak orang yang mengalami kondisi sama, baik yang bersama-sama berjuang maupun yang berjuang sendiri tanpa dukungan orang seperti dirimu dan kawan-kawan.

Dari pertemuanku dengan Hadi Jatmiko (Plt. Direktur WALHI Sumsel waktu dirimu sedang dalam tahanan Polda Sumatera Selatan) dan Sigit (WBH Sumatera Selatan) aku mengetahui betapa ternyata memang Sumatera Selatan adalah negeri yang kaya dengan sumber daya alam, baik berupa hutan, lahan, dan tambang. Dari 8.702.741 hektare luas Provinsi Sumatera Selatan, 3.668.900-nya adalah kawasan hutan, termasuk yang berbentuk Hutan Produksi 2.525.034 hektare, Hutan Konservasi 539.645 hektare, kemudian Hutan Lindung 539.645 hektare. Sisa

lahan di Sumatera Selatan adalah Areal Penggunaan Lain. Kemudian, jika kita lihat lagi data di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral,

ternyata di Sumatera Selatan lah lebih dari 50% potensi tambang Pulau Sumatera.

Sahabatku,

Jika kita geser pula penglihatan kita pada hasil analisis anggaran yang dilakukan oleh kawan-kawan FITRA Sumatera Selatan terhadap APBD Sumatera Selatan tahun anggaran 2009-2013, ternyata dari total APBD Sumatera Selatan, 49%-57% nya adalah bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH). Ini tidak salah karena setelah dilihat lagi data di BPS Sumatera Selatan tahun 2013 ternyata seluas 2.787.022 hektare sudah menjadi lahan konsesi tambang, kemudian 1.000.000 hektare sudah menjadi areal perkebunan kelapa sawit, di samping itu 1.375.312 hektare juga sudah menjadi areal Hutan Tanaman Industri (HTI).

Jika melihat pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan, sampai tahun 2013 paling tidak sudah dibangun jalan sepanjang 1.452 kilometer, 6 pelabuhan umum, dan 24 pelabuhan khusus. Dan sejalan dengan itu pula peningkatan eksploitasi kekayaan alam Sumatera Selatan terus terjadi, ditunjukkan dengan peningkatan ekspor CPO, bubur kertas dan batu bara. Untuk batu bara, pada tahun 2009 produksinya sebesar 10.869.870 ton, pada 2010 sebesar 15.365.659,29 ton, dan tahun 2011 sebesar 20.020.669,41 ton.

Sahabatku Anwar Sadat,

Aku kemudian menjadi semakin paham kenapa dirimu tetap bersikukuh dan tegar untuk terus berjuang bersama masyarakat yang selama ini tersisihkan dan kehilangan lahan sumber pendapatan mereka karena telah diambil alih secara paksa oleh perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin untuk menguasai dan menguras kekayaan sumber daya alam di Sumatera Selatan. Ternyata banyaknya perusahaan yang beraktivitas mengeruk kekayaan sumber daya alam di Sumatera Selatan justru berbanding terbalik dengan kondisi rakyat di Sumatera Selatan.

Berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik yang melakukan sensus secara nasional di tahun 2010, ternyata Sumatera Selatan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah itu justru berada pada peringkat provinsi ke-10 termiskin di Indonesia.

Yang paling memiriskan lagi adalah ketika aku membaca informasi pada tahun 2013 di Kabupaten Muba, yaitu bahwa dari 587.325 jiwa penduduknya, menurut Dinsos MuBA sendiri, sebanyak 59% (347.046 jiwa) nya adalah penduduk miskin. Padahal jika dilihat dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten MuBa termasuk daerah yang paling banyak menyediakan diri untuk aktivitas perusahaan-perusahaan yang mengeruk kekayaan sumber daya alam.

Sahabatku,

Perjuangan bersama-sama dengan masyarakat yang kau dampingi selama ini akan terus dihadapkan dengan tantangan yang sangat berat sekali. Modal semangat dan keyakinan yang kalian miliki akan selalu berhadapan dengan modal kapital dan kekuasaan. Alasan-alasan membuka lapangan pekerjaan dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan juga akan selalu menjadi senjata pamungkas mereka untuk melemahkan perjuangan kalian.

Namun aku yakin dirimu tidak akan pernah menyerah dan akan terus bersama-sama rakyat untuk mewujudkan cita-cita dan harapanmu bersama kawan-kawan dan masyarakat yang berjuang bersama denganmu.

Dirimu jangan khawatir, saya dan kawan-kawan di Sumatera Barat juga menghadapi tantangan seperti yang dirimu hadapi, yang berakar dari ketidakadilan dan ketidakberpihakan pada sebahagian besar rakyat di daerah kita.

Di akhir suratku ini aku sekali lagi ingin menyampaikan bahwa memang dibutuhkan kesabaran dan keyakinan yang sangat kuat untuk bisa terus berjuang untuk memastikan keselamatan, serta terjaminnya

produksi dan konsumsi kita dan saudara-saudara kita. Perjuangan masih panjang, Sahabat, namun itu tidak akan membuat luntur semangat kita. Selalu ada harapan untuk bisa menggapai cita-cita.

Salam,

**Khalid Saifullah**

\_\_\_\_\_ *ttd*



KRISIS  
TANAH DAN PERAMPASAN LAHAN

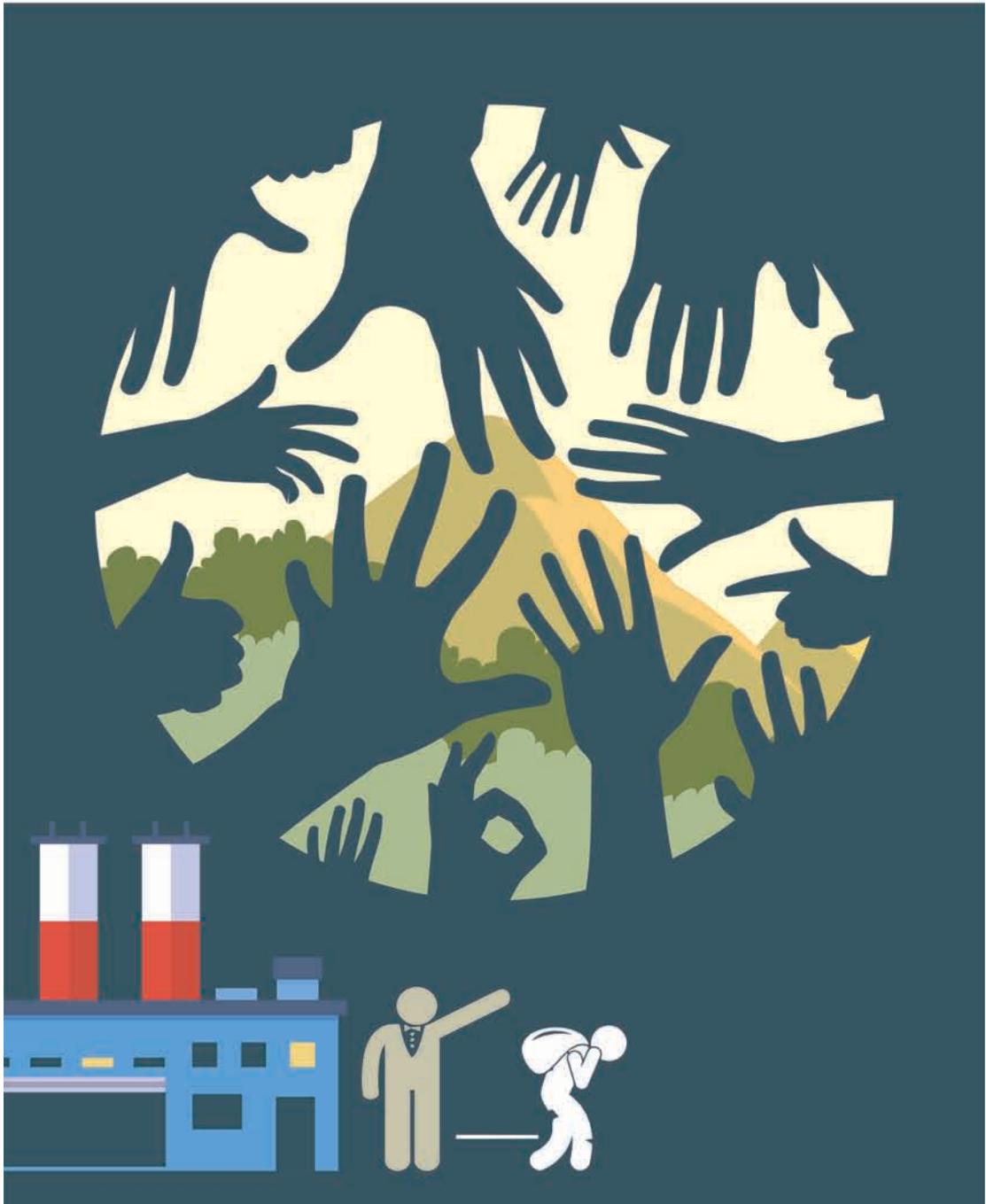


BIOREGION  
PESISIR UTARA



PROVINSI  
SUMATERA UTARA

## TOMBAK HAMINJON



# SUMATERA UTARA:

## tombak haminjon

---

Hancurnya batas-batas,  
hilangnya rotan sebagai penanda, dan tebang habis kemenyan,  
serta menanam tumbuhan baru eukaliptus adalah upaya-upaya  
menghilangkan jejak ingatan dan penanda kepemilikan  
Tombak Haminjon.

*(Suryati Simanjuntak, KSPPM 2014)*

**Kepada**

**Bapak Haposan Sinambela dan Bapak Sihitte**

**di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Sumatera Utara**

Apakabar Bapak-bapak sekalian? Semoga masih ingat dengan saya, Muslim Rasyid, yang saat itu berkunjung ke kampung Bapak bersama Made Ali dari Jikalahari Riau. Saat berkunjung ke tempat Bapak kami ditemani oleh Bang Iwan dari KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat), sebuah organisasi asal Siborong-borong, Tapanuli Utara, yang mendampingi warga Toba melawan Indorayon & TPL sejak tahun 1980an. Kini KSPPM bermarkas di Parapat, Danau Toba.

“  
Saat Belanda berkuasa tanah adat di Register 41 ini diakui, tetapi kenapa justru setelah kemerdekaan Indonesia tanah adat ini malah diberikan kepada korporasi?  
”

Izinkan saya menuliskan kembali obrolan kita saat berbagi cerita tentang pahitnya perjuangan rakyat dalam mempertahankan hak atas hutan dan tanahnya sendiri, kebun kemenyan (Tombak Haminjon) yang sudah diusahai oleh masyarakat sejak tahun 1875 sebagai sumber kehidupan dan penghidupan, mata pencaharian utama di daerah ini.

Tombak Haminjon (hutan kemenyan) adalah tanah adat yang berisi tanaman kemenyan yang sudah dibudidayakan beserta tanaman lainnya milik Masyarakat Adat Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta. Tombak Haminjon ini sudah dimiliki dan diusahai sejak masa leluhur atau nenek moyang, lebih dari 300 tahun yang lalu. Saat Belanda berkuasa

tanah adat di Register 41 ini diakui, tetapi kenapa justru ketika Indonesia merdeka, negara malah memberikan tanah adat ini kepada korporasi?

Kemenyan merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat adat di dua desa ini. Lebih dari 60 persen warga Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, bekerja di sektor perkebunan kemenyan dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp 2,1 miliar tiap minggunya. Tanaman kemenyan dapat tumbuh dengan baik hanya di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, khususnya di Kecamatan Pollung.

Kini setelah TPL beroperasi, produksi kemenyan warga pun turun drastis. Dulu, produksi warga pada musim panen raya, antara Oktober-Desember, dapat mencapai 400 kg/hektare/bulan (0,5 kg/batang/bulan), dengan harga Rp 130.000/kg untuk kualitas terbaik. Produksi antara Januari-September biasanya adalah sekitar 30-40

kg/hektare/bulan (3 ons/batang/bulan), dengan harga Rp 65.000/kg untuk kualitas biasa atau disebut tahir. Sesudah TPL masuk, pohon kemenyan pun ditebang, pohon dekat kemenyan pun ditebang, sekadar 50 kg/hektare per tahun pun tak didapat.

Sebelum TPL beroperasi dan menghancurkan Tombak Haminjon, air jernih mengalir di sungai-sungai kecil di dalam hutan, udara terasa sejuk dan segar. Kini kawasan itu menjadi panas dan gersang. Hutan alam kini telah ditebang. Tak terdengar lagi kicauan burung. Hewan liar tak lagi terlihat. Sungai-sungai kecil itu kini mengering dan kerontang.

Bapak Haposan Sinambela dan Bapak Sihitte,

Sepertinya negara sudah lupa; sebelum bernama PT Toba Pulp Lestari perusahaan ini bernama PT Inti Indorayon Utama yang telah diperintahkan berhenti beroperasi. PT Inti Indorayon Utama merampas tanah adat dan diprotes warga sekitar Danau Toba karena mencemari tanah dan air danau dengan limbah pada tahun 80-90an.

Pada 9 Agustus 1988, ketika diadakan uji produksi, penampungan air limbah Indorayon jebol dan jutaan meter kubik limbah mencemari Sungai Asahan. Baru 10 tahun kemudian, 9 Juni 1998, Gubernur Raja Inal Siregar memerintahkan penghentian operasi Indorayon setelah warga Porsea bersama ribuan mahasiswa di Medan berunjuk rasa ke DPRD Sumatera Utara.

Sepertinya negara juga lupa; industri bubur kertas ini punya seribu satu muslihat agar dapat beroperasi lagi. Dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tentang Pembagian

“

Di Sumatera Utara  
tercatat setidaknya  
30 korporasi di  
sektor kehutanan  
dan perkebunan  
berkonflik lahan  
dengan masyarakat

”

Kawasan Hutan di Sumatera Utara, perusahaan yang didirikan Sukanto Tanoto ini melanjutkan konsesi yang sempat 'beku' dan tampil dengan nama baru: PT Toba Pulp Lestari (TPL) melalui SK addendum No. 351/Menhut-II/2004 tentang perubahan nama perusahaan ini.

SK yang dikeluarkan Menteri Kehutanan MS Kaban tersebut menyatakan bahwa wilayah kerja TPL adalah di Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir, Simalungun, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Selatan, serta Humbang Hasundutan. Akibatnya, pada tahun 2009, yaitu 11 tahun sesudah Indorayon ditutup, sengketa tanah kembali meledak. Kini, warga Desa Pandumaan-Sipituhuta yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan, melakukan perlawanan terhadap perusahaan lama dengan nama baru ini.

Bapak Haposan Sinambela dan Bapak Sihitte,

Kejadian seperti yang Bapak dan warga kampung Pandumaan-Sipituhuta alami jamak berlangsung di banyak tempat di negeri ini, dimana investasi oleh korporasi rakus ruang bernama HTI dan Sawit menjalankan operasinya. Sebagian besar konsesi hutan tanaman, HPH, maupun usaha perkebunan rentan berkonflik dengan masyarakat. Di Sumatera Utara tercatat setidaknya 30 korporasi di sektor kehutanan dan perkebunan berkonflik lahan dengan masyarakat, dan konflik juga terjadi di lebih dari 50% wilayah konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman.

Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang memiliki konflik agraria terbesar di sepanjang tahun 2013, menyumbang 10,84% dari seluruh konflik agraria secara nasional. Tumpang tindih hak penguasaan dan pemanfaatan tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada korporasi dalam bentuk perkebunan, pertambangan, dan hutan tanaman industri terjadi baik di BUMN maupun perusahaan swasta, di antaranya menyangkut PT Perkebunan Negara (PTPN), PT Lonsum, PT SMART, PT Toba Pulp Lestari (TPL), PT Dairi Prima Mineral (DPM), dan PT Gorga Duma Sari (GDS).

Penumpangan pemberian hak yang menindih tanah rakyat ini telah menyebabkan tercerabutnya hak rakyat, khususnya masyarakat adat/lokal/petani dari tanahnya. Terjadinya konflik yang berkepanjangan kemudian berujung pada korban nyawa, kriminalisasi, dan kerusakan lingkungan.

Penyebab konflik tersebut sangat beragam, baik itu persoalan kompensasi kepada masyarakat yang lahannya diambil, maupun dikarenakan terampasnya secara sewenang-wenang akses masyarakat terhadap sumber daya hutan.

Entah kenapa negara selalu menginginkan penyelesaian konflik tanah ini melalui program kemitraan. Padahal sistem kemitraan tak bisa dipaksakan begitu saja. Kondisi seperti ini lah yang terjadi di Sipituhuta. Ini tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat ekonomi tetapi juga menyangkut masalah magis dan religius. Masyarakat adat memandang hutan kemenyan tidak hanya dalam konteks ekonomi tetapi juga nilai budaya.

Bapak Haposan Sinambela dan Bapak Sihitte,

Tak terasa sudah 5 tahun lebih Bapak dan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta berjuang mempertahankan sisa-sisa Tombak Haminjon dari perampasan oleh PT TPL dengan restu dan izin negara. Dari penuturan yang telah Bapak sampaikan nampaklah begitu banyaknya pembelajaran. Konflik ini menunjukkan bagaimana negara, khususnya Kementerian Kehutanan, enggan mengakui keberadaan Masyarakat Adat dan lalai dalam mencegah timbulnya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam.

Proses perjuangan warga dua desa ini menunjukkan begitu buruknya kebijakan negara. Demi kepentingan modal-investasi, negara mengabaikan keberadaan masyarakat adat yang sudah hidup ratusan tahun di wilayah adatnya.

Kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah dengan berbagai pihak; seperti surat penghentian penebangan oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Humbahas, kesepakatan dengan Komnas HAM, rekomendasi Dewan Kehutanan Nasional, dan perintah Dirjen BUK Kementerian Kehutanan, ternyata diabaikan begitu saja oleh negara-pengusaha. Negara seperti tidak berdaya menghadapi Tuan Investor dan Tuan Pemilik Modal.

Aparat keamanan, khususnya Polri, juga belum menjadi pengayom dan pelindung warga negara, namun malah menjadi sumber ketidakamanan bagi warga dan sepertinya memberikan perlindungan keamanan hanya pada perusahaan saja. Aparat keamanan masih berperan menakut-nakuti dan mengintimidasi warga. Padahal seharusnya, sudah saatnya pula, Polri melihat akar konflik sebelum menjalankan penegakan hukum.

Bapak Haposan Sinambela dan Bapak Sihitte,

Aku hanya bisa berharap Ibu Siti Nurbaya selaku Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup mendengarkan suara Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta dan merealisasikan komitmennya untuk mengeluarkan Tombak Haminjon dari wilayah konsesi TPL.

Aku hanya bisa berdo'a semoga Bapak Haposan Sinambela, Bapak Sihitte, dan warga Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta semuanya diberi kekuatan untuk terus berjuang dan semangat untuk terus mempertahankan hak dan sumber kehidupan. Semoga sisa-sisa Tombak Haminjon bisa terselamatkan dan hutan kemenyan yang sudah ditumbangkan dapat kita tanam dan hijaukan kembali.

Salam perjuangan, Mei 2015

**Muslim Rasyid**

\_\_\_\_\_ *ttd*



KRISIS  
ENERGI DAN PELAYANAN DASAR



BIOREGION  
PESISIR BARAT

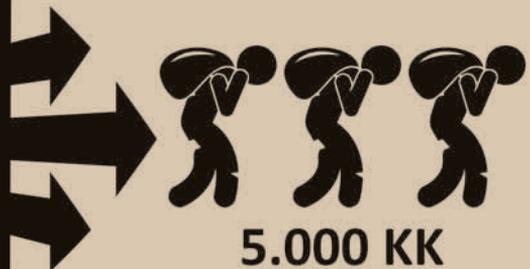


PROVINSI  
SUMATERA BARAT

## DAMN THE DAM

AKIBAT  
DAM KOTO PANJANG  
MENENGGELAMKAN  
**12 DESA**  
MEMAKSA  
**23.000**  
ORANG PINDAH  
DARI TANAH ASALNYA

MAHKAMAH AGUNG JEPANG



5.000 KK

# SUMATERA BARAT:

## damn the dam

---

Kepada Yth,

Uda Iswadi

(Sekjen Badan Perjuangan Rakyat Korban Dam Koto Panjang)

Di Koto Panjang

Assalamualaikum Wr.Wb.,

Salam Hormat,

Saya berharap Da Iswadi dan kawan-kawan dalam keadaan baik dan selalu dalam perlindungan Allah SWT dalam perjuangan mendapatkan keadilan bagi korban pembangunan dam di Koto Panjang.

Sejarah perjuangan masyarakat korban yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Korban Dam Koto Panjang (BPRKDKP) telah panjang, yaitu sejak ditenggelamkannya 12 desa beserta seluruh sejarah kehidupan yang ada di atasnya, 18 tahun lalu.

Pembangunan dam untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang itu didanai utang luar negeri, yaitu ODA Jepang, sebesar 31,2 milyar Yen. Kata mereka selalu, pembangunan adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Namun ternyata berbeda cerita, yaitu saat ribuan warga Koto Panjang dipaksa meninggalkan rumah dan desanya di bawah todongan senjata.

Saya baru mendalami persoalan yang terjadi di Koto Panjang mulai tahun 2014 lalu, saat saya diundang untuk menghadiri rapat koordinasi

bersama antara Eksekutif Nasional WALHI, WALHI Riau, WALHI Sumbar, BPRKDKP, dan teman-teman dari Badan Pendukung Jepang untuk Perjuangan Korban Pembangunan Dam Koto Panjang. Rapat kordinasi bersama di Kantor WALHI Riau itu membahas proses hukum yang sedang berjalan di Jepang terkait dengan tuntutan masyarakat korban kepada Pemerintah Jepang.



Da Iswadi yang baik,

Hari ini 18 tahun sudah pasca diresmikannya PLTA Koto Panjang pada tanggal 28 Februari 1997, namun perjuangan masyarakat korban Dam PLTA Koto Panjang masih belum mencapai titik *finish*. Perjuangan bersama yang dilakukan BPRKDKP, The Support Action Center For Koto Panjang Dam Victims dari Jepang, Comparative Public Policy Osaka University, Eksekutif Nasional WALHI, WALHI Riau, dan

WALHI Sumatera Barat masih akan jadi perjuangan bersama yang panjang.

Mari mengingat kembali sejarah pembangunan dam ini.

Mulainya adalah *project finding* oleh perusahaan konsultan dari Jepang TEPCO (Tokyo Electric Power Service Co. Ltd.) di bulan September dan November 1989. Pembangunan fisik proyek mulai dilakukan di tahun 1991 dan selesai diresmikan pada tanggal 28 Februari 1997.

Dam ini memotong aliran Sungai Kampar Kanan dan menggenangi areal seluas 124 km<sup>2</sup> demi menyediakan kapasitas pembangkitan listrik sebesar 114 MW dari 3 unit turbinnya. Proyek ini dibiayai dengan dana dalam bentuk utang sebesar 31,2 miliar Yen dari ODA (Official Development Assistance) Jepang.

Pembangunan ini memaksa sekitar 5.000 KK atau 23.000 jiwa masyarakat dari 12 desa yang ditenggelamkan untuk dipindahkan dari kampung mereka yang tadinya sangat makmur. Di tempat yang baru mereka mengalami banyak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, mulai dari air bersih, pangan, akses sekolah, akses layanan kesehatan, sampai rusaknya tatanan sosial budaya dan tradisi mereka selaku masyarakat Minang Kabau.

“  
Di tempat yang baru mereka mengalami banyak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, mulai dari air bersih, pangan, akses sekolah, akses layanan kesehatan, sampai rusaknya tatanan sosial budaya dan tradisi mereka selaku masyarakat Minangkabau  
”

Kemudian saya mengingat kembali proses hukum kasus Dam PLTA Koto Panjang yang sangat melelahkan, hingga keluar keputusan dari Mahkamah Agung Jepang. Dalam kunjungan 3 hari teman-teman pengacara dan badan pendukung perjuangan masyarakat, 3-5 April 2015 lalu, ke Koto Panjang, kita bertemu dengan **Toyama Katsuhiko** selaku Secretary General The Support Action Center For Kotopanjang Dam Victims, **Miho Sakai** dari Comparative Public Policy Osaka University, dan **Fumio Asano** selaku Pengacara Korban di Jepang.

Dalam kunjungan tersebut mereka menjelaskan keputusan Mahkamah Agung Jepang, yaitu bahwa tuntutan masyarakat korban dan tuntutan WALHI atas kerusakan lingkungan akibat pembangunan dam ditolak oleh Majelis Hakim. Argumennya adalah bahwa persoalan dampak pembangunan dam bagi masyarakat dan lingkungan sepenuhnya adalah persoalan internal Indonesia dan oleh karenanya Pemerintah Jepang menolak untuk ikut bertanggungjawab.

Proses hukum ini dimulai pada 5 September 2002 dimana rakyat Koto Panjang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tokyo, Jepang. Tergugatnya adalah Pemerintah Jepang, JBIC (Japan Bank for International Cooperation), JICA (Japan International Cooperation Agency), dan TEPSCO (Tokyo Elektrik Power Service Co.Ltd). Jumlah total penggugat adalah sebanyak 8.396 jiwa, ditambah WALHI. Gugatannya adalah atas kerugian masyarakat dan dampak pembangunan dam itu bagi lingkungan.

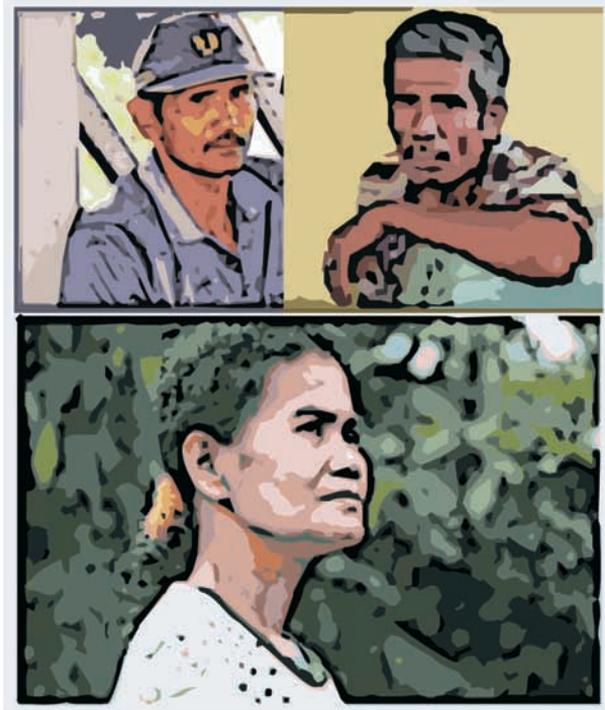
Proses peradilan rupanya belum berpihak kepada korban. Pengadilan menolak tuntutan kita, bahkan sampai ke Pengadilan Tinggi Tokyo, walaupun proses peradilan telah membuktikan terjadinya kerugian bagi masyarakat dan lingkungan akibat pembangunan tersebut. Salah satu bukti yang dipakai di pengadilan adalah Laporan Pelaksanaan Tim Koordinasi Pemantauan Perkembangan Pelaksanaan Action Plan Koto Panjang yang dibuat BAPPENAS RI tahun 2003.

Kita kalah dan mengajukan banding. Akhir dari proses peradilan adalah di Mahkamah Agung Jepang, yang sebagaimana telah kita ketahui bersama, memutuskan untuk menguatkan keputusan yang telah

dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jepang: menolak tuntutan rakyat korban pembangunan dan tuntutan WALHI atas kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan.

Da Iswadi,

Saya melihat raut muka sedih dan putus asa masyarakat Koto Panjang saat para pengacara kita menyampaikan hasil keputusan Mahkamah Agung Jepang. Mendengar helaan nafas berat dan gumaman kekecewaan dari para korban dan para pejuang yang telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan keadilan.



Pada hari itu, saya mendengarkan dengan seksama bagaimana Pak Ali Amran menceritakan pengalamannya saat hadir di pengadilan, menyampaikan penderitaannya sebagai korban pembangunan yang didanai oleh uang Jepang. Saat itu beliau sangat yakin bahwa fakta yang beliau sampaikan akan memengaruhi pandangan dan keputusan hakim tentang kasus ini. Namun beliau salah. Kesaksian Pak Ali Amran dan 28 orang rakyat korban lainnya yang dihadirkan dalam sidang-sidang pengadilan di Jepang tidak membuat pengadilan berpihak kepada korban.

“Andai saya bisa berbahasa Inggris atau berbahasa Jepang, akan saya sampaikan langsung pada hakim bagaimana beratnya hidup setelah pembangunan dam itu. Namun sayang saya hanya bisa menyampaikan

semuanya dalam bahasa Indonesia dan disampaikan oleh penerjemah dalam bahasa Jepang kepada Majelis Hakim,” kata Pak Ali Imran saat mengingat pengalamannya hadir di Pengadilan Jepang.

Da Iswadi,

Seperti pembicaraan kita sebelumnya, keputusan Mahkamah Agung Jepang itu bukanlah akhir dari segalanya. Perjuangan ini harus dilanjutkan agar masyarakat korban dan keturunannya dapat hidup lebih baik di masa depan.

Kita berkunjung ke beberapa desa dan nagari yang saat ini ditempati oleh korban dan saya melihat bagaimana sungguh di luar dugaan saya kondisi masyarakat saat ini. Di luar dugaan karena jika membaca laporan pemerintah terkait dengan penanganan korban yang telah menghabiskan miliaran rupiah, seolah-olah pemerintah telah memenuhi syarat-syarat kerjasama dengan Jepang yang termuat dalam dokumen kerjasama, yang mengharuskan masyarakat yang terkena dampak pembangunan agar hidup dengan kualitas hidup yang sama atau lebih baik dibanding saat di tempat asalnya.

Kenyataannya masyarakat harus pindah ke rumah pondok ukuran 6x6 meter tanpa listrik, tanpa air, dan tanpa sarana MCK. Setiap KK seharusnya menerima 2 hektare lahan perkebunan kelapa sawit atau karet yang siap panen, namun ternyata yang diterima hanya tanah kosong karena program pembangunan kebun kelapa sawit dan kebun karet yang diurus pihak ketiga ternyata mengalami kegagalan lebih dari 80%. Masyarakat korban tidak punya pilihan selain menerima lahan kosong tanpa harapan itu.

Kondisi kehidupan yang sulit dan tekanan sosial serta ekonomi yang semakin buruk membuat masyarakat Koto Panjang kembali harus menyerahkan atau menjual lahan yang mereka dapatkan itu, atau menggadaikan sertifikat rumah demi menutupi kebutuhan hidup yang makin hari makin sulit.

“Saat istri saya masuk rumah sakit dan harus menjalani operasi, saya terpaksa menjual kebun karet dan mengagunkan sertifikat rumah saya ke bank. Itupun tidak dapat menutupi semua biaya rumah sakit yang harus kami bayarkan,” cerita Pak Marlis dari Desa Koto Masjid sambil memandang jauh ke tengah bendungan dam, lalu menambahkan informasi bahwa lebih dari 80% warga telah melepaskan lahan kebun dan sertifikat rumah mereka.

Da Iswadi,

saya suka sekali melihat semangat teman-teman pengurus BPRKDKP yang mengatakan, “Jika ada satu orang yang berdiri untuk menuntut keadilan bagi korban pembangunan dam ini pasca putusan Mahkamah Agung Jepang, orang itu adalah saya; dan jika ada 10 orang berdiri itu adalah kami; dan jika 10.000 korban berdiri menuntut haknya maka kami pastikan kami ada bersama mereka.”

Da Iswandi,

Kami dari WALHI akan tetap bersama masyarakat Koto Panjang untuk berjuang mendapatkan hak dan keadilan yang telah hilang karena pembangunan dam, dan memastikan bahwa perjuangan ini tidak berakhir pada titik ini.

Da Iswandi,

Saya ingat dengan jelas saat Ibu Inun dari Nagari Tanjung Balit memandang jauh ke tengah bendungan dam dan menunjuk posisi dimana kuburan ibunya dan keluarga lainnya berada, yang ditenggelamkan tanpa pernah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi seperti janji pemerintah sebelum pembangunan dam. Tidak pernah lagi mereka dapat pergi berziarah ke kuburan orang tua dan keluarga saat menjelang bulan Ramadhan atau saat suara takbir berkumandang menjelang sholat Idul Fitri.

Jelaslah bahwa bagi Ibu Inun dari Nagari Tanjung Balit itu, juga bagi Da Iswandi dan bagi 10, 100 dan 1.000 korban lainnya, penderitaannya bukan hanya hilang tanah, harta, dan benda, tapi juga hilangnya martabat sebagai keturunan yang menghormati orang tua dan leluhur yang telah meninggal, dan merawat peninggalan dan kenangannya. Bersama dengan hilangnya ikatan dengan tanah dan kampung, ini adalah kehilangan yang tak nampak di mata, tak bisa diraba, akan tetapi kehilangan rasa, penderitaan spiritual dan budaya.

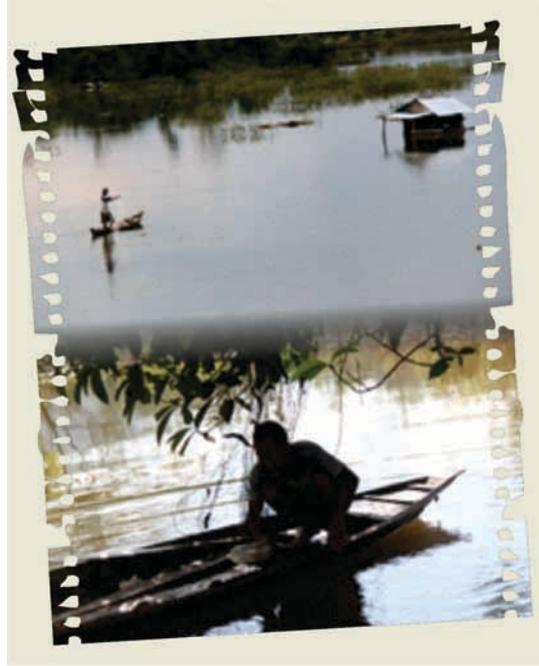
”  
Bersama dengan hilangnya ikatan dengan tanah dan kampung ini adalah hilangnya rasa, penderitaan spiritual, dan kepunahan budaya  
”

Coba bayangkan betapa penderitaan masyarakat terasa lebih buruk bagi generasi kedua korban dam Koto Panjang. Hidup dan membangun keluarga baru tanpa memiliki lahan untuk berkebun dan mendirikan rumah terasa sangat berat. Keluarga baru terpaksa tinggal menumpang di rumah jatah orang tuanya yang sangat sempit. Saat ini satu rumah bisa dihuni oleh 2 sampai 4 keluarga. Hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan budaya masyarakat kita sebagai orang Minang Kabau. Tidak adanya lahan untuk bertani dan berkebun memaksa mereka untuk menjadi nelayan pancing di danau yang hasilnya tidak seberapa; atau mengambil kayu secara ilegal di hutan sekitar danau.

Jelas bukan pekerjaan yang mereka inginkan karena tingginya ancaman mereka akan ditangkap dan dipenjara.

Da Iswadi,

Jauh dari lubuk hati yang terdalam kami juga memohon maaf kepada rakyat korban pembangunan Dam Koto Panjang karena tidak dapat membantu perjuangan yang panjang dan berat ini. Namun kami akan selalu ada bersama kawan-kawan untuk melanjutkan perjuangan ini.



Salam,

Chaus

\_\_\_\_\_ *ttd*



KRISIS  
ENERGI DAN PELAYANAN DASAR



BIOREGION  
PESISIR TIMUR



PROVINSI  
LAMPUNG

## LISTRIK UNTUK SIAPA ?

KAPASITAS  
**2.658 MW**



**LAMPUNG**

# **LAMPUNG:**

## **listrik untuk siapa?**

---

**Yang Terhormat,**  
**Bang Karya**  
**(Gelar Karya Niti Jaman)**

**Perwakilan Masyarakat yang gigih membela hak-haknya**  
**Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan,**  
**Provinsi Lampung**

Bang Karya yang terhormat,  
Perkenalkan nama saya Rizani, asal lembaga Yayasan Mitra Bentala Lampung.

Saya rasa kita memang belum pernah bertemu dan bertatap muka, namun saya tertarik untuk menyampaikan sesuatu yang selama ini menjadi isu yang cukup santer terkait dengan pengembangan energi panas bumi di Register 3 Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

Dari informasi dan diskusi secara intensif dengan Bapak Hermansyah, saat itu menjabat Kepala Departemen Advokasi WALHI Lampung sedangkan saat ini jabatan beliau adalah Direktur Wanacala Lampung, nampaklah kepada saya bahwa rencana yang sedang dikembangkan untuk pengelolaan panas bumi telah menimbulkan friksi, gesekan-gesekan, di antara kelompok masyarakat adat yang ada di sekitar

Gunung Rajabasa. Telah muncul kesenjangan dan saling tidak percaya antar tokoh adat dan masyarakat di Lampung Selatan. Telah timbul juga kecurigaan dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) antara yang mempertahankan harga diri dan yang membela kepentingan perusahaan.

Alasan yang cukup mendasar, menurut sejarah, adalah bahwa ada 4 gunung di Lampung yang dianggap sebagai nilai budaya atau simbol Lampung. Merusak 4 gunung ini berarti sudah merusak budaya Lampung. Keempat gunung itu adalah: Gunung Tanggamus, Gunung Pesagi, Gunung Seminung, dan Gunung Rajabasa.

Gunung Rajabasa memiliki kekhususan karena di situlah letak kekuatan budaya Lampung, yaitu pada situs-situs yang ada di gunung ini. Oleh karena itu Gunung Rajabasa dinilai sebagai pondasi adat Lampung Saibatin (Lampung Pesisir).

Bang Karya,

Yang lebih langsung kita alami adalah pertanyaan besar kita yang muncul terkait dengan Gunung Rajabasa sebagai sumber air bagi warga sekitar. Karena disinyalir bahwa pengoperasian geothermal ini membutuhkan air yang banyak dan bisa menguras air yang selama ini dimanfaatkan oleh warga sekitar. Oleh karena itu warga tidak mau adanya kegiatan dapat merusak sumber air dan pasokan air bagi warga sekitar.

Nah, isu yang digulirkan untuk mempengaruhi warga adalah bahwa keberadaan geothermal ini untuk memenuhi kebutuhan listrik di Lampung. Namun kita bisa bertanya kemudian: "Siapa yang menjamin bahwa listrik yang ada akan digunakan untuk masyarakat sekitar?"

Memang persoalan listrik ini adalah hal yang sangat urgen bagi masyarakat. Kita semua telah merasakan betapa tidak nyamannya kejadian 'byar pett'. Listrik begitu penting bagi kehidupan kita saat ini. Listrik merupakan bentuk energi yang mampu menggerakkan berbagai sektor kehidupan. Listrik juga berperan penting guna mendukung gerak

ekonomi. Industri-industri akan berhenti beroperasi jika saja listrik sebagai motor penggerak tidak dapat tersedia.

Pendek cerita, tak ada listrik maka 'mati' sudah sebagian hidup kita di alam ini. Produktivitas dunia industri pun akan menurun. Peran yang begitu penting membutuhkan ketersediaan listrik yang cukup. Agar sekiranya di kemudian hari listrik tidak menjadi masalah sosial yang dapat mengganggu stabilitas negara, menurut pemerintah, maka berbagai proyek dikembangkan oleh negara untuk mencukupi ketersediaan energi.

Nah, ini salah satu contohnya di provinsi kita. Proyek ini, yang dari seluruh rangkaian perizinan<sup>2</sup> yang harus dilalui, hanya IPPKH yang belum diterbitkan, diharapkan dapat menjamin penyediaan listrik untuk Kabupaten Lampung Selatan untuk jangka waktu yang lama, sekaligus memenuhi sekitar 50% kebutuhan listrik di Lampung, sekaligus juga diharapkan meningkatkan penerimaan bagi APBD Kabupaten Lampung Selatan.

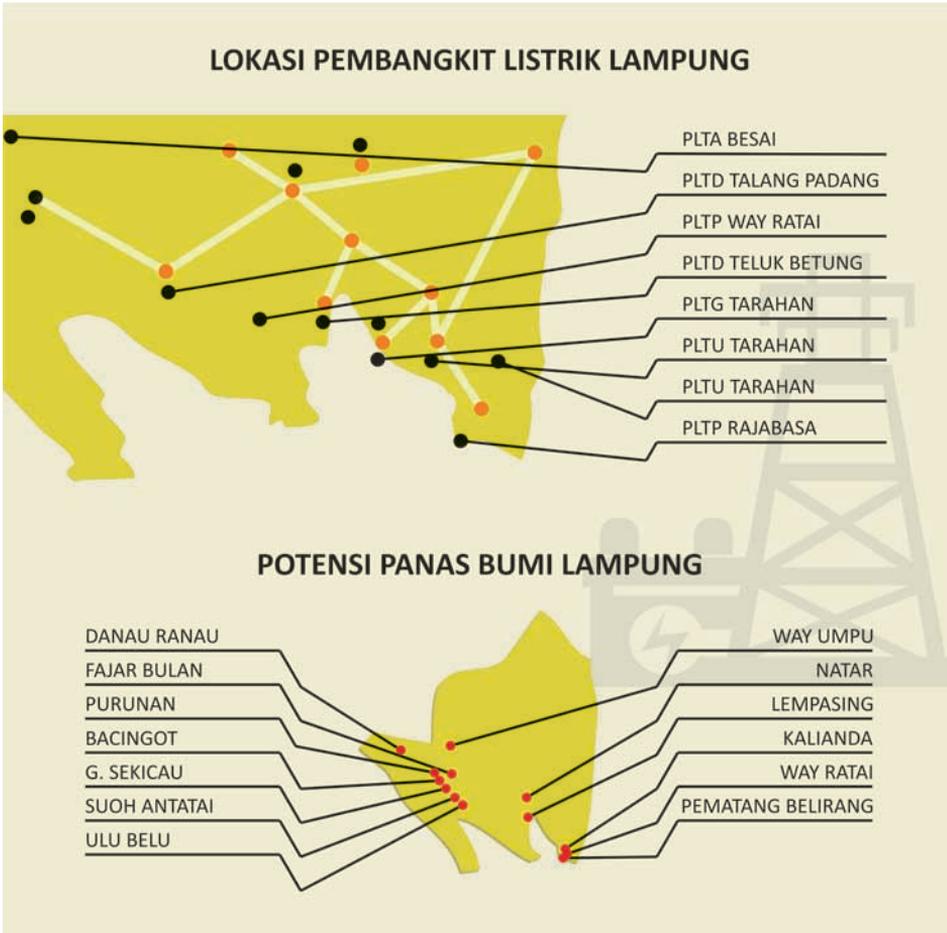
Katanya setiap kenaikan kebutuhan listrik sebesar Rp 1 akan mengakibatkan kenaikan keluaran ekonomi (*economic output*) sebesar Rp 2,07. Sedangkan dari sudut investasi, katanya setiap tambahan gaji lokal sebesar Rp 1 akan mengakibatkan kenaikan keluaran ekonomi sebesar Rp 2,9.

Proyek PLTP ini katanya juga lebih ramah lingkungan ketimbang pembangkit listrik berbasis fosil, juga tidak memerlukan lahan yang luas, tidak tergantung cuaca, tidak tergantung pemasok, tidak tergantung ketersediaan fasilitas pengangkutan dan bongkar muat pasokan bahan bakar.

Pendek kata, proyek ini tampil sebagai proyek sempurna yang tidak ada kelemahannya, tidak ada masalahnya bagi kita, warga.

---

<sup>2</sup>Izin Usaha Pertambangan melalui SK Bupati Lampung Selatan No. B/94A/III. 07/HK/2010 Tanggal 14 Mei 2010; Izin Lingkungan berupa UKL/UPL disahkan oleh Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2 Juni 2009; Izin Lokasi dari Bupati Lampung Selatan; Izin Pengambilan Air Permukaan (SIPAP); Kepala Teknik Tambang dari Distamben Lampung Selatan; Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik PLTP Rajabasa kepada PT PLN (Persero) melalui Surat Menteri ESDM; Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara melalui SK Menteri ESDM; Jaminan Kelayakan Usaha PT PLN (Persero) untuk membeli listrik dari PLTP Gunung Rajabasa; Izin Dermaga; dan Izin Pemanfaatan Air Laut.



Bang Karya, sebagai penyegar ingatan saja, listrik dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti air, angin, gelombang, matahari, diesel, batu bara, dan yang sekarang lagi seksi adalah penggunaan panas bumi. Kalau teknologi kita canggih, maka listrik juga dapat dihasilkan dari energi nuklir. Di bawah ini saya tampilkan rencana pembangkitan listrik untuk tahun 2013-2021.

Lebih jauh lagi, pengembangan potensi panas bumi di seluruh Lampung yang ditaksir mencapai 2.658 MW ini bakal menjadi proyek

ambisius untuk mengubah krisis energi menjadi surplus energi. Sebagai provinsi yang berstatus sebagai 'Gerbang Sumatera' tentu Lampung tak ingin tertinggal terutama ketika bangsa ini bergerak seragam dalam skema "MP3EI". Semua proyek sepertinya memang harus dipercepat untuk mencapai target keberhasilan dan meraup untung besar, termasuk tentunya bagi memperbesar PAD Provinsi Lampung.

Luar biasa besar sekali pengembangan energi listrik yang dilakukan di daerah kita, gerbang ekonomi Sumatera dan Jawa ini. Sayangnya, gebyar-gebyar pembangunan dan proyek-proyek di tahun 2014 ini ternyata tidak nyambung

dengan kenyataan bahwa tahun 2014 adalah tahun 'krisis listrik' bagi masyarakat Lampung. 'Byar pet' terjadi di nyaris seluruh kabupaten/kota. Meskipun sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya kondisi demikian juga kerap terjadi.

Di Kota Bandar Lampung sendiri, sebagai ibukota provinsi dan pusat pemerintahan, kondisi kelistrikan semakin 'miris' dimana setiap blok mendapat giliran 'dimatikan' dua hari sekali. Di satu sisi, hal ini memicu kemarahan masyarakat yang menghendaki pemerintah membangun pembangkit listrik yang baru. Namun di sisi lain, kondisi ini dianggap tak lain hanyalah sebuah 'cara' untuk mendapatkan dukungan masyarakat atas beberapa proyek eksplorasi panas bumi di Lampung, termasuk khususnya di Gunung Rajabasa oleh PT Supreme Energy.

Perusahaan ini adalah perusahaan swasta yang akan membangun PLTP Rajabasa sebagai satu dari 4 pembangunan PLTP di seluruh Lampung dengan kapasitas keseluruhan 605 MW. Rencana ini cukup

“  
warga masyarakat  
secara bersama-  
sama dan utuh,  
harus bisa secara  
bijak dan bebas  
memutuskan yang  
terbaik bagi  
keselamatan dan  
kesejahteraan  
warga  
”

mengherankan. PT Supreme Energy, misalnya, kenyataannya tidak membangun pembangkit listrik akan tetapi menjual listrik pada PLN dan telah memiliki perjanjian jual beli listrik dengan PLN.

Yang jelas, Bang Karya dan seluruh warga Lampung alami sendiri, faktanya adalah bahwa masyarakat Lampung masih mengalami mati lampu dan ketergantungan dengan suplai dari Sumatera Selatan. Apakah pemerintah abai dalam pemenuhan energi listrik untuk masyarakat? Bukankah semestinya keberadaan pembangkit listrik yang ada dapat mencukupi kebutuhan masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan itu semakin perlu digaungkan kalau mendengar cerita pengalaman Bang Karya sendiri tentang Proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi di Gunung Rajabasa ini. Dengan area konsesi seluas 19.520 hektare, termasuk di antaranya di dalam kawasan Hutan Lindung Register 3 Gunung Rajabasa seluas 5.200,50 hektare. Pada 2 Maret 2012 telah dilakukan penandatanganan perjanjian pembelian listrik oleh PLN dan Penerbitan Surat Jaminan Pemerintah untuk proyek ini dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya, di awal 2010 proyek ini sudah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP). Rencananya pembangunannya sendiri akan dimulai pada Agustus 2012, yaitu setelah mendapat izin UKL-UPL, izin lokasi, izin penggunaan air permukaan, izin bisnis listrik untuk sementara, dan izin pinjam pakai kawasan hutan.

PLTP Rajabasa dikelola oleh PT Supreme Energy yang didirikan pada akhir tahun 2007 dengan dukungan sebuah konsorsium antara Marubeni, Sumitomo Corporation, dan GDF Suez. Ketiganya itu adalah raksasa-raksasa perusahaan di dunia. Sesudah melakukan survei pendahuluan di 3 WKP (Muara Laboh, Rajabasa, dan Rantau Dedap) di tahun 2008/2009, yang adalah kegiatan eksplorasi pertama sejak dikeluarkannya UU 27/2003 dan PP 59/2007, PT Supreme Energy bersama-sama dengan mitra-mitra internasionalnya itu kemudian memenangkan tender di ketiga WKP itu pada tahun 2010.

Proyek ini bertujuan untuk membangun sumber listrik yang handal, bersih, berkelanjutan, dan terjangkau. Listrik yang dihasilkan kemudian akan disalurkan melalui jaringan milik PT PLN (Persero).

Diharapkan juga proyek ini akan membantu mengurangi dampak perubahan iklim yang sekarang sangat terasa akibatnya, menggantikan cadangan sumber daya alam yang semakin menipis, dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil (minyak bumi, dll.).

Proyek ini juga dibuat dalam rangka menjamin pasokan listrik di wilayah Lampung untuk kurun waktu panjang serta memberikan kontribusi terhadap target Pemerintah Indonesia dalam Program Percepatan Listrik Tahap Kedua.<sup>3</sup>

Benarkah semua rencana dan maksud bagus dan mulia ini akan memberikan jaminan bagi kesejahteraan kita semua? Ini tentu sebuah pertanyaan yang jawabannya akan kita lihat di episode selanjutnya. Namun yang terjadi di depan mata kita saat ini adalah bahwasanya Kawasan Register 3 Gunung Rajabasa yang merupakan kawasan lindung sebagai cadangan air telah masuk menjadi salah satu kawasan yang diizinkan untuk PLTP ini.

Tentang hal ini, Bapak dan warga lainnya nampaknya telah dibuat berbeda pendapat satu sama lain, banyak yang mendukung dan ada pula yang tak sepakat. Ini rentan sekali untuk terjadinya konflik horizontal.

Bang Karya,

Semua uraian di atas tak lebih tak kurang hanya ingin mengajak Bapak dan semua warga untuk berhati-hati menyikapi segala persoalan ini, banyak-banyak berpikir dan bermusyawarah di antara warga, dan berkonsultasi dengan berbagai pihak supaya warga masyarakat secara bersama-sama dan utuh, terutama warga yang terdampak langsung, bisa secara bijak dan bebas memutuskan yang terbaik bagi keselamatan dan kesejahteraan warga dan kita semua.

---

<sup>3</sup>Bahan dari Presentasi PT. Supreme Energy

Saya juga bermimpi Bang Karya dan warga, termasuk saya sendiri, berkat ancaman-ancaman dan kerusakan-kerusakan penghidupan dari proyek-proyek pembangunan listrik ini, akan semakin termotivasi untuk mengembangkan dan membangun sendiri inovasi-inovasi sederhana, tepat guna, dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan energi keluarga dan kampung kita sendiri. Pada saat itulah baru kita bisa mengatakan bahwa kita telah mandiri dan berdaulat dalam hal energi. Semoga.

Salam,

**Rizani**

\_\_\_\_\_ *ttd*

## SIASAT PENGORGANISASIAN WARGA

Semua warga untuk berhati-hati menyikapi segala persoalan ini, banyak-banyak berpikir dan bermusyawarah di antara warga, dan berkonsultasi dengan berbagai pihak supaya warga masyarakat secara bersama-sama dan utuh, untuk memutuskan yang terbaik bagi keselamatan dan kesejahteraan warga dan kita semua.



Jangan lupa mengawasi elit pimpinan desa dan kampung, berikan pertimbangan-pertimbangan kepada mereka, agar sekiranya mereka dapat mengambil keputusan yang tepat.

## SIASAT MELISTRIKI SENDIRI

Mengembangkan dan membangun sendiri inovasi-inovasi sederhana, tepat guna, dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan energi keluarga dan kampung kita sendiri.

- Buat Mikrohidro, jika kawasan kita memiliki sumber air
- Manfaatkan kotoran sapi sebagai biogas, jika ternak kita ada
- Solar Sel, dapat saja kita kembangkan jika dengan biaya menjadi pelanggan PLN cukup mahal.





KRISIS  
TAMBANG DAN PERKEBUNAN



BIOREGION  
PESISIR SELATAN



PROVINSI  
BENGKULU

**JOKO ANAK PESISIR**

# TOLAK TAMBANG PASIR BESI



# BENGKULU:

## joko anak pesisir

---

**Teruntuk:**

**Nak Joko**

**di Desa Pengo Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma**

**Provinsi Bengkulu**

Joko saudaraku,

Surat ini sengaja kutulis untukmu. Mungkin surat ini akan kau mengerti setelah kau dewasa nanti.

Aku melihatmu dan saudaramu yang masih kecil ikut berpanasan-panasan mengikuti orang tuamu yang lantang memegang mikrofon menyuarakan "Tolak Tambang Pasir Besi di Wilayah Kami" di hadapan ribuan massa yang jauh-jauh datang ke kompleks pemerintahan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.

Kalian datang hanya untuk menyuarakan bahwa kampung kalian tidak ingin menjadi seperti Kepulauan Bangka Belitung yang harus rela paksa melayani negara-negara Eropa dan Amerika, tanpa mendapatkan apa pun selain lubang-lubang besar dan air-air dengan sedimentasi merkuri dan zat-zat keras lainnya yang mereka tinggalkan.

Joko, mungkin kau harus tahu bahwa saat ini provinsi kita dijajah dan dihilangkan kedaulatan rakyatnya. Aku sungguh berharap kau tahu.

Bisa saja kau tidak tahu, sebab kau sebagai anak, harapan orangtuamu yang dibesarkan di kawasan pesisir, yang setiap hari biasa saja

mendengarkan geleguran suara ombak yang keras dari laut Samudera Indonesia, seringkali tidak menduga ancaman di balik suara geleguran ombak itu. Nah, perlu juga kau tahu bahwa kampung yang kau tinggali adalah kawasan yang sangat rentan dengan hantaman ombak laut samudera yang mungkin akan datang di kemudian hari, bahkan lebih besar lagi daripada yang biasa kau lihat. Mungkin akan sama seperti yang pernah terjadi di Aceh dan Mentawai, yang pastinya jangan sampai hal itu terjadi di kampungmu.



Maka dari itu kau berkewajiban menjaga alam ini jangan sampai ia marah, karena kemarahannya akan menyulitkanmu dan orang kampungmu juga.

Kau juga perlu tahu dari cerita jauh-jauh datang berombongan ke kompleks pemerintahan Kabupaten Seluma itu, bahwa warga kampungmu itu telah berhasil mengusir sebuah kekuatan perusahaan global yang disokong otoritas pihak yang berwenang. Negara kita pun dapat ditaklukkannya.

Namun, kau dan warga desamu yang sangat terisolir di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, yang hanya berlatar belakang pendidikan

dan ekonomi menengah ke bawah, bisa membuktikan bahwa kalian dapat mengusir mereka dari kampung.

Kalian juga telah berhasil menghentikan aktivitas perusahaan tambang pasir besi yang dapat merusak sumber penghidupan dan kehidupan mereka. Keberhasilan itu telah juga menginspirasi warga desa tetangga dan kampung-kampung perbatasan lainnya. Walau hanya dilakukan di tingkat desa, keberhasilan perjuangan warga yang bermodalkan keberanian, solidaritas, dan konsistensi itu ternyata juga berkontribusi dalam perlawanan terhadap skenario pelumpuhan industri baja nasional yang dilakukan oleh pihak asing. Hal itulah yang telah memberikan dampak besar sehingga mampu mengguncang pasar saham di Eropa. Kamu bisa mendalami lebih jauh hal-hal ini dari koran atau internet. Aku sendiri mempelajari sebagian besar hal-hal ini dari situ, selain dari diskusi-diskusi dengan teman-teman berbagai kalangan.

Joko, yang jelas kamu tahu, perjuanganmu dan warga kampungmu, mungkin tanpa kamu sadari betul-betul, telah memberikan dampak yang sangat merugikan bagi PT FN. Sebenarnya jika tidak ada perlawanan dari warga kampungmu, pihak perusahaan dapat mengeruk kandungan pasir di kampungmu yang hasilnya cukup mengiurkan, yaitu senilai Rp 19,9 triliun dari lahan seluas 3.546 hektare di pesisir Pantai Seluma. Sehingga sangat wajar jika pada awalnya warga kampungmu diberi

“  
...hilangnya remis  
juga mengakibatkan  
hilangnya ruang  
untuk berbagi  
informasi dan  
mencari solusi yang  
biasa dilakukan  
warga kampungmu.  
Teman-teman  
sebayamu pun  
kehilangan ruang  
untuk belajar dan  
bermain sembari  
mencari remis

”

tawaran yang menggiurkan oleh PT FN, yaitu janji ganti rugi sebesar Rp 40 juta per hektare.

Namun yang harus kau ingat, janji itu tidak pernah terbukti. Itu sekadar janji di awal proses untuk meruntuhkan perlawanan warga. Kemudian yang terjadi justru sebaliknya. Ayahmu dan warga kampung dipaksa menerima ganti rugi sebesar Rp 2,5 juta per hektare oleh perusahaan yang menggunakan jasa otoritas pemerintah desa dan preman-preman. Dan saat ini wilayah yang hanya dijual senilai 2,5 juta tersebut menjadi tempat beroperasinya aktivitas perusahaan yang mengakibatkan hilangnya remis dan ikan. Padahal kau tahu sendiri, remis dan ikan adalah sumber lauk sehari-hari dan pendapatan warga di kampungmu.

Kau juga harus bertanya kepada saudara ayahmu, yakni Mak Ompong, yang menjadikan hasil menjual remis sebagai satu-satunya sumber pendapatan untuk membiayai kebutuhan keluarga dan pendidikan anaknya. Bagaimana nasibnya sekarang? Saat ini beliau justru menelan kekecewaan karena harus merelakan mata pencariannya hilang.

Lebih parah lagi, hilangnya remis juga mengakibatkan hilangnya ruang untuk berbagi informasi dan mencari solusi yang biasa dilakukan warga kampungmu. Teman-teman sebayamu pun kehilangan ruang untuk belajar dan bermain sembari mencari remis.

Joko saudaraku,

Kau juga harus tahu bahwa pengerukan pasir yang dilakukan perusahaan tersebut turut andil dalam meningkatkan laju abrasi dan merusak kawasan hutan pantai. Padahal kawasan hutan tersebut berfungsi sebagai pelindung desa dari ancaman gelombang pasang dan tsunami. Kenyataannya adalah hutan pantai yang rusak membuat warga kian rentan menjadi korban bencana. Aktivitas perusahaan juga berdampak negatif terhadap ketersediaan air. Areal persawahan mulai mengalami kekeringan, sehingga produksi padi menjadi tidak maksimal. Selain itu tanaman palawija menjadi tidak subur. Penurunan produktivitas padi dan palawija inilah yang dapat menurunkan kualitas perekonomian warga.

Begitu pula dengan mobilitas, hilir mudiknya truk pengangkut pasir yang ikut memperparah kondisi infrastruktur jalan. Akibatnya, mobilitas warga kampung untuk keluar dan masuk desa menjadi terganggu. Selain itu mobilitas truk dan operasi mesin tambang juga dapat memicu debu yang beterbangan dan menimbulkan suara yang bising. Kondisi inilah yang dapat mengakibatkan warga kampungmu rentan terserang berbagai penyakit.

Lubang bekas galian pasir yang menganga, secara perlahan membentuk semacam kolam besar. Hal ini dapat mengancam keselamatan warga, bahkan salah seorang teman sebayamu, siapa namanya aku lupa, telah menjadi korban yang tewas tenggelam di kolam tersebut. Warga kampungmu juga mengkhawatirkan bahwa suatu saat kolam-kolam raksasa tersebut jebol sehingga dapat menenggelamkan desa.

Selain dampak-dampak itu, ada juga dampak dahsyat yang sifatnya non-fisik. Ini adalah dampak lainnya yaitu modal sosial yang dimiliki warga kampungmu yang perlahan hancur. Ini akibat timbulnya kelompok pro dan kontra terhadap perusahaan tambang. Pro kontra ini semakin melebar sehingga memicu rasa saling curiga di antara warga kampungmu. Kemudian muncul larangan menikah antar keluarga yang pro dan kontra, larangan mendatangi rumah-rumah warga yang berbeda pandangan, dan larangan mengikuti proses pemakaman keluarga yang berbeda pendapat.

Untunglah, sadar akan berbagai dampak negatif tersebut, warga kampungmu mulai melakukan perlawanan. Namun, aksi yang dilakukan tidak memberikan hasil yang memuaskan. Sehingga warga pun nyaris putus asa. Perlu kau ingat bahwa di saat keputusan itulah semangat berjuang kembali berkobar setelah mengetahui keberadaan WALHI Bengkulu dan mendatangi kantor WALHI Bengkulu untuk meminta dukungan pada pertengahan Agustus 2008.

Dari pertemuan itu, warga kampungmu mulai menindaklanjuti kesepakatan agar dapat berjuang bersama aktivis WALHI Bengkulu dan melakukan sejumlah pertemuan. Selanjutnya disepakati bersama untuk melakukan aksi ke kantor DPRD Provinsi Bengkulu pada 20 Agustus

2008. Secara swadaya, warga pun mempersiapkan perlengkapan dan peralatan aksi seperti mobil, spanduk, dan lainnya. Aksi warga kampung di kantor DPRD Provinsi membuahkan hasil berupa rekomendasi agar Pemda Seluma mencabut izin PT FN. Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Bupati Seluma akhirnya menemui warga kampungmu dan menjanjikan akan menghentikan aktivitas PT FN. Namun faktanya kemudian, PT FN masih tetap beraktivitas hingga pertengahan Desember 2008.

Menyikapi hal tersebut, warga kampungmu memutuskan untuk aksi protes ke kantor Bupati Seluma pada 24 Desember 2008. Jumlah warga kampung yang ikut berpartisipasi dalam aksi tersebut mencapai 3.000 orang, termasuk kau yang saat itu masih kecil. Aksi dilakukan dari pagi hingga malam hari. Saat warga kampungmu mendirikan tenda dan memutuskan untuk menginap di kantor bupati, barulah Sekda Seluma mewakili Bupati Seluma menemui warga. Dari pertemuan tersebut, Sekda Seluma sepakat mengeluarkan surat perintah agar PT FN menghentikan aktivitasnya sampai ada penyelesaian dan persetujuan warga. Untuk menindaklanjuti kesepakatan itu, Bupati Seluma memediasi warga kampungmu dan perusahaan melalui pertemuan yang dihadiri unsur muspida pada 16 Januari 2009.

Tahukah kau bahwa di dalam pertemuan tersebut pemilik PT FN, Rustaman, menyatakan akan mundur. Anehnya, Bupati Seluma justru memerintahkan PT FN untuk tetap beroperasi di bawah perlindungan aparat. Bupati Seluma juga mengeluarkan pernyataan yang membuat warga semakin marah. Warga pun langsung meninggalkan pertemuan dan menggelar rapat di desa serta memutuskan untuk mengungsi ke kantor bupati, sebagai bentuk aksi protes warga terhadap keputusan tersebut.

Aksi mengungsi dilakukan pada 24 Januari 2009, dengan jumlah massa yang berpartisipasi sebanyak 2.025 orang. Warga menuju kantor Bupati, menempuh perjalanan selama hampir tiga jam dengan menggunakan truk, pickup, dan sepeda motor. Setiba di kantor bupati, warga diperhadapkan pagar kawat berduri pada tiang yang dicor dengan semen. Perhadapan itu juga dipenuhi oleh aparat kepolisian, Satpol PP, dan mobil *water canon*. Hal itu tak ayal membuat siapa pun akan gentar. Akan tetapi justru sebaliknya, penghadangan dengan pagar kawat berduri itu memicu kemarahan warga kampungmu karena merasa dihina. Sebab, warga biasa menggunakannya untuk melindungi kebun dari gangguan sapi dan babi. Warga pun menabrakkan mobil ke pagar kawat berduri, dan sebagian warga lainnya berlari sambil melempari batu, mengejar aparat kepolisian dan satpol PP. Aksi mengungsi di kantor bupati itu bertahan selama tiga hari dua malam.

Saat Maghrib pada 26 Januari 2009 bertemulah perwakilan Pemda Seluma, Polres Seluma, dan warga. Di pertemuan itu disepakati bahwa Pemda Seluma mengeluarkan surat larangan kepada PT FN untuk beroperasi kembali.

Nah berikutnya kemudian, ini juga perlu kau ingat, keberhasilan warga Desa Penago Baru dan sekitarnya itu menginspirasi warga Desa Pasar Talo untuk menghentikan aktivitas eksplorasi PT Pringgondani Rizki Utama di Desa Pasar Talo dan Desa Padang Batu. Perjuangan warga Desa Pasar Talo sempat menimbulkan peristiwa menegangkan sebanyak dua kali.

Pertama, warga menangkap dan mengusir paksa calon investor asal Australia dan Cina yang meninjau lokasi. Kedua, warga menangkap

“  
...kampungmu dan kampung-kampung lainnya punya gerakan yang sama seperti pendahulu negara ini sebagai pejuang dalam mempertahankan kemaslahatan kehidupan orang banyak dari ancaman industri yang rakus ruang  
”

dosen beserta mahasiswa asal perguruan tinggi di Yogyakarta yang beralasan melakukan penelitian, dan menghancurkan metal detector yang mereka bawa. Warga menahan dosen dan mahasiswa tersebut di masjid Pasar Talo. Penahanan dilakukan hingga Wakapolres Seluma beserta pasukan datang melakukan mediasi. Aksi penahanan berakhir setelah pihak perusahaan menyepakati untuk menghentikan aktivitas eksplorasi dengan membayar denda adat senilai Rp 30 juta.

KEBERHASILAN warga Desa Penago Baru dan Pasar Talo juga menginspirasi warga Desa Pasar Seluma. Pada Mei 2010, warga Desa Pasar Seluma menemui WALHI Bengkulu untuk menyikapi keberadaan PT FN di muara Sungai Seluma dan PT Faminglevto Bhakti Abadi di perbatasan Desa Pasar Seluma dan Desa Pasar Ngalam. Dari pertemuan tersebut, disepakati juga bahwa warga akan memberikan surat kepada Pemda Seluma.

Namun, surat yang dikirim warga tidak kunjung mendapatkan jawaban. Kemudian, warga menggelar rapat dan memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi ke kantor Bupati. Dalam aksi tersebut, warga bertemu dengan Sekda Seluma. Sekda berjanji akan meninjau desa, kemudian akan meminta perusahaan menghentikan aktivitas operasinya.

Sekda Seluma menepati janjinya untuk meninjau desa. Namun kedatangannya direspon dengan kemarahan warga. Janji pemda Seluma untuk menghentikan aktivitas perusahaan tersebut tidak ditepati. Secara spontan warga pun berusaha menghentikan aktivitas perusahaan yang selanjutnya memicu kerusuhan antara warga dan pekerja tambang. Dalam kerusuhan itu, warga menghancurkan *camp*, mesin dan peralatan milik perusahaan.

Tiga jam kemudian, setelah kerusuhan berakhir, warga menyaksikan puluhan truk polisi yang dipimpin Kapolres Seluma menuju Desa Pasar Seluma. Menyikapi hal itu, warga pun berkumpul di dalam masjid. Tak lama berselang, ratusan polisi bersenjata mengepung masjid. Melihat kondisi tersebut, kaum perempuan dan anak-anak meninggalkan rumah untuk membentuk pagar betis mengelilingi halaman masjid.

Setelah beberapa kali mendengar teriakan kapolres dengan menggunakan pengeras suara yang meminta agar kaum pria keluar dari masjid, dua tokoh masyarakat pun keluar dari masjid. Kedua tokoh warga tersebut mempertanyakan perlakuan polisi yang mengepung warga laksana teroris. Dalam diskusi, kapolres mengaku mendapatkan laporan bahwa warga menghancurkan rumah-rumah, menganiaya Kepala Desa Pasar Seluma dan membunuh pekerja tambang. Kapolres juga memperlihatkan foto yang diperolehnya dari pekerja tambang. Setelah mendapatkan penjelasan bahwa laporan tersebut tidak benar dan foto yang diperoleh adalah foto tembok rumah yang sudah roboh sejak lama. Kapolres pun memerintahkan pasukannya untuk meninggalkan lokasi.

Namun, beberapa hari kemudian delapan warga Desa Pasar Seluma ditetapkan sebagai tersangka perusakan aset perusahaan dan ditahan di Polda Bengkulu. Dan hal itu menimbulkan aksi protes yang dilakukan oleh kalangan pemuda Desa Pasar Seluma selama sekian banyak hari.

Di front lainnya, kaum pria dan perempuan dewasa melakukan lobi dengan berbagai elemen pemerintah, termasuk DPRD Provinsi. Merespon aspirasi warga, Komisi I DPRD Provinsi memanggil Direktorat Reskrim Polda Bengkulu. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa PT FN dan PT Faminglevto Bhakti Abadi harus menghentikan aktivitasnya dari Desa Pasar Seluma hingga perbatasan Bengkulu - Lampung, sejauh 200 kilometer.

Perlawanan juga terjadi di tempat lain. Warga juga melakukan rangkaian aksi protes agar Pemda Kaur menghentikan perizinan PT Selomoro Banyu Artho, milik mantan Kapolda Bengkulu. Alhasil, pada 28 Desember 2010, Bupati Kaur mencabut izin yang telah diberikan kepada perusahaan tersebut.

Ini semua adalah informasi yang mesti kau ingat di masa yang akan datang, yaitu bahwa kampungmu dan kampung-kampung lainnya punya gerakan yang sama seperti pendahulu negara ini sebagai pejuang dalam mempertahankan kemaslahatan kehidupan orang banyak dari ancaman industri yang rakus ruang.

Keberhasilan warga kampungmu telah mengubah semua paradigma warga di Seluma, khususnya tentang kalian orang yang dianggap sepele tetapi ternyata bisa berbuat banyak sehingga mampu menginspirasi warga Desa Padang Manis dan Desa Wayhawang, Kaur.

Joko saudaraku,

Aku tahu, kau hanyalah seorang anak kecil yang saat ini masih berusia 14 tahun. Tetapi kau tidak menjadikan hal itu sebagai alasanmu untuk tidak membela warga dan kampungmu. Kau mampu menjadi inspirator bagi masyarakat yang mengalami hal serupa untuk terus berjuang mempertahankan haknya. Saya dan teman-teman percaya bahwa suatu saat nanti kau akan ikut serta untuk membela warga dan negara yang menjadi korban dari praktik-praktik perusahaan yang merugikan. Tetaplah mengabdikan kepada kedua orangtuamu dan tegakkanlah keadilan di negara kita ini.

Hormat kami,

**Beni Ardiansyah**

\_\_\_\_\_ *ttd*

## SIASAT

MENGAKSES INFORMASI TENTANG  
PERIJINAN PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN



### Akses Informasi Perkebunan :

- Direktorat Jenderal perkebunan, Kementerian Pertanian
- Gubernur
- Dinas Perkebunan
- Kantor Pusat pelayanan Terpadu (KP2T)
- BLH Provinsi
- Kanwil BPN
- Dinas Kehutanan Provinsi
- Pengaduan ke RSPO
- Bappeda Provinsi
- DPRD

### Berdasarkan :

1. Permentan No. 98 tahun 2013
2. UU No. 41 Tahun 2009
3. UU No. 32 Tahun 2009
4. UU No. 4 Tahun 2011
5. UU No. 23 Tahun 2013

### Akses Informasi Pertambangan :

- Kementerian ESDM
- Gubernur
- Dinas ESDM/Distamben
- Kantor Pusat Pelayanan Terpadu (KP2T)
- BLH Provinsi
- Dinas Kehutanan Provinsi
- Bappeda Provinsi
- DPRD

### Berdasarkan:

1. Perda No. 5 Tahun 2013
2. Peraturan Presiden No 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang didapat dari industri Ekstraktif.
3. UU No. 9 Tahun 2009
4. UU No. 32 Tahun 2009
5. UU No. 23 Tahun 2013

Sengketa Informasi di Komisi  
Informasi Sebagai amanat  
UU No.14 Tahun 2008

MEDIASI

PUTUSAN  
MENANG atau KALAH



KRISIS  
IDENTITAS DAN SOSIAL-BUDAYA

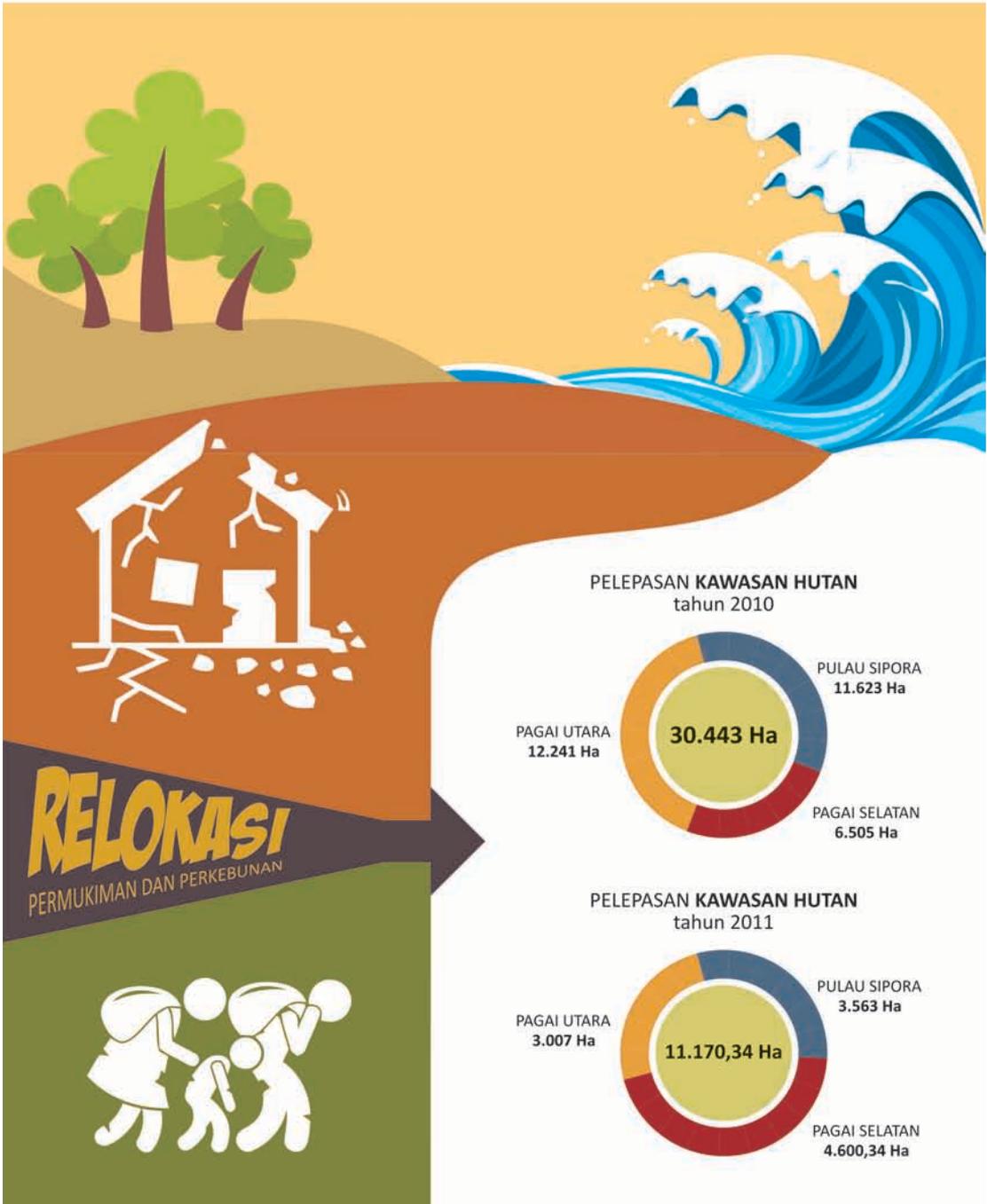


BIOREGION  
PESISIR BARAT



PROVINSI  
SUMATERA BARAT

## HUTAN ADALAH KUNCI KESELAMATAN MENTAWAI



# SUMATERA BARAT:

## hutan adalah kunci keselamatan mentawai

---

**Kepada:**

**Bang Raport Simanjuntak**

**Di Mapaddegat-Tuapeijat**

**Kab. Kepulauan Mentawai**

Bang Raport yang saya hormati,

Pertama-tama aku menyampaikan maaf kepada dirimu dan teman-teman kita di Kabupaten Kepulauan Mentawai karena sudah lebih dari 3 tahun ini aku tidak bisa bersama-sama lagi. Sudah tiga tahun lebih kita tidak bermain bersama dengan kawan-kawan di Mentawai, menelusuri sungai dengan *speedboat* atau pompong, menerobos Selat Mentawai dan mencicipi Samudra Hindia saat mengelana menuju kampung-kampung di bagian pantai barat Kepulauan Mentawai.

Bang Raport yang saya sayangi,

Aku terus mengikuti sepak terjangmu beberapa tahun ini dalam tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Kepulauan Mentawai. Aku turut bersuka hati dan berbangga karena Bang Raport dan teman-teman Masyarakat Adat di Mentawai menjadi bagian dari kemajuan pergerakan masyarakat adat di seluruh nusantara, bahkan di seluruh dunia.

Akan tetapi, Bang, aku miris.

Miris saat kasat di depan mata kulihat penghancuran hutan dan perampokan tanah di pulau kita Mentawai ini. Padahal hutan itu lah salah satu kunci keselamatan warga Abang, Masyarakat Adat di Mentawai.

Mentawai adalah kumpulan pulau-pulau kecil dengan struktur tanahnya yang merupakan tanah liat memiliki kemampuan yang rendah untuk menyerap air. Akibatnya air hujan yang turun langsung menjadi aliran larian air di permukaan. Buruknya kondisi tutupan lahan karena berkurangnya pohon membuat kemampuan tanah untuk menyerap air yang jatuh di permukaannya menjadi semakin rendah lagi, sehingga volume aliran air di permukaan tanah pada saat hujan lebat menjadi sangat tinggi, yang diikuti dengan sedimentasi berupa lumpur hasil pengikisan air jika daerah tersebut tutupan hutannya sudah berkurang. Ini terlihat ketika musim hujan, dimana sungai-sungai yang meluap merupakan sungai-sungai yang daerah hulu dan daerah tangkapan airnya telah mengalami pembukaan oleh aktivitas pengambilan kayu secara besar-besaran sehingga membuka tutupan hutan yang ada.

Masih segar dalam ingatan kita, Bang, di bulan April tahun 2013 dimana banjir melanda beberapa desa di Pulau Siberut dan itu merupakan banjir terbesar dalam rentang waktu 20 tahun yang dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Desa-desa yang mengalami banjir tersebut adalah desa-desa yang memang daerah hulu sungainya merupakan bekas areal konsesi HPH dan IPK beberapa tahun yang lalu.

Karena kondisi khusus tata air ini maka satu-satunya sumber air bagi warga di Kepulauan Mentawai adalah air permukaan. Air permukaan adalah air yang turun dari langit sebagai hujan, berkumpul dan tertahan karena adanya pohon-pohon dan mengalir menjadi sungai-sungai kecil di permukaan tanah.

Bisa dibayangkan bagaimana jadinya bila hutan yang mengelola air permukaan rusak bahkan punah. Siapa yang akan menangkap air hujan dan mengendalikan air permukaan di Pulau Mentawai? Tidak mungkin bagi masyarakat Mentawai untuk menggali sumur demi mendapatkan air bawah tanah, karena jika mereka menggali maka yang akan keluar bukan air bawah tanah akan tetapi air laut yang akan keluar dari sumur galian tersebut.

Kemudian, Mentawai berada tepat di pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, jadi sangat rawan gempa. Karena kerawanan gempa ini maka bangunan yang paling cocok adalah bangunan dari kayu, rumah-rumah kayu, sebagaimana selama ini rumah-rumah warga di Mentawai. Terus apa jadinya saat tidak ada lagi hutan di Mentawai? Dari mana akan tersedia kayu untuk rumah-rumah warga?

Kesulitan akan bahan kayu perumahan jelas terasa ketika setelah gempa bumi yang diikuti tsunami pada tanggal 25 Oktober 2010 dimana masyarakat yang desanya terkena tsunami direlokasi ke tengah pulau. Walaupun tempat relokasi untuk pemukiman baru masyarakat korban tsunami tersebut berada dalam kawasan hutan akan tetapi 5 tahun setelah tsunami ternyata hunian tetap masyarakat di lokasi relokasi masih belum selesai. Salah satunya karena ketiadaan kayu.

Bukan hanya untuk rumah tapi juga untuk sampan. Dari mana pula akan tersedia kayu untuk membuat sampan-sampan yang sampai sekarang tetap menjadi alat transportasi utama antar kampung di Kepulauan Mentawai.

Kemudian tentang pangan. Pangan utama di Mentawai adalah keladi, sagu, dan pisang. Pada saat kebun-kebun keladi, sagu, dan pisang itu berubah menjadi hamparan kelapa sawit, warga Mentawai kehilangan sumber pangan sendiri dan harus mengandalkan pasokan dari Padang. Bayangkan kemudian apa yang terjadi pada saat Kepulauan Mentawai terisolasi total, yang kadang bisa sampai sebulan penuh, saat musim ombak besar dan badai yang terjadi setiap tahun itu.

Bang Raport,

Hutan yang adalah sumber keselamatan warga Mentawai semenjak tahun 1970-an sampai sekarang sudah dirampok oleh perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam bentuk HPH (IUPHHK-HA) dan IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) dengan dalih akan membangun perkebunan di Mentawai.

Pulau Siberut adalah yang terbesar di antara empat pulau besar di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pulau seluas 403.300 hektare ini oleh pemerintah dibagi peruntukannya untuk Taman Nasional Siberut seluas

190.500 hektare, hutan produksi 166.425 hektare, dan Areal Penggunaan Lain 20.562 hektare. Topografinya bervariasi mulai daerah rawa-rawa hingga lereng-lereng bukit yang terjal.

Di Pulau Siberut ini penebangan hutan skala besar dimulai tahun 1972 ketika pemerintah memberikan izin kepada 4 perusahaan: PT Cirebon Agung dan PT Sumber Surya Semesta di Siberut Utara, PT Carya Pharmin Pulau Siberut dan PT Kayu Siberut di Siberut Selatan. Antara 1972-1993, 3 dari 4 perusahaan tersebut telah memanen totalnya 130.650 hektare hutan dengan jumlah produksi 746.155 m<sup>3</sup> kayu.

Pada tahun 2000-an Pulau Siberut kembali menjadi target pengerukan kekayaan hutannya. Sebut saja Koperasi Andalas Madani (KAM) yang mendapatkan izin konsesi di tahun 2001 seluas lebih kurang 45.650 hektare untuk masa 25 tahun tapi kemudian hanya dalam waktu 7 tahun kemudian sudah menyerahkan kembali izinnya itu ke Menteri Kehutanan. Kemudian PT Salaki Summa Sejahtera yang mendapatkan izin konsesi pada tahun 2004 seluas 48.420 hektare, yang sampai surat ini aku buat masih beraktivitas mengeruk kayu-kayu di Siberut Utara.

Namun Pulau Siberut masih lumayan lah. Ya kan, Bang? Tidak semuanya bisa dikeruk besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan itu, karena ada Taman Nasional Siberut yang wilayahnya mencakup 29,5% dari seluruh wilayah daratan pulau ini. Selain itu, atas persetujuan Pemerintah Indonesia Pulau Siberut juga ditetapkan sebagai Cagar Biosfer sehingga ini agak menghambat aktivitas penghancuran tutupan hutan di Pulau Siberut.

Tiga pulau lainnya mengalami proses yang sama yaitu mengalami pengurusan dan penghancuran tutupan lahannya melalui aktivitas pengambilan kayu secara besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintahan pusat. Di Pulau Pagai Utara Selatan lebih kurang separuh dari luas daratan sudah dikuasai oleh PT MPL (dulunya MPLC) dalam bentuk HPH semenjak tahun 1980-an dan tahun 1995 diperpanjang lagi dengan luas konsesi +83.330 hektare. Di Pulau Sipora semenjak tahun 1980-an juga sudah dikuras oleh PT Bhara Union Lestari dengan luas konsesi +35.000 hektare.

Bang Raport,

Semenjak menjadi kabupaten sendiri di tahun 1999 sampai tahun 2005 ternyata cara pandang yang melihat kawasan hutan di Kepulauan Mentawai sebagai potensi untuk dieksploitasi atau ditebang dan menjadi uang masih saja terjadi, dimana dalam rentang waktu  $\pm 5$  tahun kemudian sudah dikeluarkan sangat banyak Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), yaitu mencapai 37 izin yang tersebar di seluruh Kepulauan Mentawai. Pada tahun 2004 saja luas total konsesi lahan IPK itu sudah 31.244 hektare. Target produksi kayu bulat dari seluruh pemegang IPK itu adalah 1,46 juta meter kubik.

Akan tetapi aneh bin ajaib, LPJ Bupati Kepulauan Mentawai setiap tahun mencantumkan bahwa PAD dari sektor kehutanan di kabupaten ini adalah Rp 0,00. Nol. Kosong.

Kacau balau sekali, ya. Yang mengejutkan juga adalah kenyataan bahwa sebahagian besar izin IPK yang seharusnya hanya di APL dalam praktiknya dipakai untuk menebang di areal Hutan Produksi yang justru juga masih dibebani izin HPH (IUPHHK-HA). Ini karena memang areal IPK yang diberikan sesuai izin ternyata berada di atas areal yang sudah menjadi kebun keladi-sagu-pisang, sumber pangan warga Mentawai, dan kebun cengkeh, dan memang tidak punya potensi kayu lagi.

Bang Raport,

Mentawai merupakan satu-satunya kabupaten kepulauan di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini terdiri dari 40 pulau dan semuanya diklasifikasikan sebagai pulau kecil. Total luas kabupaten adalah 654.600 hektare, terbagi atas 0,4% Hutan Lindung, 58,4% Hutan Produksi, 5,8% Hutan Konversi, 29,1% Taman Nasional, dan 5,4% Areal Penggunaan Lain. Nah secara peraturan perundangan hanya 5,4% inilah yang akan dapat dimanfaatkan oleh warga untuk kebun dan pemukiman, berbagi dengan fasilitas umum, perkantoran dan infrastruktur lainnya.

Bang Raport,

Perkembangan-perkembangan terakhir tentang hutan dan tanah warga Mentawai ini adalah perkembangan yang lebih mengkhawatirkan lagi. Pada tahun tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan pencadangan izin perkebunan kelapa sawit seluas 70.300 hektare kepada PT Siberut Golden Plantation Pratama, PT Mentawai Golden Plantation Pratama, PT Suasti Sidi Amagra, dan PT Rajawali Anugrah Sakti. Pencadangan ini kemudian diperpanjang lagi pada tahun 2010.

### Peta rencana areal konsesi sawit di Pagai Utara



Sumber: dari YCMM

Areal konsesi perkebunan kelapa sawit yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan itu ternyata adalah persis wilayah perkampungan warga dan areal sumber pangan masyarakat berupa kebun keladi-pisang-sagu. Kalau kebun keladi-sagu-pisang berubah menjadi kebun kelapa sawit, dari mana nantinya sumber pangan warga? Apalagi saat Kepulauan Mentawai

menjadi terisolir dan jalur pasokan logistik dari Padang terputus karena ombak besar dan badai?

Bang Raport,

Sekali lagi ingin kukatakan betapa keberadaan hutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi salah satu jaminan keselamatan bagi masyarakat di Mentawai karena di situlah keberlanjutan ketersediaan air, pangan, papan, dan kehidupan warga Mentawai berada.

Setelah hutan-hutan dikeruk dan tanah-tanah dirampas perusahaan-perusahaan HPH dan IPK, mungkin juga nantinya oleh perkebunan kelapa sawit, terbayanglah di depan mata bagaimana krisis air, krisis pangan, krisis perumahan, krisis transportasi, dan bahkan kehancuran generasi masa depan Mentawai mungkin tidak akan terelakkan lagi.

Beberapa daerah seperti Saibi, Sotboyak, Monganpaula sudah mengalami banjir ketika curah hujan tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lebih dari 4 jam. Dahulu mereka tidak pernah mengalami banjir seperti itu.

Air minum di seluruh kepulauan sangat bergantung pada air hujan. Jika hujan terjadi tengah malam, semua orang harus segera bangun untuk mengeluarkan waskom atau ember atau apa saja untuk menampung air hujan. Aku pernah mengalami sendiri hal ini ketika aku menetap di Sipora (Sigitcik dan Beriulou) dari tahun 1998–2000.

Di atas itu semua, harus diingat bahwa ekosistem Kepulauan Mentawai secara keseluruhan adalah ekosistem pulau kecil. Ancaman ekologis terhadap konversi ekosistem alami menjadi perkebunan monokultur dan pembukaan tutupan hutan secara masif akan berpengaruh sangat besar terhadap ekosistem kepulauan tersebut. Artinya, sebagaimana penelitian LIPI di tahun 1995, lahan di Pulau Siberut sangat rentan erosi dan degradasi.

Bang Raport,

Alhamdulillah... sebagai wujud syukur saya, karena kembali berkat perjuangan masyarakat Mentawai bersama dengan kelompok masyarakat yang tergabung dalam berbagai organisasi sebagaimana yang kita lakukan pada tahun 2003–2005, Koalisi Masyarakat Anti Illegal Logging (MAIL) Sumbar berhasil mendesak dan mendorong bupati untuk menghentikan aktivitas IPK di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebagaimana yang sudah sama-sama kita tahu juga bahwa izin pencadangan perkebunan kelapa sawit tidak diperpanjang lagi oleh pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sekarang. Bahkan sesuai informasi yang saya dapatkan dari beberapa kawan bahwa dalam penyusunan RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sedang dilakukan saat ini juga tidak nampak ada alokasi untuk perkebunan kelapa sawit.

Namun, Bang Raport, perjuangan tidak hanya berhenti sampai di sini. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus segera kita lakukan untuk mengisi ruang yang sudah tersedia sehingga masyarakat di Kepulauan Mentawai dapat memanfaatkan sumber daya alamnya namun juga tetap dapat memastikan keselamatan dan keberlanjutan produksi dan konsumsi mereka.

Sudah 30 tahun lebih Abang dan warga Mentawai lainnya hanya menonton hutan dan berbagai kekayaan alam yang ada di pulaumu dipanen dan dirusak orang dari luar, sementara kalian sendiri tidak pernah menikmati kekayaan dari hutan dan alam itu. Justru yang kalian terima adalah perpecahan, bencana, kesulitan pemenuhan kebutuhan air, pangan, papan, dan lainnya. Terancam dan semakin terancam. Sekarang saatnya untuk membalik keadaan.

Saya yakin dengan semangat dan dukungan dari kawan-kawan yang masih bisa bersama-sama denganmu dan kawan-kawan kita di Kabupaten Kepulauan Mentawai akan ada perubahan dan kemajuan yang lebih baik lagi di Mentawai.

Salam hormat dan salut dari ku....

**Khalid Saifullah**

*ttd*

## SIASAT HIDUP DI DAERAH RAWAN BENCANA

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari,

Kita hidup di Pulau Sumatera yang secara geomorfologi dan topografi, suka tidak suka, dikelilingi dan selalu dibayangi ancaman bencana gempa bumi, longsor, banjir, banjir bandang, letusan gunung api, dan tsunami. Namun kondisi itu tidak harus berarti kita harus selalu ketakutan dan was-was.

Untuk tidak selalu berada dalam ketakutan dan was-was akan bencana kita harus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kita terhadap ancaman tersebut. Kita harus berupaya untuk mengurangi risiko ketika ancaman tersebut menjadi bencana. Untuk mengurangi risiko, selain berdo'a kita harus:

1. Mengenali lingkungan tempat kita berada.
2. Mengenali ancaman bencana yang ada disekitar kita.
3. Melengkapi diri dan keluarga dengan pengetahuan tentang ancaman bencana yang ada disekitar kita.
4. Mengurangi kerentanan yang ada pada kita (misalnya, ketika kita berada di daerah rawan gempa maka bangunlah rumah yang ramah terhadap gempa, jangan membangun rumah di kaki bukit yang terjal dan atau ditereng bukit karena banyak korban yang meninggal atau luka bukan karena gempanya akan tetapi karena tertimpa bangunan atau tertimbun longsor setelah gempa).





KRISIS  
TAMBANG DAN PERKEBUNAN



BIOREGION  
PESISIR TIMUR

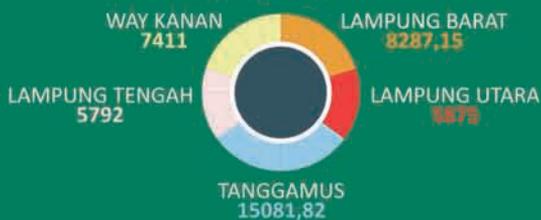


PROVINSI  
LAMPUNG

## PERTARUNGAN RUANG KELOLA HUTAN



### IUP-Hkm LAMPUNG



### WILAYAH KELOLA RAKYAT



### KERUSAKAN FUNGSI HUTAN



# LAMPUNG:

## pertarungan untuk ruang kelola hutan

---

Kepada Yth.

Bapak Wayan Baglur dan Bapak Nasir

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Register 47 dan Ketua Umbul Sekring Bawah

Pak Wayan, masih ingatkah dengan sebuah rencana pendampingan dari sebuah *Non Governmental Organization* (NGO) yang bernama Kelompok Relawan Untuk Penguatan Peran Tani (KaWAN TANI), Lampung untuk mendatangi Kantor Kementerian Kehutanan di Gedung Manggala Wanabakti, di Jakarta Pusat, pada Tahun 2010?

Kunjungan tersebut adalah bagian dari rencana penyampaian kepada Menteri Kehutanan bahwasanya dari sejak lama masyarakat kita telah berada di kawasan hutan tersebut, dengan tata kelola yang selama ini sudah kita lakukan di Kawasan Register 47 Way Terusan, sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang.

Berdasarkan cerita-cerita yang saya dapatkan dari KaWAN TANI jelaslah bahwa Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dengan luas  $\pm 12.500$  hektare asalnya adalah areal pengganti atas pelepasan kawasan hutan yang diperuntukkan bagi PT Bumi Sumber Sari Sakti (BS3) dari masyarakat adat seluas  $\pm 10.510$  hektare yang kemudian dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 785/Kpts-II/2000; sementara sisanya berasal dari kawasan

hutan itu sendiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 256/KPTS-II/2000 yang menetapkan kawasan tersebut sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 47 Way Terusan, Kabupaten Lampung Tengah.

Di lain pihak, areal pengganti itu sendiri sebenarnya berasal dari tiga komunitas adat, yakni:

Masyarakat Adat Desa Mataram, seluas 3.000 hektare,

Masyarakat Adat Desa Mataram Ilir, seluas 3.900 hektare,

Masyarakat Adat Desa Surabaya Ilir, seluas 3.610 hektare.

Kemudian, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 316/Menhut-II/2005 ditunjuklah kawasan itu sebagai Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP KPHP-2009) membagi Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan, Lampung Tengah ke dalam dua blok, yakni Blok Perlindungan dan Blok Pemanfaatan. Alokasi blok perlindungan adalah di rawa-rawa dan daerah vital lainnya sementara blok pemanfaatan akan dikelola dengan pola Hutan Kemasyarakatan (Hkm) dan/atau Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Selanjutnya ada perubahan lagi dalam RPHJP KPHP Model Register 47 Way Terusan tahun 2013-2022; Kawasan Register 47 Way Terusan dibagi ke dalam 3 Blok, yakni Blok Pemberdayaan, Blok Pemanfaatan dan Blok Perlindungan.

Di lain pihak pula, fakta di tingkat lapangan saat ini adalah terdapatnya  $\pm 4.000$  KK dengan  $\pm 20.000$  jiwa yang memiliki ketergantungan dan menjadikan Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan, Lampung Tengah sebagai sumber kehidupannya.

Ketidakpastian, keraguan, dan rasa was-was karena belum adanya kepastian akses kelola menjadikan masyarakat lebih memilih untuk melakukan pemanfaatan dengan tanaman yang bersifat semusim dan tanaman pangan. Bilapun terdapat tanaman kayu, itu hanya di wilayah-

wilayah tertentu sehingga Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan, Lampung Tengah kesannya tidak dalam kondisi rusak.

Kondisinya jauh lebih baik ketika awal masyarakat datang dan memanfaatkan Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan, Lampung Tengah. Kita merasa nyaman bahwa kita memiliki lahan bertahan hidup yang akan menjamin masa depan kita dan anak cucu kita di masa yang akan datang.

Sayang, kenyataan yang harus kita hadapi kurang menguntungkan. Wilayah yang Bapak dan anggota kelompok tani diami dan kelola selama ini adalah wilayah yang akan dijadikan perkebunan tebu dengan skema Hutan Tanaman Industri (HTI). Persetujuan Prinsip (SP1) nya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2010 kepada perusahaan PT Garuda Panca Artha (PT GPA). Dengan adanya persetujuan prinsip ini berarti perusahaan tinggal melengkapi dokumen AMDAL untuk segera mendapatkan izin.

Situasi ini sangat tidak menguntungkan buat Bapak dan anggota Bapak karena akan berhadapan dengan persoalan legalitas. Tentu bukan perkara mudah berhadapan dengan mereka yang konon kabarnya merupakan perusahaan besar dengan kekuatan sumber daya dan finansial yang mereka miliki. Berperkara dengan perusahaan sekaliber itu tentu akan banyak menyita waktu, pikiran, tenaga, dana, dan bahkan segala kemampuan 'luar dalam' yang kita rasa kita miliki.

Untuk menghadapi kekuatan tersebut, kelompok masyarakat sipil (NGO) yang ada di Lampung bergerak, bergabung, atau kata yang keren pada masa ini berkoalisi, dengan maksud agar kita mampu menyeimbangkan antara kekuatan yang mereka miliki dengan itikad/semangat berjuang yang seadanya kita miliki.

“  
...berkoalisi dengan  
maksud agar kita  
mampu  
menyeimbangkan  
kekuatan yang  
mereka miliki  
dengan seadanya  
itikad/semangat  
juang kita  
”

Untuk memperkuat perjuangan Bapak, kelompok NGO membentuk Koalisi Penggiat Lingkungan untuk Keadilan Sumber Daya Alam dan Sosial. Kelompok tersebut terdiri dari 8 organisasi lingkungan yang ada di Lampung, yaitu WALHI Lampung, KaWAN TANI, AMAN Lampung, KBH Lampung, MITRA BENTALA, PILAR Lampung, PUSSBik Lampung, dan Perkumpulan Kampung.

Kita mulai bergerak, bergerilya, menyusun berbagai strategi guna memenangkan pertarungan ini. Berbagai upaya kita lakukan mulai dari menyelenggarakan forum-forum diskusi kritis, menyatakan sikap untuk menolak izin yang menurut kita ajaib itu, menggelar *talk show* dan *hearing*, bertemu dengan pejabat pemerintah setempat, mengorganisir diri dalam kelompok tani.... Semua kita lakukan. Kita berharap banyak agar kiranya apa yang kita lakukan ini merupakan jurus pamungkas untuk memenangkan episode ini.

Kita mempertimbangkan berbagai peluang untuk kita. Skema pengelolaan kawasan hutan yang secara legal ada payung hukumnya, yang bisa kita lakukan, mulai kita tawarkan. Skema pertama yang kita tawarkan adalah skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR). HTR, menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P 55/2011 dan P. 31/2013, dapat diajukan oleh perorangan yang dikoordinasikan oleh kelompok dengan batasan luasan lahan untuk pengajuan. Konsep ini serupa tapi tak sama dengan konsep Hutan Tanaman Industri yang menjadi konsepsi untuk perusahaan.

Kemudian ternyata skema HTR ini belum menjadi peluang bagi kita untuk segera mendapatkan izin. Berdasarkan analisis yang kita lakukan, skema ini tidak dapat dilakukan oleh karena perusahaan telah mendapatkan Persetujuan Prinsip (SP1) itu tadi. Kita tidak pernah melakukan negosiasi apalagi sampai meminta kepada PT GPA atau Groupnya, tetapi melakukan *lobby* kepada Pemerintah Provinsi Lampung, melalui KOMISI AMDAL Provinsi, untuk tidak melanjutkan pembahasan AMDAL PT GPA, serta kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah lewat Dishutbun dan KPH Way Terusan untuk melakukan pengelolaan dan pembangunan hutan bersama masyarakat dengan skema Kemitraan Kehutanan bersama KPH Way Terusan.

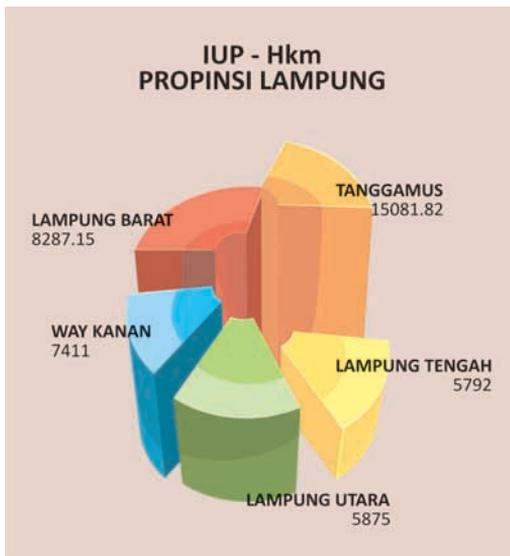
Kita tidak boleh patah semangat. Ada banyak juga teman-teman kita yang sama kerasnya berjuang sebagaimana Bapak dan warga telah tunjukkan.

Saya akan bercerita yang mudah-mudahan ini sebagai bahan perbandingan dan perenungan kita semua tentang betapa tidak adilnya penguasa dalam memperlakukan warga masyarakatnya.

Sebuah fakta, bahwa di Lampung ini dari total luas 779.645 hektare Hutan Produksi dan Hutan Lindung, hanya 5% luas areal yang dapat dikelola dengan izin HKm, yaitu seluas 42.446,97 hektare, HTR 17.000 hektare, PAK Hutan Desa 2.197 hektare.

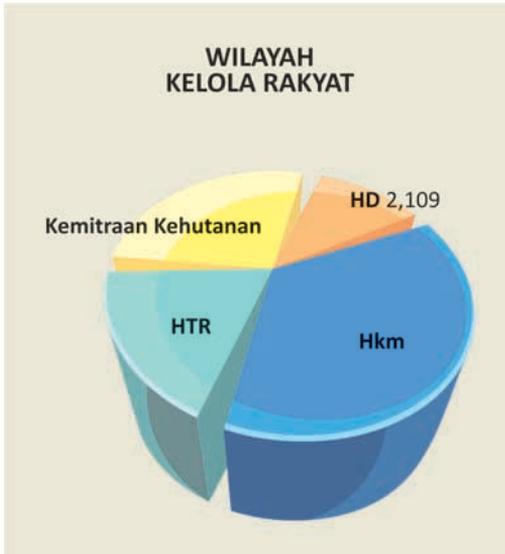
Khusus untuk yang HTR ini, kita semua juga tahu bahwa izin-izin HTR itu diberikan kepada koperasi-koperasi yang bukan milik kelompok tani/masyarakat akan tetapi milik investor/korporasi. Ngeri sekali ya, soalnya izin-izin yang didapat secara langsung oleh perusahaan penerima HGU/HPT saja sudah sebanyak 22,5% dari seluruh kawasan hutan itu.

### Kelola Rakyat (HKm, HTR, Hutan Desa, dan Kemitraan Kehutanan) Hutan Kemasyarakatan (HKm)



Pengelolaan kawasan hutan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) saat ini adalah seluas  $\pm 33.588,15$  hektare yang tersebar di Kabupaten Tanggamus  $\pm 14.608,52$  hektare, Kabupaten Lampung Utara  $\pm 5.330,00$  hektare, Kabupaten Lampung Tengah  $\pm 5.795,00$  hektare, dan Kabupaten Way Kanan  $\pm 1.295,00$  hektare.

### Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), dan Kemitraan Kehutanan;



Sementara itu, skema pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan model Hutan Tanaman Rakyat (HTR) terdapat di Kabupaten Pesisir Barat dengan luas Penetapan Areal Kerja Hutan Tanaman Rakyat (PAK-HTR)  $\pm 22.000$  hektare di Hutan Produksi Tetap.

Kita ketahui pula bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini telah diterbitkan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu

Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR) kepada 7 Koperasi HTR dengan total luas  $\pm 17.768,00$  hektare. Jadi praktis saat ini hanya tersisa  $\pm 4.932$  hektare dari total luas PAK-HTR yang belum dikeluarkan izinnnya.

Ironisnya, koperasi-koperasi penerima izin IUPHHK-HTR adalah koperasi-koperasi yang tidak dibentuk dan dimiliki oleh masyarakat tempatan yang telah mengelola dan menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa izin HTR tersebut tidak diberikan kepada koperasi-koperasi asli milik kelompok tani/masyarakat akan tetapi kepada koperasi-koperasi jadi-jadian yang merupakan perpanjangan tangan investor belaka.

Sementara itu, pengelolaan dengan skema Hutan Desa di Kabupaten Lampung Selatan masih berproses. Sudah ada Penetapan Areal Kerja Hutan Desa (PAK-HD) oleh Kementerian Kehutanan seluas  $\pm 2.109$  hektare di Register 3 Gunung Rajabasa dan saat ini desa melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) sedang mempersiapkan diri untuk pengajuan izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD).

Untuk Kemitraan Kehutanan, pelaksanaannya adalah di Register 47 Way Terusan, di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Way Terusan, Kabupaten Lampung Tengah dengan luas areal yang diajukan  $\pm 12.500$  hektare. Saat ini kawasan tersebut telah dimanfaatkan oleh  $\pm 4.000$  KK atau 20.000 jiwa saat terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.39/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.

Ini adalah pilihan yang ditempuh dalam upaya meminimalisasi potensi konflik di kawasan tersebut. Akan tetapi, baik IUPHHK-HTR, IUP-HPHD, maupun Kemitraan Kehutanan sampai saat ini belum ada yang didapat oleh masyarakat.

Belum lagi karut marut tata kelola hutan kita, luas kawasan hutan yang ada di Lampung kini hanya tersisa  $\pm 328.603$  hektare (32,70%) yang masih berhutan. Pembukaan lahan, penebangan liar (*illegal logging*), dan pemberian izin konsesi untuk perkebunan dan pertambangan adalah penyebab semakin tingginya tingkat kerusakan hutan di Provinsi Lampung.

Situasi ini sangat dimungkinkan menjadi pemicu konflik tenurial baik antara masyarakat Vs pemerintah, masyarakat Vs perusahaan, atau pemerintah Vs perusahaan terkait ketimpangan distribusi lahan. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya izin kepada perusahaan baik perkebunan skala besar maupun pertambangan yang mencapai lebih dari 100 ribu hektare, sementara akses untuk pengelolaan bagi masyarakat hanya  $\pm 47.000$  hektare.

“

...koperasi-koperasi penerima izin IUPHHK-HTR adalah koperasi-koperasi yang tidak dibentuk dan dimiliki oleh masyarakat tempatan yang telah mengelola dan menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut

”

No.	Fungsi Hutan	Luas (hektare)	KERUSAKAN	
			Luas (hektare)	Persentase (%)
1.	Kawasan Hutan Konservasi: Taman Nasional, Cagar Alam Laut dan Tahura Wan Abdul Rachman	462,030	172.704	37,38
2.	Kawasan Hutan Lindung	317,615	199.235	62,73
3.	Kawasan Hutan Produksi	225,090	172.146	76,48
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.004.735</b>	<b>544.085</b>	<b>54,15</b>

Kita pesimis. Akankah perjuangan kita selama ini akan menghasilkan buah manis? Hanya waktu yang akan menjawabnya, hanya belas kasihan dari para penguasa yang akan memungkinkannya.

Mungkinkah? ? ?

Tapi jangan pernah putus asa. Semangat yang kita miliki tentu akan menjadi modal yang sangat berharga demi berhasilnya perjuangan ini.

Skema, prasyarat, sampai dengan cara apa pun akan kita lakukan dengan harapan ini akan membuahkan hasil yang baik. Tapi ini bukan akhir dari segalanya.

Hari ini pun Bapak dan warga Bapak tetap saja harus menanam, merawat dan menjaga tanaman yang selama ini diusahakan. Tetap pertahankan pola-pola pengelolaan hutan dengan kearifan dan budaya yang selama ini kita lihat efektif untuk tetap terjaganya sumber kehidupan ini.

Kearifan lokal masyarakat menjadi pondasi kuat ketika masyarakat merencanakan wilayah kelolanya. Hal ini terlihat jelas dengan keinginan kuat masyarakat untuk TIDAK RAKUS mengeksploitasi wilayahnya untuk tujuan jangka pendek; diawali dengan merencanakan perubahan jenis tanaman (semula tanaman semusim saja, kemudian akan dilakukan pengayaan dengan tanaman kayu dan buah), dan melakukan perlindungan terhadap daerah vital (DAS, rawa, sumber air). Semua ini bukan semata dilakukan untuk menarik simpati Pemerintah Kabupaten Lampung

Tengah, akan tetapi untuk suatu tujuan yang lebih besar dan mulia yakni sebagai warisan bagi generasi penerus dan untuk keseimbangan alam.

Inisiatif lainnya yang juga akan dilakukan adalah pemetaan wilayah kelola secara partisipatif sehingga didapat batas pasti, baik batas antar hamparan kelola maupun batas areal kelola masing-masing; ini semua dilakukan secara swadaya.

Ini saja cerita yang saya sampaikan kepada Bapak dan warga Bapak, sekadar pencerahan saja, sekadar berbagi cerita.

Salam Hangat,

**Rizani**

\_\_\_\_\_ *ttd*





KRISIS  
IDENTITAS DAN SOSIAL-BUDAYA



BIOREGION  
PESISIR BARAT



PROVINSI  
SUMATERA BARAT

## HUKUM DAN APARAT SEBAB MUSABAB TRAGEDI IWAN



# SUMATERA BARAT:

## hukum dan aparat sebab musabab tragedi iwan

---

**Kepada**

**Iwan Mulyadi**

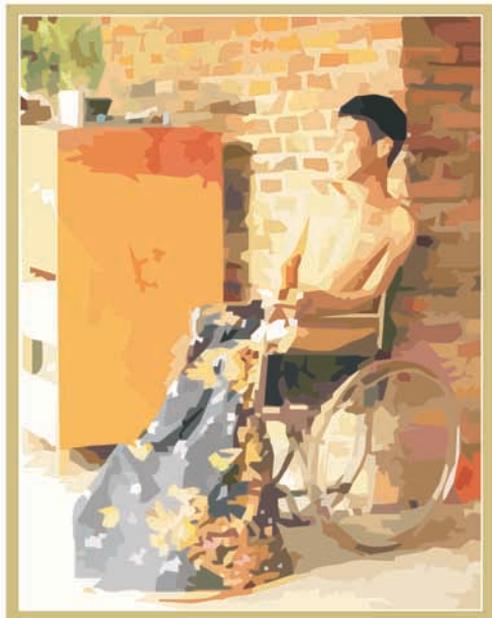
Korban lumpuh yang  
ditembak anggota Polsek  
Kinli tahun 2006

Assalamualaikum Iwan,...

Apa kabarmu, Wan...? Aku berharap Iwan selalu sehat dan yang pasti akan selalu bersemangat.

Aku yakin begitu, karena aku tahu Iwan adalah pemuda yang selalu bersemangat dan tidak mudah patah arang meskipun kondisi tubuh sudah tidak sempurna sejak 26 Januari 2006 silam.

Aku tak bisa membayangkan bagaimana semangatmu tak pernah pupus meskipun separoh bawah tubuhmu telah mati rasa dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Bahkan untuk memutar tubuh saja kamu



membutuhkan bantuan orang lain. Tidak sembarang orang pula bisa membantu; harus yang sudah terbiasa seperti ayah, almarhumah ibu, dan adikmu, Susi.

Itulah kamu, Iwan; laki-laki kuat, bersemangat dan tidak patah arang walau kehidupan banyak yang merintang.

Iwan,

Saat surat ini kutulis, Polsek Kinali, Pasaman Barat sedang mengajukan PK (Peninjauan Kembali) atas putusan MA (Mahkamah Agung) No. 2710K/PDT/2010 yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua yang memenangkan gugatan perdata No. 04/PDT.G/2007/PN.PSB yang kita ajukan tahun 2007 silam. Putusan tersebut memvonis Polres Pasaman Barat harus membayar ganti rugi sebesar Rp 300 juta atas kerugian yang Iwan derita -- karena ulah oknum mereka yang menembak Iwan pada 26 Januari 2006.

Tidak masuk akal memang bahwa mereka mengajukan PK setelah putusan ini dikeluarkan oleh MA lima tahun lalu, 2010. Padahal, batas waktu pengajuan PK jelas diatur dalam Perma No. 1 tahun 1982 pasal 8 huruf b, yaitu dibatasi maksimal 6 bulan setelah ditemukannya *novum* atau bukti baru. Sementara *novum* yang mereka gunakan dalam PK ini adalah surat perjanjian damai antara Briptu Nofrizal dengan keluarga Iwan pada tahun 2006. Padahal juga *novum* yang mereka maksud ini sudah digunakan dalam persidangan pidana di tahun yang sama. Jadi, dihitung sejak tahun persidangan, *novum* tersebut sudah berusia hampir sembilan tahun.

Dalam logika sederhana, kita faham proses ini hanyalah akal-akalan saja untuk menunda pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.

Sebelum mereka mengajukan PK, sejak tahun 2012, tak henti-hentinya kita memanfaatkan peluang agar putusan MA tersebut bisa dieksekusi. Jika eksekusi sudah dilaksanakan dan uang ganti rugi sebanyak Rp 300 juta sudah di tangan Iwan, tentu bisa pula digunakan untuk membeli obat Iwan -- hal yang tidak pernah dibantu mereka itu. Atau uang

tersebut bisa digunakan untuk membeli kebun sawit sebagai jaminan hidup Iwan dan keluarga yang merawat.

Tapi, inilah kenyataannya. Mereka terus menghindar agar tidak membayar. Padahal, untuk kasus-kasus tertentu, mereka bergerak cepat. Sebut saja kasus penyidik KPK Novel Baswedan yang diungkit lagi itu, atau kasus dugaan pemalsuan dokumen Abraham Samad yang ketua KPK itu. Mereka sangat progresif untuk yang itu. Umumlah kita tahu alasan di balik semua itu. Tapi, ketika diminta eksekusi putusan pengadilan yang memenangkan Iwan yang sudah memiliki kepastian hukum, mereka lamban dan menghindar.

Wan...

Aku masih ingat betapa sulitnya akses ke ladangmu, tempat dimana Iwan ditembak. Saat itu, aku harus naik ke sana untuk mengambil gambar guna pembuatan film dokumenter tentang nasib Iwan. Untuk sampai di atas, sepeda motor kami harus jungkir balik dan terperosok ke dalam lubang penuh lumpur. Beberapa kali pula kami harus mendorong sepeda motor untuk dapat keluar dari lumpur. Di beberapa tempat sepeda motor harus digiring karena tidak memungkinkan ditunggangi. Jalan setapak dan berbatas jurang membuat kami sebenarnya takut untuk menunggangi sepeda motor itu. Beberapa kali kami juga harus menepi saat berpapasan dengan mobil-mobil yang sudah dimodifikasi menjadi besi bermesin pengangkut buah sawit.

Melihat kondisi jalan yang sulit seperti itu, aku sungguh tidak mengerti motif apa yang membuat Briptu Nofrizal begitu bersemangat mencari Iwan ke ladang yang begitu jauh dan sulit dijangkau itu...

Usut punya usut, ternyata alasan Nofrizal mencari Iwan ke ladang itu hanyalah karena rumah tetangganya dilempar orang dengan batu. Iwan lah yang dalam kasus ini dituduh. Kebenaran tuduhan itu belum terbukti, tapi Briptu Nofrizal begitu bersemangat naik ke ladang sendirian, berpakaian preman -baju kaos dan celana pendek- mencari Iwan. Tentu saja dengan berbekal senjata api di tangan. Lalu dengan membabi buta menyuruh Iwan turun dari pondok panggung setinggi 2

meter dari tanah sambil menodongkan senjata revolvernya. Iwan yang masih kebingungan karena tidak mengerti apa yang terjadi, terpaksa turun melalui tangga pondok.

Belum sampai Iwan menginjakkan kaki di tanah, DORR... peluru revolver milik Nofrizal menembus tubuh kecil Iwan dari pinggang kiri hingga ketiak kanan. Aken, temanmu itu, mengatakan bahwa saat itu Iwan langsung terkapar bersimbah darah. Lalu, entah bagaimana, Briptu Nofrizal tiba-tiba langsung bisa menggendong Iwan yang bersimbah darah turun dari ladang yang sulit dicapai itu tanpa bantuan siapa-siapa. Ia kemudian membawa Iwan ke rumah sakit.

Aku yakin rasa bersalah dan takut yang begitu besar membuatnya memiliki kekuatan untuk menggendong Iwan waktu itu dan menerobos turun dari ladang di perbukitan.

Di rumah sakit, pinggangmu harus dibor untuk mengeluarkan darah beku akibat tembakan itu. Pasca pengeboran itu, 27 hari lamanya Iwan harus opname di rumah sakit. Di sepanjang masa opname di rumah sakit itu, hanya sekali Nofrizal datang menjenguk Iwan untuk meminta damai. Orang tua Iwan yang tak mengerti hukum menerima tawaran damai waktu itu dan Iwan diberi kursi roda sebagai kompensasi perdamaian. Tentu saja perdamaian yang sudah ditandatangani tidak otomatis membuat Iwan sembuh dari sakit dan kemudian normal kembali. Perdamaian itu tentu juga tidak menghilangkan aspek pidana yang dilakukan oleh Briptu Nofrizal.

Sebagai negara hukum, proses hukum terhadap Nofrizal tentu harus berjalan. PBHI kemudian mendorong proses hukum terhadap Nofrizal harus dijalankan secara pidana. Oleh Polsek Kinali, untuk menyelamatkan oknumnya, Nofrizal kemudian diberi surat tugas agar perbuatannya menembak Iwan dalam rangka dinas. Tentu saja surat tugas yang diberikan tersebut memiliki kejanggalan karena waktu itu Nofrizal datang sendirian dan tidak menggunakan pakaian dinas. Apalagi, saat meminta Iwan turun dari pondok, Nofrizal tidak menunjukkan surat tugas dan langsung mencekal Aken, teman Iwan.

Di pengadilan, Nofrizal mempertanggungjawabkan perbuatannya dan divonis bersalah dan dihukum penjara 18 bulan. Tentu saja, proses hukum ini melibatkan banyak orang. Hampir semua LSM di Padang terlibat, Pemerintah Pasaman Barat, DPRD Pasaman Barat, orang-orang yang peduli. Dan yang paling berpengaruh, tentu saja peran pers yang terus mengawal perkembangan kasus Iwan sejak awal hingga sekarang.

Iwan,

Saat menulis surat ini aku ingat persis bagaimana ekspresi Iwan saat kutanya, “Apa yang akan Iwan lakukan kalau ada Nofrizal di sini?”

“Akan saya remukkan tulangnya,” jawab Iwan sambil mengatupkan gigi dan menepukkan telapak tangan penuh marah.

Itu tahun 2008 saat aku membuat film dokumenter Iwan.

Beberapa waktu yang lalu kami menemani wartawan Tempo yang ingin menulis perjalanan kasus Iwan. Saat aku tanya pertanyaan yang sama, aku melihat ada perubahan. Iwan menjawab pertanyaanku dengan senyum sembari berkata, “Biarkan sajalah.”

Meskipun demikian, aku tidak bisa memastikan apakah senyum dan jawaban yang Iwan berikan itu mengindikasikan Iwan sudah ikhlas atau sudah pasrah dengan panjangnya perjalanan kasus ini. Tapi, yang saya tahu pasti, Iwan adalah orang yang bersemangat dan tidak pernah putus dalam perjuangan.

Sejenak, kalau mengingat lagi ke belakang, Wan, memang Nofrizal sudah dijatuhi hukum disiplin di internal kepolisian dan juga hukum pidana kurungan selama 18 bulan. Akan tetapi, kalau dibandingkan dengan penderitaan yang kamu alami, rasanya tidak sebanding hukuman itu. Dengan statusnya sebagai aparat hukum, mestinya hukumannya lebih berat. Bandingkan saja hukuman Nofrizal dengan vonis 1 tahun kurungan dengan 15 bulan masa percobaan Nenek Asyani karena tuduhan mencuri 7 potong kayu Perhutani. Atau vonis hukuman 1 bulan dengan masa percobaan 3 bulan untuk Nenek Minah yang

mencuri 3 buah kakao di PT Rumpun Sari Antan. Tidak adil sekali rasanya, ya kan Wan... tapi, apa yang bisa kita lakukan?

Begitulah hukum yang ada di negeri kita; semuanya hanya seolah-olah mengacu pada pasal-pasal dalam undang-undang tanpa pengertian dan penerapan yang berkeadilan.

Meskipun secara hukum Nofrizal telah diberi sanksi atas tindakan brutalnya, namun dampak kelakuannya sangat menyiksa bagi Iwan, selamanya.

Setelah keluar dari rumah sakit, almarhum Ibu Iwan pusing memikirkan biaya perawatan di rumah dan biaya *check up* ke rumah sakit. Tidak ada yang membantu, tidak juga Nofrizal dan Polsek Kinali, Pasaman Barat. Jangankan membantu, menjenguk saja mereka tidak pernah.

Sehari-hari Ibu Iwan hanya menunggui Iwan di rumah. Sementara, Bapak Iwan hanya bekerja serabutan. Sementara Iwan sendiri, jangankan mengurus diri sendiri, membalikkan tubuh saat berbaring saja tidak bisa. Semuanya harus dibantu.

Ibu Iwan harus menjual tanah untuk biaya hidup dan merawat Iwan. Kami di PBHI baru tahu kalau Ibu Iwan menjual tanah saat Ibu Iwan sambil menangis menelpon ke kantor minta bantuan hukum karena dituduh mencuri sawit di ladang sendiri.

Posisi Ibu Iwan dalam kasus ini memang riskan, tapi secara *de jure* dan *de facto* ladang sawit yang dipanen Ibu Iwan adalah milik sendiri.

Ayah Iwan memiliki sekitar lebih kurang 6 hektare ladang yang diwarisi dari orang tuanya. Ladang 6 hektare tersebut dijual kepada Marni tahun 2003. Surat pernyataan jual beli dibuat dalam tiga surat yang masing-masing terdiri dari 2 hektare dan diserahkan kepada Marni. Namun, Marni tidak mampu melunasi pembayaran sampai batas waktu yang disepakati dan mengembalikan satu dari tiga surat jual beli itu.

Tanah 2 hektare yang dikembalikan oleh Marni ini kemudian dijual oleh Ayah Iwan pada Hj. Eli untuk biaya pengobatan Iwan. Hj. Eli kemudian mengelola lahan yang sudah dibeli. Tiba-tiba saja saat Hj. Eli

mengusahakan tanah tersebut, Marni datang dan mengklaim tanah tersebut adalah miliknya. Tentu saja Hj. Eli merasa tidak nyaman dan melaporkan pada keluarga Iwan. Akhirnya, tanah Hj. Eli diganti dengan lahan yang ada di samping rumah yang sudah ditanami sawit.

Karena merasa tanah tersebut miliknya, tanpa sepengetahuan keluarga Iwan, tanah yang tidak jadi dibeli oleh Hj. Eli dijual oleh Marni kepada Darlis. Dan tentu saja secara hukum Ibu Iwan adalah pemilik sah tanah tersebut. Dan saat panen, Ibu Iwan dan Susi memanen milik sendiri. Darlis, karena merasa tanah tersebut miliknya dan sudah membelinya dari Marni, kemudian melaporkan Ibu Iwan dan Susi ke polisi dengan tuduhan pencurian.

Karena laporan Darlis tersebut, meskipun Ibu Iwan sudah menjelaskan bahwa tanah tersebut miliknya, Ibu Iwan tetap dibawa ke kantor polisi dan ditahan. Penahanan mereka memang kemudian ditanggihkan, namun persidangan mereka tetap dilanjutkan. Di pengadilan mereka divonis bersalah dan dihukum kurungan selama tiga bulan. Jadilah Ibu Iwan bersama Susi mendekam dalam penjara selama 3 bulan.

Di rumah, tidak ada lagi yang merawat Iwan kecuali Bapak Iwan yang tentu saja juga harus bekerja di ladang. Akhirnya Iwan pun dibawa ke ladang dan hidup di ladang.

Rangkaian penderitaan dan cobaan terhadap Iwan belum berhenti. Setelah keluar dari penjara, Ibu Iwan digigit anjing gila. Karena keterbatasan dan tidak memiliki uang, Ibu Iwan tidak ke Rumah Sakit untuk berobat. Ibu Iwan memilih untuk berobat secara tradisional. Setelah beberapa lama berjuang melawan penyakit karena digigit anjing gila itu, Ibu Iwan berpulang ke pangkuanNya, tahun 2011.

Aku hampir menitikkan air mata saat mendengar kabar Ibu Iwan digigit anjing gila dan meninggal. Sungguh, jika aku ada pada posisi Iwan, aku pasti tidak sanggup dan akan menyerah terhadap deretan dan rangkaian cobaan yang datang silih berganti seperti yang Iwan alami. Aku tidak bisa membayangkan betapa pilunya nasib Iwan. Ditembak dan menjadi cacat berat seumur hidup, kehilangan tanah untuk biaya

hidup, dan terakhir kehilangan Ibu untuk menggantungkan semua harap.

Iwan,

Dari sekian rentetan kepiluan hidup yang Iwan alami karena penembakan itu, tadinya ada sedikit harapan meskipun masih terkatung-katung sekian tahun. Harapan itu adalah putusan Pengadilan Negeri Simpang Empat No. 04/PDT.G/2007/PN. PSB tanggal 18 Juni 2008 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 56/PDT/2009/PT.PDG tanggal 18 Januari 2010, dan dikuatkan lagi oleh putusan Mahkamah Agung No. 2710 K/PDT/2010 tanggal 19 Mei 2011. Putusan tersebut memerintahkan Polsek Kinali untuk membayar ganti rugi kepada Iwan sebanyak Rp 300.000.000,00.

Namun, sampai hari ini yang sudah 4 tahun putusan tersebut bersifat *Inkracht van gewijsde*, belum sepeser pun uang ganti rugi tersebut diserahkan ke tangan Iwan. Bahkan, seperti sudah aku sebutkan di awal surat ini, mereka malah mengajukan kasasi yang novumnya sudah kadaluarsa, novum akal-akalan.

Untuk melaksanakan eksekusi putusan tersebut, PBHI Sumbar sebagai kuasa hukum sudah menempuh mekanisme hukum dengan mengajukan permohonan di awal tahun 2012 ke Pengadilan Simpang Empat. Kita juga sudah membayar biaya eksekusi sesuai dengan aturan.

Namun apa lacur, Wan, tiga kali Kapolsek Kinali dipanggil oleh pengadilan, tiga kali mereka mangkir dengan berbagai alasan. Setiap kali ditanyakan perkembangannya, mereka selalu memberikan jawaban klasik “sedang mempelajari kasus tersebut karena baru jadi Kapolsek”. Tidak hanya di Polsek, di Polres pun jawaban klasik ini yang selalu kita terima.

Permohonan eksekusi putusan perdata tidak hanya dilakukan oleh PBHI melalui pengadilan semata. Setiap agenda apapun yang berhubungan dengan Iwan, selalu dikomunikasikan dengan media yang sejak awal berkomitmen membantu pencarian keadilan bagi Iwan.

Nyaris semua perkembangan kasus Iwan sejak awal tidak pernah luput dari pemberitaan media cetak dan elektronik, baik lokal maupun nasional.

Tapi inilah wajah hukum kita, Wan; tajam ke bawah tumpul ke atas. Dan kita sama-sama merasakan praktik ketidakadilan yang seperti itu sejak awal.

Meskipun pada kenyataannya praktik hukum seperti itu adanya di negeri kita ini, perjuangan tentu tak boleh berhenti. Kita tetap memanfaatkan semua peluang agar putusan gugatan perdata Iwan segera dieksekusi. Dari beberapa komunikasi terakhir dengan Pengadilan Simpang Empat, sudah ada pertemuan antara pengadilan dan Polres Pasaman Barat. Bahkan Polda juga sudah melakukan pengawasan terhadap kasus Iwan berdasarkan instruksi Polri. Kita pun merasa ada angin segar; angin segar bahwa putusan akan segera dieksekusi.

Namun, ternyata harapan itu bukan angin segar tapi justru angin busuk. Mereka malah mengajukan Peninjauan Kembali. Apa yang mereka lakukan sungguh telah menambah luka bagi Iwan.

“

Warga di sekujur Sumatera menjadi korban kekerasan aparat demi mengamankan proyek-proyek pengerukan alam dan mengejar pertumbuhan ekonomi.

”

Iwan,

Jika dihitung waktu, sekarang sudah sembilan tahun lebih tubuh Iwan dari pinggang ke bawah mati rasa dan tidak bisa digerakkan, tidak bisa pula digunakan menopang bagian tubuh yang lain. Dulu, Iwan adalah anak yang sehat, lincah, dan pekerja keras. Dulu Iwan pernah mengambil keputusan untuk membantu orangtua dengan ikut berladang di hutan dan mendirikan pondok kecil di sana.

Sampai peristiwa na'as itu terjadi, Iwan pasti tidak pernah membayangkan akan menghabiskan sisa hidup dalam keadaan lumpuh dengan separuh tubuh mati rasa dan membusuk di bagian pinggang dan pantat. Hari-hari Iwan kini dihabiskan di atas dipan usang dan lusuh. Sesekali, hanya ada kursi roda reot yang bisa Iwan manfaatkan untuk mengusir jenuh di kamar 3x3 m di bagian belakang rumah warisan Ibu itu.

Meskipun kepiluan Iwan sangat berat dan tak terperi dengan berbagai tragedi yang datang silih berganti, ternyata Iwan tak sepenuhnya sendiri.

Ada orang lain yang juga mengalami nasib buruk karena wajah hukum Republik ini. Satu tahun setelah kasus Iwan, Risdiyanto, seorang petani, hancur kakinya ditembak oleh polisi dengan senjata laras panjang karena tuduhan mencuri sawit.

Kemudian tahun 2012 lalu, di Dharmasraya puluhan laki-laki dipukuli dan digelandang ke kantor polisi dengan tuduhan menyandera Kapolres. Bahkan, laki-laki yang sedang melaksanakan pesta perkawinan ikut ditangkap dan digelandang ke Polres.

Di Sijunjuang, penghujung tahun 2012, dua orang kakak beradik, Budri M. Zen dan Faisal, mati dalam sel tahanan polisi.

Di Maligi, Pasaman Barat tahun 2011, perempuan-perempuan ikut menjadi korban kekerasan aparat dalam proses pengamanan PT PHP. Bahkan di antaranya ada yang sampai keguguran.

Tidak hanya masyarakat biasa, pengacara PBHI Sumbar yang menjadi kuasa hukum Iwan pun mengalami kekerasan oleh polisi di Nagari Tikalak, Solok saat eksekusi lahan tahun 2011.

Dan banyak lagi kasus warga sipil yang menjadi korban kebrutalan aparat polisi di seputaran Sumatera bagian barat ini saja, dan nyaris semua kasusnya mengendap, lalu kemudian hilang ditelan bumi.

Peristiwa-peristiwa semacam itu banyak sekali kita dengar dan bahkan kita lihat di Ranah Beradat ini, Wan. Asal muasalinya tidak jauh-jauh dari persoalan materi dan biasanya seputaran tanah atau lahan.

Iwan, terakhir aku ingin mengatakan bahwa meskipun langit akan runtuh, dunia akan kiamat, hukum harus adil menjelaskan nasib Iwan dan orang-orang yang senasib dengan Iwan.

Padang, Penghujung Mei 2015

**Firdaus**

PBHI Sumatera Barat

\_\_\_\_\_ *ttd*



# CATATAN Akhir

---

Saudara-saudaraku,

Demikianlah tutur lirih-tutur lirih kita. Inilah Sumatera kita yang roboh oleh hempasan krisis pembakaran hutan dan lahan, krisis tanah dan perampasan lahan, krisis pangan dan air, krisis energi dan pelayanan dasar, krisis tambang dan perkebunan, krisis hukum, dan pada akhirnya krisis identitas dan sosial budaya.

Iya, berbagai krisis itu adalah krisis-krisis pada pondasi yang apabila runtuh, roboh pula lah Sumatera kita. Pondasi-pondasi ini seringkali tidak nampak megah dan mewah, bahkan seringkali tidak nampak terlihat, akan tetapi justru adalah yang lebih penting dan mendasar. Itulah pondasi keselamatan Sumatera.

Saudara-saudaraku,

Mbah Kardi di Bengkulu adalah salah satu wajah nyata dari jutaan orang seperti dia, dianggap tidak memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya mBah Kardi adalah sekadar objek untuk dipindahkan-disingkirkan kesana kemari demi kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi itu. Pengejaran pertumbuhan ekonomi itu andalannya adalah pengerukan tanah, hutan, laut, segala yang ada di dalam dan di atas tanah.

Pertumbuhan ekonomi itu umpama sekadar genting di atap surau Sumatera itu. PDB umpama sekadar mahkota hiasan di atap itu. Bukan tiang penyangga apalagi pondasi.

Dan nampaklah bahwa semua kejar-kejaran ekonomi itu bukan untuk keselamatan dan kesejahteraan mBah Kardi. Bukan pula untuk Anwar Sadat di Sumatera Selatan. Bukan pula untuk Iwan dan Ibu Syamsimarnis dan Ibu Yeni dan Uda Iswandi di Sumatera Barat, atau Bang Karya dan

Bapak Wayan dan Bapak Nasir dan Bapak Sebut Saja A di Lampung, atau Bang Raport di Mentawai, atau Nak Joko dan Ibu Yus di Bengkulu, atau Bapak dan Ibu Rasyid beserta anak-anak mereka Atiyya dan Zakiy juga Bang Edi di Riau, atau Bapak Adi dan Bapak Ali di Aceh, atau Bapak Haposan Sinambela dan Bapak Sihitte Sumatera Utara.

Kita semua ini adalah sekadar korban-korban ikutan dalam seluruh cerita pengejaran pertumbuhan ekonomi ini. Sebab mana ada sejarahnya pemerintah mau repot-repot membangun pembangkit listrik dan jaringan distribusi hanya untuk memenuhi kebutuhan warga bukan karena ada kepentingan industrial. Tidak pernah dalam sejarah pemerintah membangun jalan dan segala infrastruktur dasar kalau tidak dalam rangka menggelar karpet merah bagi investor. Tidak ada penegakan hukum dan pembenahan birokrasi yang tidak karena keperluan mendorong kepastian usaha, merayu investor, dan menyediakan pasar bagi model ekonomi itu.

Saudara-saudaraku,

Dalam Robohnja Sumatera Kami ini kita tidak menawarkan solusi. Kita hanya berharap surat-surat ini dijawab. Kita juga akan sangat senang kalau ada surat-surat lain yang ditulis dan dikirimkan kepada satu sama lain, warga krisis Sumatera.

Itu sajalah yang kami inginkan: saling bersurat, saling dengar, saling bicara.

Di Penghujung Bulan Agustus, 2015

**Sebut Saja Warga Krisis Sumatera**

\_\_\_\_\_ *ttd*

Pulau Sumatera adalah mozaik penting dari negeri kepulauan Republik Indonesia, pada pada masa sekarang maupun pada masa lalu. Bangunan bangsa negeri ini tidak dapat dilepaskan dari tapak sejarah di Pulau Sumatera sejak masa kerajaan Hindu, masuknya Islam, masa pendudukan Belanda, Inggris hingga paska-kemerdekaan. Pada bacaan-bacaan sejarah Pulau Sumatera lah tersimpan kebijakan-kebijakan dan hikmah penting tentang kekinian kehidupan sosial, politik, ekonomik maupun ekologi pulau besar paling barat Indonesia ini.

Terinspirasi oleh buku "Robohnja Surau Kami" karya A. A. Navis yang mengisahkan ambruknya tatanan sosial yang digerus modernisasi, buku ini mengisahkan daya-rusak berhalwa ekonomi pertumbuhan yang menjadi pedoman pembangunan negeri ini terhadap tatanan sosial, kultural, politik, ekonomik dan ekologi di seujur Pulau Sumatera. Dari Aceh hingga Lampung, dari hal kekerasan hingga pencemaran, untuk anak-anak hingga mBah-mBah, para penulis mengungkapkan isi hatinya dalam bentuk surat-surat pribadi dan langsung.

Ada kisah nyata tentang aib keluarga, kemiskinan, pertentangan tetangga, sejarah penjajahan, perampasan tanah. Juga siasat-siasat dan harapan. Para penulis surat dan penerima surat adalah pelaku dan pihak langsung di dalam krisis Sumatera.

Simpul Kampanye Sumatera adalah kelompok belajar beberapa Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Pulau Sumatera sejak 2010, yang menerima dukungan penguatan kapasitas dan konsolidasi kampanye dari Samdhana Institute melalui program "Kewaspadaan Masyarakat Terhadap REDD+" yang memperoleh pembiayaan dari NORAD.



SUMATERA BARAT  
BENGKULU  
LAMPUNG  
ACEH  
RIAU  
SUMATERA SELATAN  
SUMATERA UTARA



Johalabari

Qbar



Norad



The Samdhana Institute



9 781031 506983